



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI DALAM ERA LIBERALISASI  
INFORMASI : STUDI KASUS SEMBOYAN *MILLION  
FRIENDS ZERO ENEMY* ERA PEMERINTAHAN SUSILO  
BAMBANG YUDHOYONO**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains  
(M.Si)**

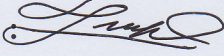
**ZIYAD FALAHY  
1006797206**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM S2 HUBUNGAN INTERNASIONAL  
JAKARTA  
JUNI 2012**



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar

Nama : Ziyad Falahi  
NIM : 1006797206  
Tanda Tangan   
Tanggal : 29 Juni 2012



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Ziyad Falahi  
NPM : 1006797206  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Kebijakan Luar Negeri dalam Era Liberalisasi  
Informasi : Studi Kasus Semboyan *Million Friends*  
*Zero-enemy* Era Pemerintahan Susilo Bambang  
Yudhoyono

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains Hubungan Internasional pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Fredy B.L.Tobing, M.Si (.....)  
Penguji Ahli : Makmur Keliat, Ph.D (.....)  
Ketua Sidang : Dr. Hariyadi Wirawan (.....)  
Sekretaris Sidang : Asra Virgianita, MA (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 29 Juni 2012



## KATA PENGANTAR

Dengan ini penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT serta shalawat salam pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian berjudul Kebijakan Luar negeri dalam era Informasi: Studi Kasus Semboyan *million friend zero enemy* Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono” ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sebuah karya yang berupaya menganalisa problem dalam kebijakan luar negeri Indonesia sekaligus memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih asertif.

Ucapan terima kasih pertama dan terutama penulis persembahkan kepada kedua orang tua, kedua figur panutan yang paling penulis sayangi, yakni ayahanda AZ Fanani dan ibunda Dijanah atas doa dan dukungannya yang tiada henti mengalir untuk penulis. Sekalipun karya ini tidak cukup membalas jasa mereka, namun paling tidak karya sederhana ini dapat menjadi sebuah persembahan yang tulus dari lubuk hati.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen pascasarjana Hubungan Internasional UI yang jasanya sangat besar yang belum tentu penulis mampumemblas kebaikan yang telah diberikan. Pertama kepada bapak Fredy Buhama Lumban Tobing selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan kesibukannya untuk membimbing penulisan ini. Selain itu kepada bapak Syamsul Hadi atas berbagai pengalaman dan petuah yang telah diberikan kepada penulis yang sangat berkesan. Pak Makmur Keliat sebagai partner diskusi yang telah memberikan banyak masukan bagi bagi penulisan ini. Mbak Asra Virgianita yang membimbing penulis untuk menyelesaikan mata kuliah seminar. Mbak Suzie Sudarman yang banyak memberikan inspirasi bagi penulis untuk memulai penulisan. Professor Zainuddin Djafar dan mas Tirta Musitama yang memberikan materi perkuliahan sebagai modal penting bagi penulis. Serta para dosen lainnya yakni mas Andi Wijayanto, mas Edy Prasetyono, Pak Erwin Indrajaya, Pak Haryadi Wirawan, mas Bantarto Bandoro, mas Broto Wardoyo, mbak Dwi Ardhanariswari, dan mbak Evi Fitriani yang memberikan kenangan belajar yang tidak terlupakan

Serta tidak bisa dilupakan pada para dosen Hubungan Internasional universitas Airlangga, yang memberikan bimbingan bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan sarjana. Sebuah ilmu yang berguna bagi penulis untuk menjalani perkuliahan di pascasarjana. Dan juga salam hangat serta terima kasih teman teman pascasarjana UI yang telah menjadi mitra belajar yang menyenangkan. Tidak ketinggalan para pegawai pascasarjana dan nama-nama yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung menginspirasi penulisan ini. Ucapan terima kasih yang terakhir ditujukan kepada para teman teman bermain penulis di Jakarta diantaranya adalah Leo Irawan, Chandra Nurhidayat, Adin Azhar, Rikin Junaidi, Willy Betariska, Edo Septian, Yesaya Hardyanto, dan Muhammad Nizar atas berbagai pengalaman hidup bersama di Jakarta sebagai orang perantauan, sebuah pengalaman yang menyenangkan sekaligus menantang.

Penulis menyadari karya berjudul Kebijakan Luar negeri dalam Era Informasi: studi kasus semboyan *million friends zero enemy* era presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis memiliki harapan besar banyaknya masukan dan kritikan yang tentunya akan semakin mengembangkan gagasan dalam tulisan ini. Dengan demikian, maka kata pengantar ini penulis akhiri dengan sebuah harapan supaya Indonesia menjadi negara yang mampu menjadi subyek dalam hubungan internasional dewasa ini sebagaimana tertuang dalam amanat konstitusi 1945. Atas perhatiannya saya haturkan terima kasih.

Jakarta 11 Juni 2012

Ziyad Falahi



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

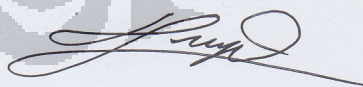
Nama : Ziyad Falahi  
NPM : 1006797206  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Departemen : Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Kebijakan Luar Negeri dalam Era Liberalisasi Informasi: Studi Kasus Semboyan *Million Friends Zero Enemy* era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 29 Juni 2012

Yang menyatakan



Ziyad Falahi



## ABSTRAK

Nama :Ziyad Falahi  
Program Studi :Hubungan Internasional  
Judul :Kebijakan Luar negeri dalam era Informasi: Studi kasus semboyan *million friends zero enemy* Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Indonesia pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua (2009-2014) mengeluarkan semboyan *Million Friend zero enemy*. Namun, dalam perjalanannya menjadi problematika mengingat slogan tersebut hadir pada momentum dimana banyak muncul tuntutan supaya Indonesia lebih asertif. Implikasinya pemerintah tidak jarang dihadapkan pada kontroversi terkait beberapa kasus seperti kedaulatan dan permasalahan TKI. Diantara banyak sekali alternatif jawaban dibalik semboyan tersebut, peneliti menghadirkan pencitraan sebagai konsep yang kemudian memancing analisis lebih dalam. Terdapat keyakinan yang dipercayai pemerintah Indonesia era presiden SBY mengenai perlunya antisipasi atas perkembangan informasi yang turbulen demi menjaga reputasi. Dengan demikian penelitian ini mencoba mengelaborasi logika dibalik slogan tersebut.

**Kata Kunci:**

Liberalisasi Informasi, Pencitraan, Kebijakan Luar Negeri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Semboyan *Million Friend Zero Enemy*.

## ABSTRACT

Name : Ziyad Falahi  
Study Program : Hubungan Internasional  
Title : Kebijakan Luar negeri dalam era Informasi: Studi kasus semboyan *Million friends zero enemy* Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Million Friend Zero Enemy is Indonesia's foreign policy doctrine in Susilo Bambang Yudhoyono's second term of government (2009-2014). As the time goes by, the doctrine is challenged by problems arising from the external issues requiring the country to take more assertive positions. As a result for taking softer and more moderate positions, the government is frequently criticized in its attempt to handle some controversial issues such as sovereignty and migrant worker. Among so many possible perspectives to answer the logic behind the doctrine, this research is emphasizing the believes about the importance of anticipatory policy to overcome the turbulency of informations as an attempt to build an image. Thus, this research is attempting to elaborate the logic behind "Million Friends Zero Enemy" doctrine.

**Keywords:**

Liberalization of information, Image-building, foreign policy, Susilo Bambang Yudhoyono, and Million Friend Zero Enemy.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Signifikansi Penelitian .....	7
1.5 Tinjauan Pustaka .....	7
1.6 Kerangka teoritik .....	12
1.6.1 Kebijakan Luar Negeri sebagai bagian Pencitraan	12
1.6.2 Pencitraan Sebagai Respon atas liberalisasi informasi.	16
1.6.3 Konseptualisasi Teoritik.....	20
1.6 Metodologi Penelitian .....	27
1.7 Sistematika Penelitian .....	29
<b>BAB 2 <i>MILLION FRIENDS ZERO ENEMY</i> SEBAGAI PENCITRAAN</b>	<b>30</b>
.....	
2.1 Gambaran Secara Umum <i>Million Friends Zero Enemy</i> .....	30
2.2 Kontroversi dalam Implelentasi <i>Million Friends Zero Enemy</i> .....	37
2.3 <i>Million Friends Zero Enemy</i> dan Problem Pencitraan.....	43
2.4 Paradigma Pemerintah Indonesia .....	49
2.5 <i>Million Friends Zero Enemy</i> : Mengarungi Turbulensi dengan Pencitraan.....	55
2.6 <i>Million Friends Zero Enemy</i> : Pencitraan dan Problem Identitas	61
<b>BAB 3 <i>MILLION FRIENDS ZERO ENEMY</i> SEBAGAI RESPON ATAS LIBERALISASI INFORMASI.....</b>	<b>67</b>
3.1 Genealogi Perkembangan Liberalisasi Informasi di Indonesia.....	67
3.2 Minimalisme Kontrol Negara terhadap Sektor Informasi dan Implikasinya.....	72
3.3 Pencitraan Pra Liberalisasi Informasi di Indonesia.....	77
3.4 Pencitraan Pasca Liberalisasi Informasi di Indonesia.....	82
3.5 Liberalisasi Informasi: Segregasi Citra di tengah Turbulensi.....	88
3.6 Kemungkinan Alternatif atas Kondisi Liberalisasi Informasi.....	95
<b>BAB 4 KESIMPULAN.....</b>	<b>101</b>
4.1 Konseptualisasi dan Implikasi Teoritik .....	101
4.2 Rekomendasi .....	106
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>112</b>

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1	Tabel Tinjauan Pustaka .....	11
Gambar 1.2	Skema pengaruh Liberalisasi Informasi.....	20
Gambar 1.3	Tabel Ekstraksi kerangka Teoritik.....	23
Gambar 3.1	Grafik Implikasi Positif Kinerja Struktur informasi dan Kinerja Teledensitas.....	71
Gambar 3.2	Tabel Struktur Infromasi Indonesia.....	75
Gambar 3.3	Tabel Komparasi Pencitraan.....	85
Gambar 3.4	Skema Alternatif atas Liberalisasi Infromasi.....	98



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

*Million friends zero enemy* (sejuta kawan, nol musuh) merupakan sebuah semboyan yang hadir mengiringi kebijakan luar negeri Indonesia era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebuah semboyan yang dimaksudkan untuk menampilkan Indonesia sebagai negara yang mampu menjalin persahabatan ke segala penjuru (*all direction foreign Policy*) dalam dunia yang sedang bergejolak sebagaimana dilukiskan presiden SBY lewat kiasan *navigating a turbulent ocean* (mengarungi samudra bergejolak). Terlebih lagi dalam dunia yang mengalami keseimbangan dinamis (*dynamic equilibrium*), memungkinkan adanya kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan kata lain, semboyan *million friends zero enemy* yang dilandasi atas prinsip tanpa musuh penting untuk menjadi penekanan netralitas sikap Indonesia ditengah pusaran gejolak pertentangan tersebut.

Berangsur-angsur Indonesia mengalami transisi ke arah citra positif pada era pemerintahan presiden SBY. Urgensi untuk mendesain citra positif diperlukan guna mengklarifikasi persepsi publik Internasional kepada Indonesia yang semula diasosiasikan sebagai surga koruptor, pelanggar Hak Asasi Manusia, dan sarang teroris.<sup>1</sup> Dalam derajat tertentu, citra positif tersebut turut berkontribusi menjadikan Indonesia sebagai pemegang amanah tuan rumah berbagai forum besar Internasional seperti Konferensi Asia Afrika (KAA).<sup>2</sup> Tidak bisa dipungkiri, Presiden SBY merupakan presiden Indonesia yang dalam sejarahnya paling sering mendapat amanah sebagai tuan rumah forum internasional. Posisi Indonesia dalam konstelasi global menjadi semakin krusial dengan terlibatnya Indonesia dalam forum G-20. Sedangkan dalam kancah regional Asia Tenggara, kepercayaan datang untuk menjadikan Indonesia sebagai mediator dari kasus konflik Thailand dan Kamboja. Selain itu yang masih teringat adalah Indonesia didaulat menjadi ketua ASEAN pada tahun 2011. Bahkan Presiden SBY secara pribadi

<sup>1</sup> Susilo Bambang Yudhoyono, *Indonesia Unggul: Kumpulan Pemikiran dan Tulisan Pilihan* oleh Presiden Republik Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2009).

<sup>2</sup> Dino Patti Djalal, *Harus Bisa: Seni Kepemimpinan ala SBY*, (Jakarta: R&W, 2009).

sempat menjadi kandidat peraih Nobel perdamaian, serta yang terbaru diwacanakan sebagai kandidat Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Beberapa contoh fenomena tersebut menunjukkan strategi pemerintahan presiden SBY relatif berhasil memperbaiki citra Indonesia di mata internasional. Meskipun dalam beberapa hal memiliki implikasi positif, namun mendayung di antara samudra bergejolak ternyata tidak semudah yang dikisahkan. Dalam konteks tertentu *million friends zero enemy* justru semakin menjadi beban bagi Indonesia untuk bersikap Asertif. Sebagai contoh sikap pemerintah Indonesia yang ragu untuk memberi peringatan tegas pada Malaysia dan Arab Saudi yang sering terlibat dalam kasus TKI. Klimaksnya, ketika pemerintah Indonesia harus mengeluarkan dua miliar untuk membebaskan seorang TKI bernama Darsem, serta kegagalan mengantisipasi pemancung Ruyati yang tidak lain merupakan korban jiwa TKI ketiga dalam periode pemerintahan presiden SBY.<sup>3</sup> Masalah kedaulatan juga dipertanyakan di mana masih segar di ingatan di mana insiden di seputar perairan Pulau Bintan pada tanggal Agustus 2010 yang kemudian mendorong kurang berhasilnya *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) di Kinabalu September 2010.

Maka dari itu, dalam perjalanannya kemudian, semboyan *Million friends zero enemy* tidak lepas dari kontroversi dan mengundang skeptisisme.<sup>4</sup> Meskipun Presiden SBY terpilih dengan suara signifikan pada pemilu 2009, namun tidak ada kemajuan berarti dibandingkan era sebelumnya. Slogan tersebut lebih merupakan repetisi dari diplomasi serupa yang diimplementasikan pemerintahan presiden SBY periode pertamanya. Ketidaktegasan, dan keraguan yang terlihat dalam implementasi *million friends zero enemy* merupakan sebuah anomali. Padahal presiden SBY terpilih dengan suara yang signifikan dalam pemilu langsung pada periode keduanya, yang seharusnya menjadi modal untuk bersikap lebih Asertif. Terlebih lagi, presiden SBY tidak menanggung beban untuk mempertahankan posisinya di periode keduanya karena batas maksimal dua kali masa kepresidenan beliau. Seharusnya kondisi tersebut justru menjadi modal presiden SBY untuk bersikap Asertif dan tanpa beban. Namun tuntutan dari berbagai elemen publik ternyata masih jauh dari harapan. Implementasi semboyan *zero*

<sup>3</sup> Hikmahanto Juwana, "Sekali Lagi Lindungi TKI!", *Seputar Indonesia*. 21 Juni 2011.

<sup>4</sup> Inggri Wedhaswari, "Thousand Friends, Zero Enemy", *Kompas*, 20 Oktober 2009. Hal. 7.



*enemy* hadir pada momentum yang tidak tepat ditengah besarnya harapan agar diplomasi Indonesia lebih tegas dari era sebelumnya.

Perlu kiranya untuk meninjau alasan pemerintah untuk mengimplementasikan semboyan *million friends zero enemy* dengan antusias. Pemerintah berpendapat jika semboyan *million friends zero enemy* merupakan sebuah tuntutan sikap dalam dunia yang tidak lagi didominasi oleh kekuatan besar dan senantiasa dinamis, sehingga kerjasama ke segala arah diperlukan, sebaliknya sikap permusuhan adalah kerugian. Negara kecil sekalipun memiliki potensi untuk melangsungkan kerjasama dengan Indonesia. Semboyan tersebut dikejawantahkan melalui keputusan banyak sekali pembukaan hubungan diplomatik baru sejak 2009.

Namun, mendayung diantara samudra bergejolak dalam kondisi *dynamic equilibrium* ternyata tidak semudah sebagaimana yang dikisahkan. Rangkaian peristiwa yang dipaparkan sebelumnya menunjukkan ambivalensi, semisal bagaimana posisi pemerintah dalam menengahi konflik barat dan Islam. Di satu sisi pemerintah Indonesia rutin mempromosikan Indonesia sebagai model Islam yang demokratis namun di sisi lain menyediakan pesta penyambutan yang meriah untuk acara pulang kampung Barack Obama. Implikasinya, keindahan konsepsi Islam moderat ternyata menuai problem dalam tataran praktik. Bahkan dalam kasus Israel-Palestina posisi pemerintah dianggap mendua. Di satu sisi pemerintah berkomitmen untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, disamping pemerintah terus berupaya untuk mendukung dan membantu persiapan kemerdekaan Palestina. Namun di sisi lain kontroversi muncul ketika pemerintah kembali bersikap tidak tegas dalam kasus penyanderaan Warga Negara Indonesia oleh Israel dalam kapal Asvi Marmara.

Dengan demikian maka semboyan *million friends zero enemy* memancing urgensi untuk diterjemahkan kembali. Semboyan *million friends zero enemy* semula dipandang tidak lebih dari sekedar *brand* atau aksesoris semata. Bahkan tidak sedikit yang memandang slogan tersebut sebagai sebuah basa basi diplomasi yang justru intersep dengan prinsip bebas aktif dan mendayung diantara dua karang. Akan tetapi, jika hanya sekedar metafora, maka akan muncul kontradiksi ketika menelaah jika slogan ini intensif hadir mengiringi pernyataan Presiden SBY

dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa baik dalam konferensi pers, maupun dalam forum internasional.<sup>5</sup> Darisini perlu untuk memikirkan kembali dimana sebaiknya menempatkan semboyan *million friends zero enemy*. Jika hanya sekedar aksesoris dan *brand*, lalu mengapa intensitas kemunculannya baik dalam tataran diskursus maupun praktis menunjukkan antusiasme pemerintah. Dengan demikian, muncul asumsi sementara jika slogan tersebut mengisyaratkan sebuah ritual/symbolisasi dan merupakan refleksi dari sebuah keyakinan yang dianut. Akan muncul ruang bagi analisis yang lebih mendalam ketika memproblematisasi *million friend zero enemy* bukan hanya dari redaksionalnya, melainkan juga dari implementasinya. Dengan kata lain, tidak ada kebaruan atau koreksi yang ditawarkan semboyan tersebut terhadap era sebelumnya. Namun justru disitulah letak anomalnya dan menjadi sebuah problem yang perlu ditinjau secara akademis. Dengan demikian, maka perlu meninjau apa yang menjadi motivasi pemerintah untuk tidak merubah kebijakannya untuk lebih asertif.

Sebagai sebuah semboyan, *million friends zero enemy* menjadi sebuah nilai yang tidak bisa dipisahkan dari filosofi pemerintah dalam memandang dunia (*worldview*).<sup>6</sup> Pemerintah berpijak pada kepercayaan akan kondisi dunia yang sedang turbulen, senada dengan yang dikisahkan presiden sebagai *navigating a turbulent ocean*. Sedangkan menteri Marty Natalegawa mengeluarkan sebuah ungkapan lain yang mendeskripsikan kondisi *turbulence* tersebut dengan istilah yang dikenal sebagai *dynamic equilibrium*.<sup>7</sup> *Dynamic equilibrium* atau juga disebut “Doktrin Natalegawa” adalah kondisi tanpa adanya kekuatan dominan tunggal sehingga berbagai negara berinteraksi secara damai dan menguntungkan. Kedua kiasan tersebut didasarkan atas asumsi bahwa globalisasi mendorong perlunya sikap tanpa musuh. Namun jika memang benar globalisasi merupakan faktor eksternal dibalik semboyan, lalu mengapa masih banyak contoh negara yang asertif sekalipun menampilkan diri dengan sosok bersahabat..

<sup>5</sup> Sekalipun pemerintah tidak secara resmi mengesahkan dalam sebuah dokumen resmi bahwa nama kebijakan luar negeri Indonesia adalah *million friends zero enemy*, namun terlepas dari itu, semboyan ini acapkali disosialisasikan dalam pidato di forum internasional dan diperkenalkan melalui buku diplomasi 2010. Penjelasan lebih komprehensif dibahas pada bab kedua.

<sup>6</sup> Paige Johnson Tan, “Navigating a Turbulent Ocean: Indonesia Worldview and Foreign Policy”, *ASEAN Perspective*, 31:3 (2007) Hal. 147-181.

<sup>7</sup> Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, “Buku Diplomasi Indonesia 2010”.



Intrepretasi terhadap kiasan samudra bergejolak tersebut perlahan lahan mulai tersibak ketika Menteri Marty Natalegawa mengutip konsep dari Joseph Nye, yakni *paradox of plenty*. *Paradox of plenty* menjadi sebuah dalil teoritik bagi perlunya sikap persahabatan dan tanpa musuh. Upaya untuk menjaga Reputasi dan kesandisinyalir merupakan latar belakang mengapa slogan *million friends zero enemy* perlu senantiasa disosialisasikan sebagai wujud komitmen Indonesia untuk menjalin persahabatan ke segala entitas (*all direction foreign policy*). Disimak lebih lanjut, *paradox of plenty* dalam teoritisasi hubungan internasional berasal dari paradigma Neoliberal yang dikemukakan oleh Joseph Nye.<sup>8</sup> *Paradox of plenty* merupakan konsekuensi perkembangan teknologi informasi yang mengisyaratkan begitu banyak ancaman atas reputasi pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, kondisi *paradox of plenty* tidak bisa dipisahkan dari kondisi liberalisasi informasi, yakni ketika informasi menjadi komoditas.

Liberalisasi informasi menjadi konsep yang menunjukkan posisi penulis berbeda pandangan dengan konsepsi *dynamic equilibrium* yang mengasumsikan Globalisasi adalah determinan bagi sikap *million friends zero enemy*. Dengan kata lain, liberalisasi Informasi adalah intrepretasi penulis atas *paradox of plenty* yang juag bersepakat akan kondisi informasi yang turbulen. Peneliti lebih memandang yang terjadi di Indonesia adalah liberalisasi informasi, dan bukan globalisasi. Hal tersebut karena Globalisasi merupakan sebuah konsep mentah yang masih luas dan hingga kini masih memunculkan perdebatan.

Uraian diatas masih memunculkan problem analisis mengenai mengapa liberalisasi informasi dapat memunculkan semboyan *million friend zero enemy*. Melalui asumsi Joseph Nye, reputasi merupakan aspek yang krusial dalam kebijakan luar negeri. Ketika berbicara mengenai reputasi, maka pembahasan akan tidak jauh dari pencitraan. Terlebih lagi sudah menjadi pemberitaan umum mengenai dugaan presiden SBY melakukan pencitraan politik. Jika disimak lebih lanjut, karakteristik yang tergambar secara umum dalam kebijakan *zero enemy* inheren dengan *branding* figurpresiden SBY. Seperti halnya Islam moderat yang erat kaitanya dengan simbolisasi nasionalis-religius partai demokrat. Selain itu, kemiripan antara diplomasi presiden SBY dengan pencitraanya terlihat jika

<sup>8</sup> Dalam beberapa konferensi pers, Menti Marty Natalegawa seringkali mengutip Joseph Nye tentang *paradox of plenty*. Lebih lanjut akan diulas pada bab kedua.

membandingkan gaya dan bahasa beliau yang tertuang melalui pidato-pidatonya terindikasi memiliki kesamaan *keywords* tertentu semisal dengan mengucapkan ungkapan keprihatinan, sikap *low profile*, dan non konfrontasi.

Dengan demikian, maka semboyan *million friends zero enemy* selayaknya dipandang sebagai sebuah problem pencitraan. Diplomasi dan pencitraan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kaitanya dengan menjaga reputasi. Dengan demikian, maka terdapat dua konsep dalam menganalisa prakondisi dari munculnya sikap *million friends zero enemy*, yakni pencitraan dan liberalisasi informasi. Dengan kata lain, *million friends zero enemy* merupakan pengejawantahan dari pencitraan. Kemudian, pencitraan adalah sebagai respon atas kondisi liberalisasi informasi. Kedua asumsi tersebut menjadi pijakan bagi bagi penulis yang perlu diuji dalam bab selanjutnya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Melalui latar belakang masalah yang telah dipaparkan, terlihat bagaimana hadirnya semboyan *million friends zero enemy* menghadirkan sebuah anomali. Semboyan *million friends zero enemy* lahir dalam momentum disaat begitu besarnya tuntutan dan tekanan terhadap upaya diplomasi yang kurang asertif. Padahal potensi untuk memaksimalkan kebijakan yang asertif terbuka setelah presiden SBY terpilih kembali untuk periode keduanya dengan suara signifikan. Seharusnya serangkaian kontroversi dijadikan pelajaran oleh presiden SBY untuk meningkatkan kualitas diplomasi agar lebih asertif. Sekalipun arti penting slogan tersebut dipertanyakan, namun dalam realitanya semboyan *million friends zero enemy* tersebut masih saja senantiasa disosialisasikan secara intensif oleh pemerintah dalam merespon isu internasional.

Peneliti perlu meninjau lebih lanjut apa yang memprakondisikan pilihan sikap yang anomali tersebut. Muncul asumsi sementara jika liberalisasi informasi merupakan kondisi struktural dibalik sikap tersebut. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Mengapa Indonesia era presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara intensif mempromosikan semboyan *million friends zero enemy* yang justru memunculkan kesan tidak asertif?, Padahal dalam era sebelumnya tekanan terhadap pemerintah untuk bersikap asertif begitu besar

sehingga tidak jarang terjadi kontroversi. Apakah *million friends zero enemy* merupakan respon pemerintah atas liberalisasi informasi?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Melakukan intepretasi atas serangkaian pernyataan pemerintah untuk memahami perspektif kebijakan luar negeri Indonesia kontemporer.
2. Menganalisis penyebab sikap tidak asertif pemerintah dan berupaya untuk mencari solusi untuk mewujudkan kebijakan luar negeri yang asertif.
3. Memaparkan berbagai permasalahan dan kontroversi yang mengiringi implementasi *million friends zero enemy*.
4. Memberikan alternatif kebijakan luar negeri sebagai bentuk rekomendasi kepada pemerintah Indonesia.

### 1.4. Signifikansi

1. Berimplikasi secara teoritik, sekaligus memberikan kebaruan bagi pemahaman bahwa kasus ekonomi politik yang semula dianggap bidang keilmuan yang terpisah dari kebijakan luar negeri ternyata memiliki korelasi.
2. Selain itu penelitian ini memungkinkan adanya upaya untuk melakukan kolaborasi antar level analisis.

### 1.5. Tinjauan Pustaka

Kiasan *navigating a turbulent ocean* memberikan kata kunci untuk menelaah lebih lanjut filosofi pemerintah Indonesia era presiden SBY. Begitu juga doktrin Natalegawa yang dikenal sebagai *dynamic equilibrium* yang mengisyaratkan inherensi dengan cara pandang *navigating a turbulent ocean*. Dua ungkapan tersebut membawa kita memahami mengenai nilai apa yang dianut pemerintah Indonesia sehingga perlu memunculkan semboyan *million friends zero enemy*. Disimak lebih lanjut, kedua kiasan tersebut menyoroti perkembangan Globalisasi yang turbulen dan dinamis layaknya samudra gelombang yang perlu diantisipasi oleh Indonesia. Namun penulis berbeda pendapat dalam memandang



Globalisasi dan lebih memilih untuk mensubstitusinya dengan konsep Liberalisasi Informasi. Globalisasi merupakan konsepsi yang terlalu luas dan memicu perdebatan ontologis. Sedangkan sebagaimana yang dipaparkan dalam latar belakang, yang terjadi di Indonesia lebih pada Liberalisasi Informasi sebagai manifestasi dari minimalisme kontrol negara atas informasi.

Liberalisasi dan kebijakan luar negeri diasumsikan sebagai dua kajian yang tidak berkorelasi secara langsung. Secara epistemologi, upaya mengkorelasikan neoliberalisme dan kebijakan luar negeri senantiasa terbentur pada persoalan disiplin keilmuan. Neoliberalisme sebagai bagian dari studi ekonomi politik diasumsikan merupakan *cluster* keilmuan yang berbeda dengan *Foreign Policy Analysis*. Salah satu upaya mengkaitkan keduanya dapat ditinjau dalam karya berjudul "*political economy of chinese foreign policy*". Karya ini mencoba menjelaskan adanya kepentingan ekonomi yang menstimulus kebijakan luar negeri Cina untuk pragmatis era Deng Xiao Ping periode 1970-an.<sup>9</sup> Dalam periodisasi tahun tersebut perkembangan organisasi internasional dan regional berkembang secara masif sekaligus kritik atas *self-action theory* yang ditekankan mahzab Realis. Dalam teori hubungan internasional, contoh diatas merupakan refleksi dari perspektif neoliberal institusionalisme. Dengan kata lain, neoliberal institusionalisme meyakini bahwa *friendly policy* diasumsikan merupakan kecenderungan banyak negara kontemporer, bukan merupakan sesuatu yang hanya dialami Indonesia.<sup>10</sup>

Namun jika disimak, sikap *friendly* Indonesia memiliki nuansa yang berbeda dengan kecenderungan global. Semboyan *zero enemy* dipertahankan oleh pemerintah Indonesia sekalipun menyisakan masalah dalam kasus TKI dan kedaulatan. Sedangkan Cina, bersikap liberal sebatas hanya kebijakan ekonomi yang mana diperuntukkan bagi keberlangsungan komunisme didalam negeri. Dalam beberapa isu penting, Cina masih konsisten atas sikap kerasnya terhadap Tibet dan Taiwan. Selain itu, Ronald Reagan sebagai penganut mahzab neoliberalisme dengan doktrin reaganomicnya juga tidak mengubah kebijakan

<sup>9</sup> Cuming Bruce, "Political Economy of Chinese Foreign Policy", *Modern China*, Vol.5, No.4, (Oktober 1979). Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/188840>. Hal. 411-461

<sup>10</sup> Nicholas Onuf, "Institution, Intention, and International Relation", *Review of International Studies*, Vol.28, No.1, (Maret 2002), Hal. 211-22

luar negeri AS yang konfrontatif terhadap timur tengah. Dengan kata lain, sikap pro kerjasama yang dicitrakan kedua contoh negara tersebut hanyalah didasari atas pragmatisme, dan tetap tidak merubah siapa musuh mereka secara politis. Dengan demikian sikap untuk mempertahankan citra *zero enemy* sekalipun harus menghadapi problem kedaulatan dan TKI adalah sebuah anomali.

Dalam studi hubungan internasional, tipologi mengenai kebijakan *million friends zero enemy* dapat dilacak dalam *great debate* ketiga. Tepatnya setelah mahzab neoliberal mengkritik realisme bahwa sikap *self action* tidak lagi relevan dalam dunia yang dinamis. Joseph Nye menekankan bahwa dunia sedang memasuki fase turbulensi dari polaritas. Oleh karena itu, sikap kerjasama perlu untuk disebar ke segala penjuru karena anatomi struktur internasional semakin terdesentralisasi. Dalam struktur internasional yang bersifat turbulen, maka identitas negara perlu untuk senantiasa adaptif. Dengan demikian maka *navigating a turbulent ocean* menjadi salah satu *idea of polarity* pemerintah Indonesia dalam mengangankan dunia yang semakin *interdependence* tersebut.<sup>11</sup>

Terkait dengan keunikan kasus Indonesia, maka Neoliberal institusionalisme kemudian dihadapkan pada dikotomi antara agendan struktur. Sehingga perlu dibedakan terlebih dahulu antara neoliberalisme sebagai praktik agen atau neoliberalisme sebagai struktur.<sup>12</sup> Neoliberal institusionalisme berfungsi sebagai pisau untuk menganalisis pergeseran pendulum kebijakan luar negeri yang semula eksklusif, menjadi multilateralis, internasionalis, pragmatis demi kepentingan ekonomi yang merupakan manifestasi problem struktural.<sup>13</sup> Namun Cristian Arnspurger memaparkan bahwa struktur neoliberalisme sesungguhnya tidak bersifat *constraining*, namun *enabling*. Pemahaman tersebut mencoba melihat kolaborasi antara logika eksternal sistem dan Internal agen. Neoliberalisme institusionalisme memandang negara merupakan subyek/agen yang tidak otonom dalam dunia yang turbulen.

Namun peneliti memandang tidak perlu terjebak dalam dikotomi antara neoliberalisme tataran struktural dan tataran agen tersebut. Kedua dikotomi

<sup>11</sup> Joseph Nye, Jr., *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, (New York: Public Affairs, 2004). Public Diplomacy in the 21st century :106.

<sup>12</sup> Frederick Hayek, *The Road of Serfdom* (Cambridge: Polity Press., 2008), hal. 90-94

<sup>13</sup> P, Viotti, dan Mark V. Kauppi, *Intenational Relation Theory 4th Edition*. (New York: Pearson Education, 2010) hal.67-89

tersebut kurang relevan dalam menjelaskan Indonesia dimana semboyan *zero enemy* bukan sekedar pragmatisme, melainkan filosofi yang dianut pemerintah. Memakai distingsi Giddens, yang dibutuhkan adalah *third way*, dualitas teoritis dan praktis yang disebut praksis.<sup>14</sup> Yang hendak diproblematikasi oleh tulisan ini adalah neoliberalisme selain merupakan sistematisasi *ide*, neoliberalisme jugadapat dianalisis sebagai struktur/praktik. Metode praksis memungkinkan peneliti untuk mendesain sebuah perspektif baik sebagai falsifikasi, maupun verifikasi terhadap pemikiran neoliberalisme. Neoliberalisme selain merupakan *agency*, sekaligus juga merupakan ruh dari dialektika material ekonomi yang bergerak dalam pola-pola yang progresif. Teori neoliberalisme tersebut tidak dikonsumsi secara *taken for granted*, melainkan perlu dimodifikasi mengikuti transformasi pola-pola struktural tersebut. Dengan demikian, maka neoliberalisme perlu dipandang sebagai ide yang tidak kaku, seperti ideologi, namun ide yang lentur dan bergerak dengan pola dinamis yang mengikuti dialektika struktural.

Upaya untuk mengelaborasi praksis yang pas akhirnya memunculkan pencitraan sebagai obyek kajian neoliberalisme dan kebijakan luar negeri. Trayektori teori mengenai pencitraan (*branding*) dapat ilmu Hubungan Internasional dilacak dalam level analisis media dan informasi yang menjadi pintu masuk untuk mengungkap pencitraan dibalik tataran input kebijakan luar negeri.<sup>15</sup> Terdapat beraneka pilihan level analisis untuk menelusuri input pengambilan kebijakan luar negeri. Singer menekankan ada lima level analisis *foreign Policy*: yaitu ideosinkretik, sistem internasional, media, dan sistem politik domestik.<sup>16</sup> Dalam era globalisasi informasi, maka analisis informasi menjadi level analisis yang tidak lagi dapat dikesampingkan sebagaimana yang pernah terjadi pada kasus perang teluk pertama yang dikenal sebagai *CNN effect*.<sup>17</sup> Implikasinya, perlu adanya kolaborasi level analisis untuk menelaah pencitraan selain informasi, yakni ideosinkretik dan politik domestik

<sup>14</sup> Anthony Giddens, *The Constitution of Society* (Cambridge: Polity press, 1984)

<sup>15</sup> James Rey. "Integrating Level Analysis in World politics". *Journal of Theoretical Politics*, Vol.12. No.3, (2001), hal. 355-388.

<sup>16</sup> David Singer, "The Level of Analisis Problem in International Relation", *World Politics*, Vol.14 No.1. (Maret 1961), hal. 77-82.

<sup>17</sup> Stuart Soroka, *Media and Foreign Policy*, *Press Politics*, Vol. 8, No.1, (Maret 1993), hal. 27-48.



Semboyandipandang lebih dari sekedar praktik diplomasi, tapi sebagai sebuah praksis dimana didalamnya pemerintah menganut suatu paradigma tertentu yang dikondisikan oleh struktur tertentu. Kolaborasi antara perspektif Neoliberal dengan level analisis teknologi informasi dalam kebijakan luar negeritermaktub dalam karya *paradox of plenty* Joseph Nye dalam bukunya *soft power*. Joseph Nye menunjukkan jika perkembangan informasi menekankan arti penting menjaga reputasi. Dengan demikian, maka perlu adanya dua preposisi yang dapat menjawab rumusan masalah. Pertama keterkaitan kebijakan luar negeri dan Pencitraan dan kedua keterkaitan pencitraan dan Liberalisasi Infromasi. Kedua prepoisisi tersebut akan diulas lebih lanjut pada subab selanjutnya.

Berikut ini adalah tabel (1.1) yang akan mempermudah dalam meninjau sistematisasi tinjauan pustaka sebagaimana yang diuraikan diatas:

**Tabel 1.1. Tinjauan Pustaka**

Literatur	Kata Kunci
Joseph Nye, Jr., <i>Soft Power: The Means to Success in World Politics</i> , (New York: Public Affairs, 2004). <i>Public Diplomacy in the 21st century</i> :106.	Perkembangan informasi menyebabkan <i>paradox of plenty</i> , sehingga pemerintah perlu menjaga reputasi
David Harvey, <i>Is This Really the End of Neoliberalism?</i> . 15 Maret 2011.	Neoliberalisme memerlukan Informasi untuk mereproduksi ruang
Nicholas Onuf, <i>Institution, Intention, and International Relation</i> , <i>Review of International Studies</i> , Vol.28, No.1, (Maret 2002), hal. 211-22.	<i>Friendly state</i> merupakan kecenderungan yang dilakukan negara dalam era kontemporer
Cuming Bruce, "Political economy of Chinese foreign policy", <i>Modern China</i> , Vol.5, No.4, (Oktober 1979). < <a href="http://www.jstor.org/stable/188840">http://www.jstor.org/stable/188840</a> >.hal.411-461	Kepentingan Ekonomi menstimulus kebijakan luar negeri untuk mementingkan kerjasama
Paul Viotti, dan Mark V. Kauppi, <i>Intenational Relation Theory 4th Edition</i> . (New York: Pearson Education, 2010), hal.67-89.	Pemikiran Neoliberal institusional menekankan pentingnya sikap kooperasi ketimbang kompetisi
James L, Rey, Integrating Level Analysis in World politcs, <i>Journal of Theoretical Politics</i> , Vol.12. No.3, 2001, Hal. 355-388.	Dalam era informasi, level analisis media dan informasi perlu dikedepankan
David Singer, The Level of Analisis Problem in International Relation, <i>World Politics</i> , Vol.14 No.1. Maret 1961, Hal. 77-82.	Perlu adanya kolaborasi antar level analisis

## 1.6.Kerangka Teori

### 1.6.1 Kebijakan Luar Negeri sebagai Bagian dari Pencitraan

Pencitraan diajukan menjadi salah satu konsep dalam kerangka teoritik atas dasar pernyataan pemerintah mengenai perlunya sikap bersahabat untuk memperbaiki citra Indonesia di mata Internasional. Pencitraan selama ini belum sepenuhnya menemukan eksplanasi ilmiah yang pakem dalam kebijakan luar negeri. Dengan demikian maka perlu untuk menginstall konsepsi pencitraan tersebut kedalam logika kebijakan luar negeri yang memiliki beberapa definisi. James Rosenau menjelaskan bahwa *foreign policy* adalah tindakan negara ataupun keinginan negara untuk melakukan tindakan demi menjaga atau menghilangkan aspek-aspek tertentu dalam lingkup internasional.<sup>18</sup> Sedangkan Lousie Neack menganggap bahwa kebijakan luar negeri adalah keinginan, pernyataan dan tindakan dari aktor internasional yang ditujukan kepada aktor lainnya.<sup>19</sup> Lebih lanjut, Valerie Hudson mengatakan bahwa kebijakan luar negeri adalah tindakan-tindakan yang dihasilkan dari keputusan-keputusan politis di tingkat individu maupun kelompok demi berinteraksi dengan aktor lainnya. Hudson juga menambahkan bahwa kebijakan luar negeri tidak sama dengan diplomasi. Kebijakan luar negeri menyediakan tataran ide, sedangkan diplomasi pada tataran implementasi.<sup>20</sup> Kesimpulannya, kebijakan luar negeri bisa diartikan sebagai tindakan ataupun pertimbangan yang diambil pemerintahan suatu negara dengan tujuan-tujuan tertentu dalam hubungannya dengan pemerintahan negara lain ataupun dengan entitas lain diluar batas teritorialnya.

Rangkaian definisi diatas mencoba untuk mere-intrepretasi pandangan bahwa kebijakan luar negeri dapat disamakan sebagaimana kebijakan publik lainnya. Kebijakan luar negeri tidak selalu diasosiasikan dengan adanya aksi kongkrit sebagaimana renstra, traktat, ataupun dokumen. Bahkan Rosenau, dan Hudson menekankan bahwa *ignorance* (pengabaian) sekalipun, juga merupakan

<sup>18</sup> James N. Rosenau, *Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods*, (New York: Sage Publications, 1974), hal. 78

<sup>19</sup> Lousie Neack, *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era*. 2nd ed, (Plymouth : Rowman and Littlefield Publishers, Inc, 2008)

<sup>20</sup> Valerie Hudson, *Foreign Policy Analysis : Classic and Contemporary Theory*, (Plymouth : Rowman and Littlefield Publishers Inc, 2007), hal. 67

kebijakan luar negeri.<sup>21</sup> Oleh karena itulah kebijakan luar negeri sesungguhnya memilikidomain yang luas dan terdapat beberapa gradasi dalam kebijakan luar negeri. Dengan begitu maka *million friends zero enemy* sebagai pencitraan dapat masuk dalam domain kebijakan luar negeri. Terlebih lagi tidak ada perbedaan fundamental antara definisi diplomasi dengan kebijakan luar negeri. Slogan bukan lagi hiasan bagi kebijakan luar negeri, melainkan telah menjelma sebagai sebuah kebutuhan politis, terutama dalam kaitannya dengan reputasi pemerintah. Salah satu literatur menarik mencoba melihat pencitraan (*political brand*) Tony Blair yang sedikit banyak berkaitan dengan arah kebijakan luar negeri Inggris di era pemerintahannya.<sup>22</sup>

Luasnya ruang lingkup kebijakan luar negeri inheren dengan definisi kebijakan luar negeri versi Indonesia. Dalam Undang Undang nomor 37 tahun 1999 dijelaskan bahwa definisi hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Sedangkan politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.<sup>23</sup> Dengan demikian, maka setiap pernyataan termasuk *statement* responsif, pidato, konferensi dan pertemuan merupakan domain dari aktivitas kebijakan luar negeri.

. Berbicara mengenai hambatan sikap asertif pemerintah, tentunya terdapat berbagai variabel. Tanpa bermaksud untuk mendistorsi kompleksitas variabel, salah satu dari variabel tersebut adalah pencitraan. Alasan peneliti memandang perlunya analisis pencitraan adalah karena diplomasi pemerintahan presiden SBY menunjukkan adanya beban pencitraan. Diasumsikan membebani, karena

<sup>21</sup> Todorov dan Mandizods. "Public Opinion on Foreign Policy, The Multilateral Public That Perceive itself as Multilateral", *Public Opinion Quarterly*, Vol. 68, No.3, (September 2007), hal. 323-348.

<sup>22</sup> Margareth Scammel. "Political Brands and Consumer Citizens: The Rebranding of Tony Blair". *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 611, (May, 2007), Sage. Hal. 176-192.

<sup>23</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.



pencitraan tersebut lebih didasarkan pada reputasi personal, dan tidak diandasi pakem ideologi atau tradisi. Implikasinya, basis massa yang menjadi fondasi politik pemerintah adalah massa yang tidak tetap karena kesetiaannya bukan pada ideologi/tradisi. Oleh karena itu, ketika terjadi kontroversi yang mengancam reputasi pemerintah, maka efek negatifnya jauh lebih besar ketimbang politik yang berpijak pada aspek ideologis.

Kembali pada definisi mengenai pencitraan yang oleh penulis dianggap membebani dalam derajat tertentu. Selama ini pencitraan acapkali difahami sebagai sebuah otonomi dari “subyek”. Padahal pencitraan pada perkembangan selanjutnya menjadi beban bagi subyek, sehingga subyek tidak sepenuhnya bersifat otonom. Untuk itu, peneliti lebih memilih untuk menggunakan kata beban, dan bukan belenggu, untuk menunjukkan bahwa pencitraan bukanlah sebuah prinsip yang kaku. Pencitraan bergerak dalam suatu logika adaptif (*adaptive model*) yang senantiasa berkompromi dengan tuntutan publik.<sup>24</sup> Pencitraan diimplementasikan dengan hati-hati sebagai bentuk *interplay* antara publik, media ditambah struktur pengawasan (*surveillance*). Namun bukan berarti pencitraan selalu memenuhi tuntutan publik karena pencitraan juga memiliki kepentingan politis tersendiri.

Pencitraan dapat menjadi beban kebijakan asertif ketika presiden yang terpilih lebih mengedepankan citra personal ketimbang ideologis. Sebuah kebijakan lahir sebagai hasil sebuah proses molekuler antara menjaga reputasi dan dan turbulensi isu. Turbulensi isu merupakan manifestasi dari implikasi neoliberalisme yang merubah konsepsi tentang ruang. *Space* yang semakin lentur karena *time space compressed* memungkinkan akselerasi isu untuk bergerak dengan sangat cepat. Kembali pada ungkapan Paul Virillo, bahwa dalam era yang sangat cepat, maka yang dibutuhkan oleh para politisi adalah beradu cepat dengan kecepatan tersebut.<sup>25</sup> Citra yang terlanjur melekat menjadi beban ketika suatu isu menuntut praktik diplomasi yang berbeda dengan pencitraannya. Sehingga permasalahan tidak sepenuhnya bisa diatasi, dan akan senantiasa bereproduksi.

<sup>24</sup> James N Rosenau, & J.P Singh, eds, *Informational Technology and Global Politics*. (New York: State University, 2002), Hal. 95-142.

<sup>25</sup> Paul Virillo, *Lost Dimension*, (New York: Semiotext, 1991)

Perlu dibedakan antara pencitraan sebagai bagian dalam kebijakan luar negeri, atau kebijakan luar negeri sebagai bagian dari pencitraan. Pencitraan yang dilakukan presiden SBY adalah lebih pada definisi yang kedua, ketika kebijakan luar negeri merupakan bagian dari pencitraan.. Sehingga wajar jika kebijakan yang tendensius atau berpretensi menciptakan terobosan justru rentan kontroversi. Darisinitilah ideologi yang memiliki keberpihakan mulai dihindari dalam implementasi kebijakan luar negeri era informasi, terlebih dalam negara yang multikultural. Pencitraan berdasarkan pada skema diatas mengedepankan citra personal dan meninggalkan citra ideologis. Citra personal meredefinisikan ideosinkretik yang menurut Richard Rosecrance bukanlah gagasan original dari aparat pengambil kebijakan, melainkan juga memperoleh efek adanya proses molekuler antara struktur internasional dan politik domestik.<sup>26</sup> Jika dikaitkan dengan gambar 1.1. maka akan ditunjukkan bagaimana teknologi informasi yang tidak terkontrol oleh negara dan tubulen di Indonesia mendorong citra personal sebagai satu satunya unsur pencitraan.

Pencitraan memiliki pengertian yang berbeda dengan diplomasi publik. Jan Mellisen mendefinisikan diplomasi publik sebagai usaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara.<sup>27</sup> Sedangkan Pencitraan lebih kepada *marketing communications*, yakni proses sosialisasi yang membantu dalam mengidentifikasi, menstimulasi, atau memuaskan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Konsepsi pelanggan berbeda dengan konsepsi tentang publik. Publik berfungsi dengan menidentifikasi dirinya sendiri dan bukan diidentifikasi oleh *others*. Model diplomasi publik yang baik adalah bukan propaganda atau advokasi yang berbasis pasar, melainkan sesuatu yang didasarkan komunikasi simetris yang sifatnya komunikasi dua arah dan *community building*.<sup>28</sup> Dalam konsepsi diplomasi publik, maka publik dilibatkan sebagai produsen. Dengan demikian, upaya untuk mengubungkan neoliberal dan

<sup>26</sup> Richard Rosecrance, "The Rise of Virtual State", *Foreign Affairs*, Vol.5, (1996), hal. 46-61.

<sup>27</sup> Jan Melissen, *Public Diplomacy Between Theory and Practice*, J. Noya (ed). *The Present and Future of Public Diplomacy: A European Perspective*. (California: Rand Corporation, 2006): 43

<sup>28</sup> Kruckeberg, & Vujnovic, "Public Relations, Not Propaganda, For US Public Diplomacy in a Post-9/11 World: Challenges and Opportunitie," *Journal of Communication Management*, Vol. 9, No.4, (2005), hal. 296-308, dalam <http://proquest.umi.com/> diakses 22 Januari 2012.

kebijakan luar negeri dimungkinkan setelah menyimak eksistensi logika *marketing communication* dalam kebijakan luar negeri

Dengan demikian, maka definisi dari pencitraan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Setiap upaya yang dilakukan aparat kebijakan luar negeri untuk menciptakan image tertentu kaitanya dengan hubungan luar negeri yang mana ditujukan untuk menjaga reputasi diri. Dimana *image* (citra) yang terbentuk bukanlah semata kehendak pengambil kebijakan, namun terindikasi mendapat pengaruh dari logikaeksternal, yakni perkembangan informasi. Oleh karena itulah, penekanan pada pencitraan ini bukan hanya pada implementasinya, namun juga prakondisinya. Indikasi pencitraan dapat diuji melalui seberapa intensif suatu slogan dimainkan dalam forum internasional, dan sejauh mana dilaksanakan, serta derajat kesesuaian antara pencitraan keluar negeri dengan pencitraan dalam negeri. Disimak lebih lanjut terdapat manifestasi neoliberalisme melalui spirit semboyan *million friends zero enemy*. Relasi antara *semboyan* dengan mahzab Neoliberalisme salah satunya karena terdapat kesesuaian nilai yang dianut dari slogan *Million friends zero enemy* dengan nilai neoliberal institusionalisme yang menekankan pentingnya sikap *friendly* dan kerjasama dalam dunia yang turbulen.

#### **1.6.2 Pencitraan sebagai Respon terhadap Liberalisasi Informasi**

Tantangan samudra bergejolak yang dihadapi kebijakan luar negeri Indonesia sebagaimana yang dikisahkan presiden SBY perlu dipandang sebagai problem ekonomi politik. Analisa ekonomi politik dapat menjelaskan mengapa diskursus atau isu yang mengelilingi kebijakan luar negeri begitu turbulen, muncul dan hilang dalam tempo yang cepat dan sukar diprediksi. Sehingga alasan peneliti memilih konsep liberalisasi informasi ketimbang globalisasi adalah untuk mendeskripsikan adanya problem ekonomi politik. Liberalisasi Informasi dimunculkan sebagai interpretasi penulis atas *paradox of plenty* yang intensif dipakai oleh Menteri Marty Natalegawa. Perkembangan informasi bukan semata konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman sebagaimana yang diyakini Joseph Nye. Namun perkembangan informasi merupakan konsekuensi ketika informasi bertemu dengan kapital.

Disinilah perlunya memperluas definisi Neoliberalisme tidak hanya sebagai sebuah pemikiran ekonomi politik, namun juga neoliberalisme sebagai sebuah struktur ekonomi politik sebagaimana dikemukakan Harvey dalam *the brief history of neoliberalism*.<sup>29</sup> Informasi mengubah pasar bukan lagi sebagai arena (obyek), tetapi pasar adalah aktor (subyek) yang bergerak dengan logikanya sendiri. Ketika informasi menjadi komoditas, maka menandai lahirnya kapitalisme post industrial sebagaimana yang disebut Daniel Bell untuk menjelaskan bahwa liberalisme informasi memungkinkan kondisi *time space compressed* (pemadatan ruang waktu) dimana sebuah isu atau diskursus bergerak secara turbulen dan tidak bisa dikontrol.<sup>30</sup>

Teori yang baru saja dipaparkan diatas tersebut memberikan ruang untuk menjawab latar belakang pencitraan. Jean Baudrillard mengemukakan bahwa pencitraan berkaitan dengan kapitalisme informasi. Era informasi mendorong pergeseran logika kapitalisme dari eksploitasi dalam logika produksi menuju ke eksploitasi kedalam logika konsumsi. Implikasinya, kapitalisme yang diramalkan Karl Marx akan runtuh, justru semakin kuat karena eksploitasi kapitalisme berlangsung secara *soft*, dan *intangible* dimana salah satunya melalui pencitraan. Kesesuaian diperoleh ketika mengkombinasikan konsep neoliberalisme David Harvey dengan hiperrealitas Jean Baudrillard. Kombinasi kedua teori tersebut perlu karena Harvey mengemukakan dampak liberalisasi informasi, namun masih belum menyentuh masalah pencitraan. Sebaliknya, Baudrillard menjelaskan detail dari pencitraan, namun tidak memperlihatkan adanya efek neoliberalisme.<sup>31</sup> Pencitraan muncul sebagai respon atas kondisi liberalisasi Informasi, ketika informasi menjadi komoditas. Bukan negara yang mengontrol informasi, namun informasi yang mengontrol negara.

Tanpa adanya kontrol negara dalam informasi, maka yang terjadi adalah turbulensi citra dan realitas atau yang disebut Baudrillard sebagai hiperealitas. Hiperrealitas adalah suguhan realitas yang lebih nyata dari aslinya, dan berputar dengan turbulen. Publik hanya mendapatkan *snapshot* permukaan dari imansi

<sup>29</sup> David Harvey, *The Brief History of Neoliberalism*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), Hal. 7-23.

<sup>30</sup> Daniel Bell, *The Cultural Contradiction of Late Capitalism*, (London: Basic Books, 1991).

<sup>31</sup> Jean Baudrillard, *Simulacra and Simulation*, (Cambridge: Polity press, 2005).

realitas politik. Implikasinya dalam politik adalah terjadi kemenangan *style* atas prinsip, retorika atas argumentasi, dan citra atas substansi.<sup>32</sup> Melalui simulakra, permainan tanda melalui iklan dan propaganda menciptakan sensasi yang artifisial pada sosok figur tertentu dan akhirnya meninggalkan ideologi. Hiperrealitas menjadi kata kunci untuk menunjukkan interelasinya dengan pemikiran Joseph Nye tentang *paradox of plenty* dimana reputasi menjadi penting dalam pencitraan. Singkat kata, kemunculan hiperrealitas merupakan konsekuensi dari neoliberalisasi Informasi, yakni ketika negara tidak lagi bisa mengontrol informasi. Berikut ini merupakan uraian Nye akan perkembangan Informasi.<sup>33</sup>

*Technological advances have led to a dramatic reduction in the cost of processing and transmitting information. The result is an explosion of information, one that has produced a "paradox of plenty". Plenty of information leads to scarcity -of attention. When people are overwhelmed with the volume of information confronting them, they have difficulty discerning what to focus on. Attention rather than information becomes the scarce resource, and those who can distinguish valuable information from background clutter gain power.*<sup>34</sup>

Lebih lanjut, ungkapan Joseph Nye dapat disimak sebagai berikut:

*"Reputation has always mattered in world politics. But the role of credibility becomes an even more important power resource because of the "paradox of plenty."*<sup>35</sup>

Namun penelitian ini memandang dengan perspektif yang sedikit berbeda dengan asumsi Nye tersebut. Dengan kata lain, *paradox of plenty* tidaklah muncul secara langsung sebagai konsekuensi atas perkembangan Informasi. Contoh Cina justru menunjukkan sebaliknya, dimana sektor IT yang maju, namun tidak mengalami *paradox of plenty*. Dengan kata lain, *paradox of plenty* hadir seiring dengan perubahan tatanan struktur informasi sebagai dampak minimalisme kontrol negara atas informasi. Implikasinya pencitraan negara dalam era *paradox of plenty* tidak bisa lagi secara *top down*. Dalam derajat tertentu pencitraan lebih bertipikal *bottom up*. Citra personal protagonis akhirnya menjadi jalan keluar

<sup>32</sup> David Harvey, *The Brief History of Neoliberalism*, (Oxford, Blackwell, 2005). Hal 78

<sup>33</sup> Baudrillard. *Op cit*. Hal. 98-99.

<sup>34</sup> Nye, J.S. Jr. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. (New York: Public Affairs. Public Diplomacy in the 21st century, 2004). hal.106.

<sup>35</sup> Nye, 2004. *Ibid*. Hal.107



instan dalam kondisidimana terjadi turbulensi tanda terjadiyang sukar diprediksi.<sup>36</sup>Dengan demikian, uraian diatas menunjukkan jika pencitraan hadir sebagai konsekuensi atas Liberalisasi Informasi.

Sesungguhnya pencitraan sebagai sebuah praktik sosial telah dilakukan sejak dulu. Maka dari itu, kita perlu membedakan secara jelas pencitraan sebagai konsekuensi liberalisasi, dan yang bukan. Singkatnya, kita perlu meneliti antara apakah kekuasaan yang menentukan pencitraan atau pencitraan yang menentukan kekuasaan. Jika dimaknai dalam pengertian pertama, bahwa kekuasaan yang menentukan pencitraan, maka subyek politik memiliki keleluasaan dalam membingkai konsepsi citra yang dikehendaki sebagaimana yang dipraktikkan oleh raja zaman dahulu yang mengatasnamakan dewa atau tuhan.Namun dalam pengertian pencitraan yang kedua, makainheren dengan apa yang Jean Baudrillard sebut dalam “*Simulacra and Simulation*” sebagai politik tanpa subyek.<sup>37</sup>Oleh karena itulah, pencitraan yang dilakukan presiden SBYlebih pada suatu praktik yang dideterminasi oleh diri-umum.<sup>38</sup>Pencitraan menurut Baudrillard adalah suatu strategi penyamaran tanda, sebuah proses penjungkirbalikan tanda yang menciptakan kekacauan, turbulensi, dan indeterminasi dalam dunia representasi dan pertandaan. Oleh karena itulah, dalam pencitraan tidak perlu mencari karakter original dari sang aktor politik, karena jatidiri asli aktor telah melebur kedalam citranya.

Dengan begitu maka menjadi perlu untuk menelaah apa sesungguhnya yang baru dalam pencitraan dalam era liberalisasi infromasi. Hal tersebut dapat ditinjau dengan melekukan komparasi pencitraan era SBY dengan pencitraan era sebelum Liberalisasi informasi. Sehingga dapat diketahui mana pencitraan yang diasumsikan merupakan hasil pengaruh neoliberalisme dan yang bukan. Perlunya perbandingan tersebut karena pencitraan bukanlah fenomena yang baru terjadi di

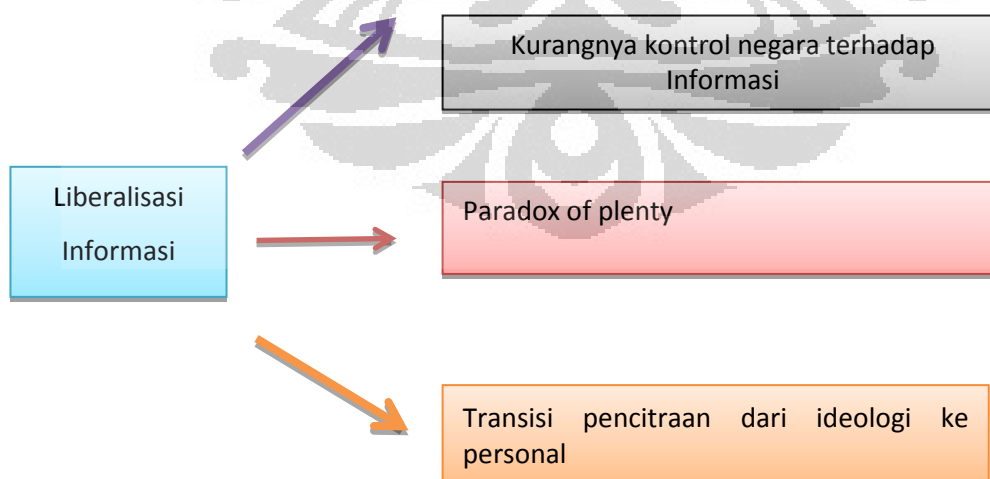
<sup>36</sup> Fernando Coronol, Toward a Critique of Globalcentrism: Speculations on Capitalism’s Nature. dalam Jean Comaroff, ed, *Millenial Capitalism and Culture of Neoliberalisme*. (London: Duke University Press, 2001), hal. 63-84.

<sup>37</sup> Jean Baudrillard mendefinisikan” politik tanpa subyek” sebagai ranah politik yang dikuasai oleh media citraan, sehingga citra jauh lebih kuat ketimbang figur aslinya. Dalam Baudrillard, J, *Simulacra and Simulation*. (Cambridge: Polity press, 1977), hal.56-78.

<sup>38</sup> Konsep “Diri umum “menjelaskan bahwa karakter aktor politik seringkali merangkap aktor yang populis. Lebih lanjut pada Karen Liftin, *Public Eyes: Satelite Imegery, The Globalization Transparency, and New Network of Surveillance*. Dalam James. N Rosenau, & J.P Singh, *Informational Technology and Global Politics*, (New York: State University, 2002), hal. 65-90.

Indonesia dan telah menjadi praktik sebelum era pemerintahan SBY. Oleh karena itulah dengan metode perbandingan, maka akan terlihat kebaruan dalam pencitraan sebagai konsekuensi liberalisme informasi.

Secara teoritik terdapat perbedaan dimana Pencitraan yang dilakukan pada era pre-liberalisasi informasi, sebagai contoh pada era Suharto ataupun Soekarno, lebih dilakukan secara *top down* dan tidak memiliki relasi dengan koridor pemasaran (*marketing*) dan *branding*. Sukarno dan Suharto mengedepankan sebuah citra ideologis dimana Sukarno anti liberalis, dan Suharto anti komunis. Turbulensi isu tidak menyeruak karena informasi pada masa tersebut masih berada dalam kontrol negara. Sedangkan pencitraan pada era Liberalisasi Informasi dilakukan sebagai respon atas turbulensi informasi (*bottom-up*). Turbulensi inilah yang menjadi manifestasi neoliberalisme, dimana akselerasi isu mengikuti akselerasi selera pasar sebagai akibat dari negara absen mengelola informasi. Aspek lain yang tidak boleh dipisahkan adalah terdistorsinya ideologi dalam pencitraan era liberalisasi informasi. Oleh karena itulah, pencitraan pada era Sukarno dan Suharto lebih menitikberatkan pada aspek ideologis, sedangkan pada masa SBY lebih pada citra personal. Dengan demikian maka terdapat perbedaan krusial dalam pencitraan baik secara kualitas dan kuantitas jika kita melakukan komparasi merode pencitraan dalam era pre-liberalisasi informasi dan pasca liberalisasi informasi.



**Gambar 1.1. Skema Liberalisasi Informasi dan Pencitraan**

Ulasan diatas berimplikasi pada diskursus kontemporer dalam ekonomi politik internasional yang tengah disibukkan oleh perdebatan antara apakah benar neoliberalisme telah mengalami kemunduran. Joseph Stiglitz mengasumsikan neoliberalisme tengah mengalami *freefall* pasca krisis 2008.<sup>39</sup> Namun terdapat pendapat lain dari David Harvey dalam artikelnya *is this really the end of neoliberalism?* yang mengajak untuk berfikir ulang mengenai definisi neoliberalisme yang sejatinya adalah dominasi pasar, dengan atau tanpa intervensi negara. Dengan kata lain, besarnya intervensi negara sebagai contoh Cina sekalipun adalah manifestasi neoliberalisme.<sup>40</sup> Diasumsikan demikian, karena intervensi Cina tidak lain adalah kebutuhan untuk adaptasi sistem neoliberalisme. Neoliberalisme melakukan ekspansi pasar melalui *reproduction of space* dimana logika territorial (intervensi negara) dalam momen tertentu berselingkuh dengan logika akumulasi kapital melalui *spatio temporal fix*.<sup>41</sup>

Uraian mengenai praksis dalam neoliberalisme mendorong rasa ingin tahu untuk mengungkap kebaruan pola dan jejak neoliberalisme. Analisa tentang *reproduction of space* tersebut membuka ruang untuk memahami lebih mendalam rekam jejak intimasi antara neoliberalisme dan teknologi informasi. Ekonomi dipandang dalam pengertian yang lebih luas, yakni aktivitas pertukaran secara tidak langsung atau yang dikenal sebagai marketing.<sup>42</sup> Logika marketing menunjukkan bahwa aktivitas Ekonomi bukan hanya transaksi atas produk material, tapi juga persepsi, dan citra menjadi bagian penting bagi ekonomi. Maka dari itulah, image diasumsikan menjadi salah satu produk yang ditransaksikan dalam kondisi *spatio temporal fix*. *Million friends zero enemy* merupakan kebijakan luar negeri sebahai hasil kontradiksi dari logika ekonomi melalui mekanisme pasar pencitraan.

Neoliberalisme berjasa dalam merubah arsitektur ruang publik di Indonesia yang kemudian diasiasi pemerintah dengan pencitraan. Teknologi Informasi yang dimaksud penelitian ini sebagaimana yang dijelaskan Harvey

<sup>39</sup> Joseph Stiglitz. *Freefall: America, Free Market and the Sinking of Global Economy* (New York: Norton press, 2009).

<sup>40</sup> David Harvey, "Is This Really the End of Neoliberalism?" 15 Maret 2010. Hal 5, diakses dari <http://tomweston.net/EndNeoLib.pdf>, pada 1 Februari 2011.

<sup>41</sup> Henry Levebre. *The Survival of Capitalism: Reproduction of the relation of production* (New York: St Martin Press, 1976). Hal 55.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal.3

merupakan teknologi pemadatan waktu dan ruang seperti *cyber*, virtual dan telematika yang berimplikasi pada perubahan pengaruh ruang publik atas politik. Oleh karena itulah, tidak semua jenis Teknologi Informasi dapat memprakondisikan pencitraan. Terlebih lagi departemen komunikasi dan informasi mendefinisikan sangat luas dimana Teknologi informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi<sup>43</sup>

Dengan demikian maka dapat diambil operasionalisadefinisi dari liberalisme informasi berdasarkan tinjauan teori diatas. Liberalisasi informasi adalah manifestasi prinsip neoliberalmengenai privatisasi terhadap sektor informasi dengan minimalnya kontrol negara terhadap sektor informasi. Liberalisasi informasi memungkinkan isu untuk bergerak begitu cepat dan sukar diprediksi.Implikasinya dalam kondisi sebagaimana yang dikiaskan melalui *turbulence ocean*, maka citraan *million friends zero enemy* merupakan respon untuk mengatasi kondisi ini.

### 1.6.3 Konseptualisasi Teoritik

Terdapat dua preposisi yang muncul sebagai hasil ekstraksi pembahasan dua subbab teoritik sebelumnya. Kedua preposisidapat difungsikan untuk menjawab rumusan masalahuntuk mencari alasan dan motivasi, mengapa pemerintah presiden SBY memunculkan semboyan *million friendzero enemy* yang terkesan kurang asertif tersebut ditengah banyaknya tuntutan untuk melaksanakan diplomasi yang lebih tegas. Pertama, semboyan*million friends zero enemy* merupakan sebuah upaya pencitraan yang diperlukan dalam dunia *dinamics equiliibrium*. Namun dalam implementasinya dalam derajat tertentu terbebani oleh pencitraan yang berpijak pada figur personal.Terlebih lagi pencitraan presiden hadir tanpa dilandasi oleh kepakeman nilai dan ideologi sehingga kekuasaan pemerintah hanya ditopang oleh fondasi politik massa yang tidak tetap. Sebah citra yang berpotensi mengalami degradasi ketika terjadi kontroversi. Sehingga

<sup>43</sup> Roland Deibert, *Circuits of Power: Security in the Internet environment*. dalam Rosenau, J N, & Singh, J.P eds. *Informational Technology and Global Politics*. (New York: State University, 2002) hal. 95-142.

pencitraan personal tersebut perlu dipertahankan sekalipun menjadi beban dalam menghadapi isu luar negeri yang turbulen.

Sedangkan preposisi kedua menyatakan bahwa pencitraan sebagai resistensi dalam liberalisasi Informasi. Liberalisasi informasi yang pada dasarnya memilikipotensi untuk menekan pemerintah namun menjadi tidak berfungsi maksimal dimana sebuah isu muncul dan hilang sendirinya. Turbulensi tersebut terjadi sebagai konsekuensi ketika informasi menjadi komoditas sehingga tidak ada kontrol politik atas informasi, namun sebaliknya, kontrol informasi atas politik. Kedua preposisi sekaligus merupakan terjemahanpeneliti atas ungkapan *navigating a turbulece ocean* sekaligus *dinamics equillibrium* yang menjadi pijakan berpikir pemerintah. Kedua preposisi tersebut menjadi dasar terciptanya Bab 2 dan Bab 3 guna diuji secara empiris.

Kedua preposisi tersebut merupakan bunga rampai asumsi dalam satu paket yang perlu diuji. Lebih lanjut, perlu sebuah proses abstraksi sekaligus konseptualisasi guna menunjukkan adanya korelasi antar keduanya. Subbab ini tidak lain disusun sebagai kolaborasi antar kesimpulan dua subbab sebelumnya. Selanjutnya akan ditunjukkan adanya implikasi teoritik sebagai hasil dari konseptualisasi tersebut. Kemudian pada bab menjelang kesimpulan akan diuraikan tentang kemungkinan adanya alternatif terhadap slogan *million friend zero enemy* dan strategi lanjutan atas kondisi Liberalisasi Informasi. Berikut ini merupakan sistematika penelitian bab selanjutnya sebagai hasil ekstraksi kerangka teoritik sebelumnya.

**Tabel 1.2. Ekstraksi Kerangka Teoritik**

BAB 2	BAB 3
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menganalisis adanya paradigma neoliberal yang menjadi keyakinan pemerintah dalam era presiden SBY.</li> <li>✓ Menjelaskan bahwa keyakinan tersebut mendorong lahirnya pencitraan.</li> <li>✓ Memetakan beberapa kontroversi dan isu internasional yang mendorong perlunya pencitraan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Minimalisme peran negara dalam mengontrol sektor informasi.</li> <li>✓ Membandingkan secara umum model implementasi pencitraan sebelum liberalisasi dan setelah liberalisasi informasi.</li> <li>✓ Lahirnya pencitraan yang mendegradasi ideologi berdampak pada kebijakan luar negeri.</li> </ul>



Sintesis akhirnya diperoleh setelah mengekstraksi kedua subbab sebelumnya guna membantu menjawab problem yang ada dalam rumusan masalah. Secara ringkas, sintesis ini berupaya memberikan eksplanasi mengenai adanya paradigma Neoliberalisme yang menjadi keyakinan pemerintah sebagaimana yang akan dipaparkan pada Bab kedua. Sebuah keyakinan yang terfleksikan melalui pencitraan untuk simbolisasi *million friend zero enemy*. Sedangkan Bab Ketiga menunjukkan bahwa pemikiran neoliberalisme tersebut dianut karena dikondisikan oleh begitu turbulennya informasi yang kemudian direspon oleh pemerintah melalui upaya untuk membingkai citra posisi Indonesia bagi hubungan luar negeri.

Beberapa uraian tersebut menjadi eksplanasi ilmiah bahwa logika neoliberal baik dari segi pemikiran maupun struktural berada dibalik *million friends zero enemy* terindikasi terjadi di Indonesia. Konseptualisasi tersebut membuka ruang bagi analisa ekonomi politik dalam kajian kebijakan luar negeri. Terlepas dari masih adanya problem disiplin keilmuan antara *foreign policy* dengan studi ekonomi politik. Penelusuran jejak neoliberalisme sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya menunjukkan adanya gap antara realitas yang terjadi di Indonesia dengan paradigma ekonomi politik internasional pasca krisis 2008. Ketika banyak yang berkeyakinan bahwa neoliberalisme telah mengalami kemunduran pasca krisis 2008 melalui contoh kasus banyak negara, maka Indonesia menjadi kasus partikular yang menunjukkan kenyataan sebaliknya. Liberalisasi informasi di Indonesia justru semakin meningkat dan tidak lagi bisa dikontrol oleh negara. Dengan demikian maka transformasi tatanan informasi tersebut memungkinkan proses artikulasi kebijakan luar negeri yang sebelumnya elitis, menjadi bersinggungan dengan selera pasar.

Perlu diperjelas sekali lagi, penelitian ini tidaklah menggunakan analisa sebab-akibat. Dengan kata lain, Liberalisasi Informasi dalam penelitian ini sesungguhnya tidak menjadi logika eksternal yang bersifat determinan bagi aktor politik untuk melakukan pencitraan tertentu. Liberalisasi informasi merupakan struktur yang bersifat *enabling*, bukan *constraining*, sehingga memiliki implikasi yang berbeda-beda. Dengan kata lain Liberalisasi Informasi merupakan sesuatu yang khas di Indonesia sekaligus bentuk nyatadari kiasan presiden

mengenai *Turbulence ocean* sebagaimana kondisi yang dikhawatirkan pemerintah. Sekalipun pengaruhnya tidak determinan, namun tidak bisa diabaikan eksistensi Liberalisasi sektor informasi merupakan aspek eksternal/struktural yang memprakondisikan *million friend zero enemy* tersebut. Jika diilustrasikan, deskripsi mengenai hubungan pencitraan dan liberalisasi informasi adalah relasi antara “penekan” dan “penahan. Atau dalam analogi tertentu, hubungan keduanya bukanlah sinergi, melainkan kontradiksi sebagaimana dapat disimak pada gambar model analisa gambar 1.6.4.

Pencitraan dan Liberalisasi Informasi adalah dua sisi mata uang yang sulit untuk ditemukan titik temunya. Kontroversi isu internasional dalam era liberalisasi informasi senantiasa bereproduksi kembali bahkan sukar untuk diprediksi. Dengan kata lain, liberalisasi informasi seharusnya dapat menjadi tekanan pada pemerintah untuk asertif. Namun karena informasi menjadi komoditas justru sebaliknya, liberalisasi informasi juga tidak menunjukkan konsistensinya dalam memberikan tekanan serius bagi pemerintah. Dengan kata lain Indonesia menjadi kasus unik yang berbeda dengan contoh Cina yang diulas pada tinjauan pustaka. liberalisasi informasi menunjukkan tiadanya sinergi antara problem ekonomi politik kebijakan luar negerinya.

Kontroversi sebagaimana yang dijelaskan pada model analisa 1.6.4. dibawah ini merupakan momentum dimana pencitraan tersebut dapat dicari polanya serta diuji secara empirik. Pencitraan hadir selain sebagai sebuah upaya dalam upaya untuk mengamankan kontroversi, sekaligus menjaga reputasi diri. Namun, pencitraan *million friends zero enemy* menyisakan persoalan karena kontroversi tidak sepenuhnya dapat diatasi. Sebaliknya reputasi diri yang dipertahankan melalui pencitraan dalam perkembangannya justru menjadi beban. Kontroversi tidak mudah dijinakkan oleh pencitraan karena akselerasi turbulensi isu lebih cepat ketimbang akselerasi dari pencitraan.

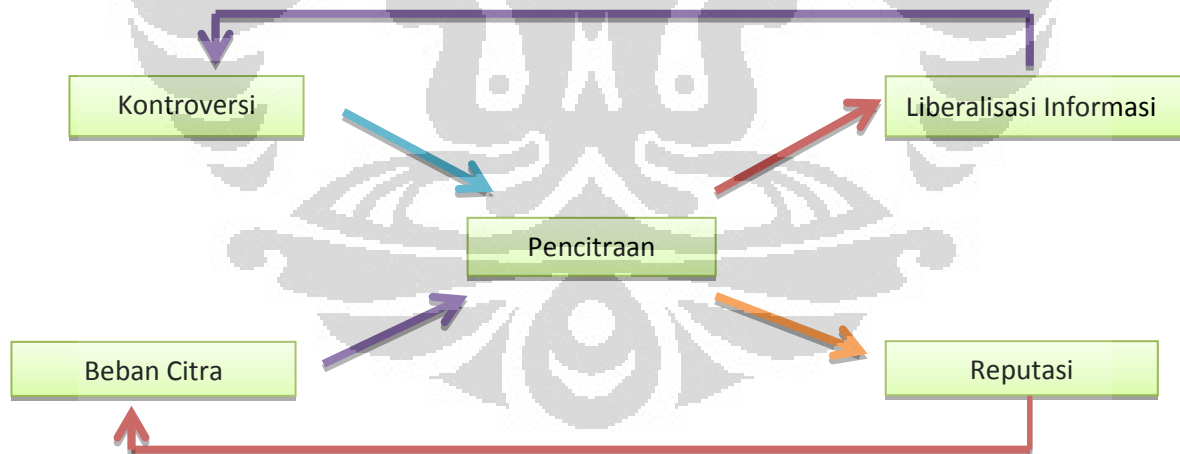
Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa *million friend zero enemy* merupakan manifestasi dari pencitraan yang dilakukan pemerintah untuk mempromosikan keindonesiaan secara positif. Pencitraan sekaligus sebagai resistensi pemerintah terhadap liberalisasi informasi dimana pemerintah tidak bisa mengontrolnya. Ketika

informasi tidak berada dalam kontrol negara, maka turbulensi informasi yang tidak sepenuhnya memberikan tekanan secara konsisten dan justru hanya mereproduksi kontroversi. Implikasinya turbulensi tersebut secara tidak langsung memberi ruang bagi pemerintah untuk mempertahankan citranya dengan tidak bersikap asertif.

Dengan demikian maka terdapat dua konsep besar yang menjadi substansi penelitian ini, yakni liberalisasi informasi dan pencitraan. Kedua konsep tersebut dimunculkan bukan tanpa dasar. Keduanya berasal dari analisa terhadap ungkapan filosofis *navigating a turbulence ocean* yang mengasumsikan perlunya Indonesia mencari persahabatan dan tidak bermusuhan dalam dunia yang penuh gejolak tersebut. Dengan kata lain, pencitraan dan liberalisasi informasi merupakan hasil intepretasi atas pernyataan pemerintah sendiri.

Untuk dapat lebih memahami bagaimana sistematika gagasan tersebut dapat diilustrasikan melalui model analisa berikut:

#### 1.6.4. Model Analisis



## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian deskriptif-analitis karena merupakan perpaduan antara aktivitas pemaknaan mendalam (*verstehen*) dan aktivitas pemetaan konseptual.<sup>44</sup> Namun sekalipun banyak mengandung unsur deduksi, namun penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif karena tidak menjelaskan suatu hubungan kausalitas. Teori yang dirumuskan lebih pada upaya mendeskripsikan kompleksitas antar variabel, bukan urutan antar variabel. Struktur dalam penelitian ini tidaklah bersifat deterministik, karena subyek bersifat semi otonom. Kebijakan *million friends zero enemy* merupakan konsekuensi dari proses, dan bukan ditempatkan sebagai variabel dependen yang dideterminasi oleh liberalisasi informasi.

Sekalipun berpijak pada paradigma kualitatif, namun peneliti menyadari tidak bisa langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data sebagaimana *grounded research*. Peneliti perlu menggunakan bantuan konsep dari trayektori hubungan internasional. Fungsi teori dalam penelitian kualitatif bukan dalam rangka untuk diuji, melainkan lebih pada menstimulus gagasan awal untuk selanjutnya dikembangkan mengikuti data yang diperoleh. Kerangka teoritik kualitatif umumnya menggunakan teori dalam skala paradigmatic, dan bukan *middle range theory*.<sup>45</sup>

Penelitian kualitatif menggunakan elemen berupa data kualitatif. Contoh data kualitatif dalam penelitian ini adalah dokumentasi, rekaman pernyataan termasuk kata, gestur, dan tekanan bicara, serta gambaran perilaku, dokumen tertulis, dan gambar visual. Penelitian ini juga menggunakan grafik dan statistik berupa tabel dan grafik perkembangan meski bukan dimaksudkan untuk dikuantifikasi, melainkan hanya sebagai gambaran semata. Penelitian kualitatif ini menggunakan *purposivesampling* sebagai cara pemilihan objek yang paling merepresentasikan sample dalam penelitian kualitatif.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.56-78.

<sup>45</sup> Schatzman, & Strauss, *Field Research, Strategy on Natural Sociology*, (New Jersey: Prentice-Hall, 1973)

<sup>46</sup> Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Negara Fisip UI, 2006), hal 16-17

### 1.7.2. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menekankan perlunya meneliti kajian neoliberalisme dan kebijakan luar negeri ini melalui dua jenis teknik pengumpulan data, yakni studi kepustakaan (*Research Literature*), dan wawancara. Keduanya diperlukan lantaran tidak semua data dapat diakomodir dalam satu teknik pengumpulan saja. Mayoritas data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan baik cetak maupun *online*. Studi kepustakaan dilakukan mengingat *Million friends zero enemy* bukanlah kebijakan luar negeri yang rahasia. Justru kebijakan tersebut senantiasa berada dalam publikasi massal sehingga data sekunder dirasa relevan untuk menggali kontroversi publik dalam ranah diskursus. Sedangkan wawancara pada responden dilakukan dengan menggunakan teknik *unstructured interview*. Teknik *unstructure* bertujuan membuka kebebasan pertanyaan dan jawaban dari narasumber.<sup>47</sup> Melalui metode wawancara tidak terstruktur tersebut diharapkan didapatkan suatu data yang tidak hanya yang memiliki relasi dengan pertanyaan penelitian.<sup>48</sup>

### 1.7.3. Teknik Analisa Data

Penelitian kualitatif berusaha menginterpretasi konteks dibalik teks. Oleh karena itulah, apa yang terlontar dari suatu teks tidaklah dimaknai apa adanya secara *taken for granted*. Terlebih lagi, penelitian ini berusaha menggali logika dibalik pencitraan. Data yang didapatkan berupa kutipan pidato, dokumen resmi, artikel media massa, akan berusaha dilacak makna tersiratnya. Apalagi sebagian data nantinya adalah berupa transkrip pidato yang tentunya sulit jika dianalisis secara kuantitatif.

Metode diskursus analisis menjadi metode yang cocok dalam membedah teks dalam implementasinya dalam sebuah konteks. Diskursus analisis berupaya menyelami konstelasi wacana yang sedang terjadi dalam ruang publik. Guna membaca selera pasar tidak harus dilakukan melalui survei, melainkan cukup melihat ranah *diskursus* dalam dunia informasi. Melalui metode analisa diskursus,

<sup>47</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007) hal.56-78

<sup>48</sup> *Ibid.* hal.67



kontekstualisasi dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan suatu konstruksi ide yang menimbulkan respon terhadap pencitraan yang akan diterapkan pada bab ketiga tulisan ini.<sup>49</sup> *Analisis diskursus* bisa melacak perbedaan pencitraan sebelum privatisasi informasi dan pencitraan setelah privatisasi informasi. Perbandingan tersebut selain berfungsi melacak kapan liberalisasi informasi terjadi, juga menjadi penting untuk meyakinkan secara sistematis bahwa pencitraan yang dilakukan pemerintahan era SBY merupakan respon dari neoliberalisme informasi. Selain itu *Coding* juga digunakan sebagai teknik untuk mengklasifikasikan secara sistematis teks-teks atau kutipan mana saja yang didalamnya mengandung unsur pencitraan.<sup>50</sup>

### **1.8. Sistematika Penulisan :**

**Bab 1** Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Signifikansi Penelitian, Tinjauan Pustaka Kerangka Teoritik dan Metodologi.

**Bab 2** Berjudul *Million friends zero enemy* sebagai bagian dari pencitraan. Dalam Bab kedua ini dipaparkan contoh kasus dari Implementasi *million friend zero enemy* untuk menunjukkan sejauh mana pencitraan menjadi signifikan dalam kontroversi.

**Bab 3** Berjudul *Million Friends zero enemy* sebagai respon atas liberalisasi informasi. Bab ini menguraikan proses liberalisasi sektor informasi di Indonesia, dan bagaimana perkembangannya turut mengkondisikan pencitraan sebagai respon. Dalam bab ini dijelaskan mengenai perbedaan era pre liberalisasi informasi dan paska liberalisasi informasi.

**Bab 4** Merupakan kesimpulan dimana terdapat bagian konseptualisasi dan generalisasi induktif untuk melakukan korelasi dari kedua konsep tersebut secara komprehensif. Bab kesimpulan ini sekaligus menjelaskan implikasi teoritik yang dihasilkan oleh penelitian serta menjajaki kemungkinan untuk keluar dari fenomena tersebut sekaligus rekomendasi kebijakan.

<sup>49</sup> Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis*. (London : Sage, 1995)

<sup>50</sup> Lawrence Neumann, *Basics of Social Research Qualitative and Quantitative Approaches*, (United States of America: Pearson Education, 2004)

## BAB II

### ***MILLION FRIENDS ZERO ENEMY* SEBAGAI PENCITRAAN**

Bab kedua disusun sebagai uji empirik dari penjelasan teoritik bab pertama yang menyatakan bahwa semboyan *million friends zero enemy* merupakan bagian dalam pencitraan. Pencitraan, sesuai dengan skema yang diulas pada bab pedahuluan, merupakan strategi untuk mempertahankan reputasi pemerintah, dan sekaligus di sisi lain berupaya untuk menahan gejolak turbulensi isu yang muncul mengiringi kebijakan luar negeri. Maka dari itulah, tulisan ini akan mencoba mengelaborasi bagaimana pola dan mekanisme dari semboyan *million friends zero enemy* ditengah kontroversi yang menjadi momentum hadirnya pencitraan sebagai sebuah konsekuensi logis. Fenomena tersebut dapat ditinjau melalui beberapa contoh kasus yang dirasa presisi dalam melihat keterkaitan slogan tersebut dengan upaya pencitraan.

Untuk mengarahkan pada kejelasan sistematika penulisan, maka bab kedua terdiri dari enam sub pembahasan. Tata kelola pembagian akan dimulai dari pemaparan secara general implementasi kebijakan *million friends zero enemy*, dilanjutkan dengan bagaimana serangkaian kontroversi yang mengelilinginya. Pembahasan ketiga akan mempertanyakan tujuan *million friends zero enemy*. Selanjutnya dalam pembahasan keempat akan dilacak kaitan dari kebijakan luar negeri tersebut terhadap pencitraan untuk selanjutnya akan dikaitkan sekilas dengan perkembangan liberalisasi informasi.

#### **2.1 Gambaran Umum Kebijakan *Million Friends Zero Enemy***

Semboyan *million friends zero enemy* menjadi sebuah misteri yang menyisakan teka-teki mengenai apa urgensi dibalik simbolisasi tersebut. Sebuah slogan yang hadir disaat tuntutan begitu besar untuk mengedepankan citra asertif. Untuk itu perlu kiranya untuk melacak secara historis latar belakang semboyan tersebut. Upaya mensosialisasikan semboyan *Million friend zero enemy* menjadi intensif ketika presiden SBY terpilih untuk kedua kalinya pada 2009. Presiden SBY mengusulkan Indonesia untuk bersikap strategis dalam menghadapi perkembangan global kontemporer. Presiden SBY mengutarakan perlunya

menerapkan *all direction foreign policy* karena Indonesia menganut prinsip bebas aktif. Terlebih lagi, perkembangan Internasional sedang berada dalam rezim yang penuh ketidakpastian. Kondisi yang penuh dinamika dan ketidakpastian tersebut digambarkan presiden sebagai *navigating a turbulent ocean*. Semboyan *Million friends zero enemy* diperkenalkan oleh publik oleh Presiden SBY saat Pidato pelantikan beliau bersama Wapres Budiono pada 20 oktober 2009 dengan contoh kutipan pernyataan sebagai berikut;

“Saya ingin memulai, dan ini sebenarnya semacam *review* atau mengingatkan kembali atas apa yang Bapak-Ibu ketahui bahwa di abad ke-21 ini, negara kami, Indonesia, mengusung yang saya sebut dengan *all-direction foreign policy*. Ada slogan yang kami angkat: *million friends and zero enemy*“<sup>1</sup>

Meskipun slogan tersebut secara resmi diperkenalkan periode presiden SBY kedua atau pada saat kementerian luar negeri Indonesia dijabat oleh Marty Natalegawa. Namun Semboyan *million friends zero enemy* dapat dilacak jejak awalnya sejak tahun 2008 ketika presiden SBY mengusulkan slogan tersebut dalam Forum USINDO.<sup>2</sup> Namun dalam tahun 2008, slogan tersebut belum sepenuhnya diangkat menjadi motto kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam perkembangannya terdapat perbedaan redaksional antara slogan yang ditampilkan Presiden SBY dengan slogan yang ditampilkan menteri luar negeri Marty Natalegawa dan aparaturnya kementerian luar negeri lainnya. Presiden SBY acapkali menggunakan slogan berjudul *million friends zero enemy*. Sedangkan Marty Natalegawa dan para diplomat acapkali menggunakan slogan *one thousand friends zero enemy*. Sekalipun berbeda secara redaksional, perbedaan tersebut tidak berimplikasi pada perbedaan substansi nilai, apalagi dalam implementasinya. Berikut ini merupakan kutipan pernyataan pers tahunan Marty Natalegawa dalam konferensi pers menteri luar negeri pada Januari 2010 yang mengisyaratkan urgensi simbol *one thousand friends zero enemy*.

<sup>1</sup>“Pelantikan SBY-Budiono 20 oktober 2009”, diakses dari <http://www.presidentri.go.id/index.php/pidato/2010/08/16/1457.html>, 2 februari 2011, pk 08.44.

<sup>2</sup> Susilo Bambang Yudhoyono. “Indonesia and America 21st partnership” 15 November 2008, diakses dalam <http://www.presidentby.info/index.php/eng/pidato/2008/11/15/1032.html>, pada 2 november 2011, pk 09.10.

*“Of course, our global and regional diplomatic efforts will be underpinned by solid bilateral diplomacy. In keeping with the tagline “one thousand friends, zero enemies”, our foreign policy in 2010 will actively seek to raise to a higher level existing ties with countries in all corners of the globe – the Asia-Pacific, Africa, Europe, and the Americas. In this connection, besides the promotion of positive political and people-to-people relations, there will be renewed and focused efforts to promote economic diplomacy.”*<sup>3</sup>

Salah satu manifestasi implementasi *one thousand* atau *million friends zero enemy* tersebut adalah dengan mejalin hubungan dengan berbagai entitas di segala penjuru (*all direction foreign policy*). Sebagaimana diketahui, pada tahun 2010 telah dilakukan pembukaan hubungan diplomatik baru dengan 21 negara anggota PBB. Selanjutnya pada tahun 2011, Menteri Luar Negeri melakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan delapan negara di sela Sidang Majelis Umum PBB, diantaranya Mauritania, El Salvador, San Marino, Montenegro, Republik Dominika, Niger, Sao Tome dan Principe, serta Antigua dan Barbuda. Pada kesempatan terpisah di tahun 2011, Indonesia juga telah dilakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Bhutan.<sup>4</sup> Lebih lanjut tahun 2012, beberapa negara telah merencanakan akan membuka perwakilan di Jakarta antara lain Georgia, Oman, dan Vanuatu.

Indonesia di masa pemerintahan presiden SBY berupaya untuk tidak terjebak dalam polaritas tertentu dan justru semakin agresif dalam membuka kerjasama, bahkan dengan negara kecil. Sekalipun urgensi dibalik pembukaan hubungan diplomatik tersebut dipertanyakan, lantaran dianggap pemborosan anggaran kenegaraan untuk mendirikan kantor diplomatik.<sup>5</sup> Namun, Kementerian Luar Negeri meyakini bahwa pembukaan hubungan akan meningkatkan kerjasama bilateral sesuai dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia, *all*

<sup>3</sup> Marty Natalegawa. Laporan Pers Menteri Luar Negeri Indonesia. “Indonesia and the World 2010”. 8 Januari 2010.

<sup>4</sup> Aditya Noviansyah. “Indonesia Buka 21 Hubungan Diplomatik 2011”. *Tempo* 12 Januari 2011. Diakses dari <http://www.tempo.co/hg/politik/2011/01/08/brk,20110108-304652,id.html>, pada 2 february 2012, pk 09.12.

<sup>5</sup> Jefri geovannie. “Maksimalisasi fungsi diplomasi”, *Tabloid prioritas*, , 2 -8 april. 2012 Diakses dari <http://www.prioritasnews.com/2012/02/16/maksimalisasi-fungsi-diplomasi/>, pada 2 april 2012, pk 06.55.

*direction foreign policy*. Berikut ini merupakan ungkapan presiden tentang perlunya mencari sebanyak mungkin teman:

Saya punya prinsip dan falsafah, dan ini mengalir dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yang dirumuskan oleh para pendiri republik, para *founding fathers*, maka yang cerdas dan bijak dalam dunia yang hidup dalam tatanan globalisasi ini adalah *zero enemy million friends*, satu musuh pun terlalu banyak, seribu kawan kurang.”<sup>6</sup>

Dengan semboyan *million freinds zero enemy*, Indonesia berusaha untuk tidak terjebak dalam dikotomi antar polaritas. Semisal Indonesia pada masa pemerintahan presiden SBY mengimajinasikan suatu dunia yang memungkinkan kerjasama negara utara dan selatan. Sebagaimana yang diungkapkan Dino Patti Djalal "Filosofi kerja sama antar negara presiden SBY ke utara ke selatan itu oke. Siapa pun yang pro-Indonesia, kita akan mengulurkan tangan". Dalam pertemuan G-33 di Jakarta terlihat bagaimana presiden Yudhoyono antusias untuk mengajak negara-negara maju menghilangkan diskriminasi terhadap negara berkembang, terutama menyangkut perdagangan. Agaknya terdapat sisi rasionalitas ketika presiden SBY berusaha untuk melibatkan dialog dengan negara utara karena kelemahan utama dari kerjasama selatan-selatan adalah masalah pendanaan yang terbatas. Oleh karena itulah, keterlibatan negara utara dalam konteks pragmatisme dianggap penting untuk menstimulus kerjasama selatan-selatan melalui dialog utara-selatan. Akan tetapi, terlepas dari terobosan Indonesia dalam mendorong dialog utara dan selatan, namun terlihat adanya beban semboyan *million friendszero enemy* dibalik posisi tersebut.

Kemunculan slogan *miilion friendszero enemy* tersebut juga tidak bisa kita lepaskan dari konteks global yang terjadi pada periode SBY sebelumnya 2004-2009, yakni diskursus *war on terror* yang cukup sensitif di Indonesia. Presiden SBY memperlihatkan bagaimana Indonesia senantiasa mengedepankan sosok sebagai negara berpenduduk muslim terbeaar yang tidak memusuhi barat. Salah satunya dilakukan dengan Presiden SBY yang acapkali membanggakan keberhasilan Indonesia sebagai negara muslim demokrasi terbesar setiap berpidato

<sup>6</sup> “Transkripsi Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Acara Pertemuan dengan Masyarakat Indonesia di Sydney, Australia”, 10 Maret 2010. diakses dari <http://www.deplu.go.id/Lists/SpeechesAndTranscription/DispForm.aspx?ID=612&l=en>, pada 2 April 2012, pk.07.55.

dalam forum Internasional. Presiden SBY juga antusias dalam upaya untuk memberantas terorisme yang bukan representasi Islam moderat. Keyakinan Indonesia atas sikap moderat tersebut dapat kita ketahui melalui serangkaian pidato presiden yang acapkali menjunjung tinggi Islam moderat dimana salah satunya terefleksikan pada pidato pelantikan presiden SBY dan Wapres Budiono pada September 2009 berikut;

Ada kepribadian yang membuat kita unggul dan tidak mudah goyah. Sikap toleransi, keberagaman, moderat dan kemanusiaan, harus kita jaga dan pupuk di sanubari kita,"<sup>7</sup>

Dengan kata lain, upaya mempromosikan Islam moderat sejatinya juga telah disosialisasikan dalam pemerintahan presiden SBY periode pertama di era menteri Hassan Wirayuda. Manifestasi penerapan simbol Islam moderat terlihat dalam beberapa forum Internasional yang diikuti presiden SBY seperti OKI, dan *Global Interfaith dialogue*. Presiden secara intensif acapkali menekankan pada umat Islam tentang perlunya menjaga harmoni dalam keberagaman dan menghindari aksi konfrontatif, serta senantiasa maju agar umat Islam tidak ketinggalan dengan umat lainnya. Presiden SBY dengan bangga mencontohkan Islam Indonesia sebagai arketipe Islam yang dapat bersinergi dengan kemajuan peradaban. Hal berikut merupakan salah satu sampel Islam moderat sebagaimana yang selalu dibanggakan presiden SBY dalam konferensi persnya.

*"And in a world still haunted by a clash of civilizations, Indonesia remains a shining example where democracy, Islam and modernity thrive together."*<sup>8</sup>

Di sisi lain, perlu untuk mempertanyakan kebaruan dari Islam moderat yang hadir pada masa presiden SBY. Hal tersebut karena Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda pada era pemerintahan Megawati telah berupaya

<sup>7</sup> "Pidato awal Jabatan Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014", dalam acara pelantikan di gedung DPR/MPR Senayan, 20 Oktober 2009, diakses dari [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=4093&Itemid=26](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4093&Itemid=26), pada 2 Maret 2012, pk 08.33.

<sup>8</sup> "Indonesia and america 21st century partneship", 20 November 2008 diakses dari <<http://www.presidentri.go.id/index.php/eng/pidato/2008/11/15/1032.html>>, pada 28 September 2011. pk.08.42.



mengklarifikasi relevansi HAM demokrasi dengan Islam. Dengan demikian maka perlu untuk mempertanyakan originalitas Islam moderat dalam kaitanya dengan *million friends zero enemy*. Kutipan ini menunjukkan Menlu Hassan Wirayuda tidak segan memproklamirkan simbolisasi Islam Moderat sebagai berikut:

*"as a nation with an overwhelmingly Muslim population, Indonesia is a living refutation of the erroneous notion that Islam and democracy are incompatible."*<sup>9</sup>

Beberapa pernyataan tersebut seolah menunjukkan bahwa Indonesia dapat melakukan kolaborasi diantara dua nilai yang dalam era kontemporer acapkali menjadi oposisi biner, yakni nilai Islam dan barat sekaligus. Ahmad Bakir Ihsan selaku staff ahli bidang diplomasi menjelaskan bahwa menonjolkan sikap non-konfrontatif adalah penting, yakni sebagai respon dari diskursus pertentangan antara barat melawan Islam yang marak seiring isu *war on terror*.<sup>10</sup> Begitu pula dengan Azyumardi Asra yang menyatakan perlunya Indonesia untuk mempromosikan jika demokrasi Relevan bagi Islam.<sup>11</sup> Apalagi sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia dituntut untuk memperjelas posisinya karena isu mengenai Islam menjadi acapkali sensitif. Berikut ini merupakan salah satu contoh pernyataan kontemporer SBY pada KTT-APEC, November 2011 mengenai Islam moderat.

*"Indonesia akan menjadi model bahwa tidak perlu ada konflik antara Islam dengan modernitas dan demokrasi. Kami harus mempertahankan Islam kami yang moderat"*.<sup>12</sup>

Serangkaian fakta diatas menunjukkan jika manifestasi dari slogan tersebut merupakan kelanjutan dari era pertama presiden SBY. Sekalipun secara slogan baru dimunculkan pada periode kedua, namun secara praktik telah dibina

<sup>9</sup> Hassan. Wirayuda, "Indonesia Democratic Response". 15 November 2001. diakses dari <<http://www.un.org/webcast/ga/56/statements/011115indonesiaE.html>, 2 Februari 201, pk 08.31.

<sup>10</sup> Ahmad Bakir Ihsan. *Menebar Toleransi Menyemai Harmoni: SBY dalam Wacana Perdamaian, Moderatisme dan Keadilan*. (Bandung: Rosdakarya, 2009)

<sup>11</sup> Azyumardi Azra, 2012. Indonesia menjadi model bagi hubungan Islam dan demokrasi". *Tabloid Diplomasi*, Maret-April 2012.

<sup>12</sup> Nahdlatul Ulama, "Indonesia Pertahankan Islam Moderat". 13 November 2011, diakses dari <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,34770-lang,id-c,warta-t,SBY++Indonesia+Pertahankan+Islam+Moderat-.phpx>, pada 1 Februari 2012, pk.11.01.

pada periode pertama. Lalu apakah sesungguhnya kebaruan yang ditawarkan dari semboyan *million friendzero enemy*?. Pertanyaan ini mengundang banyak perspektif baik yang skeptis maupun yang kritis. Kebijakan luar negeri Indonesia dengan sikap *zero enemy* sejatinya telah dijelaskan dalam prinsip mendayung diantara dua karang. Secara substansi tidak ada yang membedakan presiden SBY dengan presiden sebelumnya. Prinsip pro perdamaian sejatinya juga diimplementasikan oleh presiden sebelumnya Sukarno, Suharto, Habibie, Megawati dan Gus dur, sekalipun mereka memiliki musuh secara ideologis.

“Dulu, Bung Hatta pernah melukiskan tantangan politik luar negeri sebagai “mendayung di antara dua karang”, dalam arti antara Blok Barat dan Blok Timur. Kini, saat persaingan Blok Barat dan Blok Timur sudah hilang, diplomasi Indonesia di Abad ke-21 menghadapi dunia yang jauh lebih kompleks, ibarat “mengarungi samudera yang penuh gelombang”.<sup>13</sup>

Dari kutipan diatas menunjukkan sedikit kebaruan yang ditawarkan presiden SBY. Filosofi presiden SBY kontemporer mengarungi samudra bergejolak dalam derajat tertentu memodifikasi filosofi mendayung diantara dua karang Bung Hatta. Presiden berujar jika era perang dingin dimana dua karang (blok barat dan Timuh) telah berubah. Tantangan kekinian lebih pada ambivalensi polaritas dimana dunia menjadi multipolar dan penuh gelombang. Inilah yang menjadi dalil ontologi pemerintah untuk mengedepankan sikap *million friends zero enemy*. Terlihat Presiden SBY mengasumsikan perkembangan Internasional sebagai tuntutan sehingga sedikit banyak menjadikan Indonesia sebagai obyek sistem internasional.<sup>14</sup>

Samudra yang penuh gelombang (*navigating a turbulent ocean*) menjadi kata kunci untuk mengungkap kebaruan paradigma presiden SBY. Intisari dari yang dimaksudkan ungkapan presiden diatas tidak lain merupakan turbulensi kontroversi yang senantiasa muncul dalam ruang publik sebagai konsekuensi zaman globalisasi. Dengan demikian, maka perlu kembali kepada kerangka pemikiran yang diajukan oleh penelitian ini, jika slogan tersebut lahir sebagai

<sup>13</sup> Susilo Bambang Yudhoyono. “Menjalankan Diplomasi yang Cerdas Cekatan dan Efektif” *Tabloid Diplomasi*, Maret- April 2012. Hal.4

<sup>14</sup> Peter Kasenda, “Hatta dan Demokrasi Kita”, Dipresentasikan di Megawati Institute. 2 April 2012

sebuah upaya menjaga netralitas Indonesia ditengah turbulensi informasi. Maka dari itulah subbab selanjutnya akan memaparkan bagaimana kontroversi yang intensif mengtringi kebijakan luar negeri Indonesia dan bagaimana pemerintahan presiden SBY menyelesaikanya.

## 2.2 Kontroversi dalam Semboyan *Million Friends Zero Enemy*

Pada hakikatnya semboyan *million friends zero enemy* merupakan repetisi dari implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah pada periode pemerintahan 2004-2009. Hanya saja pada periode SBY sebelumnya, slogan tersebut belumlah diperkenalkan ke publik. Ketika kita memandang *million friends zero enemy* hanyalah sebuah slogan, maka pembahasan kita hanya akan terbatas pada tahun 2009 hingga sekarang. Namun ketika memandang *million friend zero enemy* merupakan paradigma, maka pembahasan kita akan lebih luas. Artinya, slogan tersebut sesungguhnya merupakan cerminan dari adanya paradigma yang dianut pemerintah. Sekalipun sebuah slogan, *million friends zero enemy* bukanlah semata aksesoris dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Tidak dapat dipungkiri secara simbolik, slogan tersebut tidak bisa dilepaskan dari sebuah nilai yang dianut. Melalui semangat tersebutlah pemerintah Indonesia berupaya untuk tidak menekankan sikap permusuhan dengan aktor internasional lain sebagaimana kutipan presiden SBY sebagai berikut.

“Kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah all direction foreign policy dengan mengangkat slogan 'mencari sebanyak mungkin teman dan menghindari permusuhan (*million friends and zero enemy*)'. "Indonesia kini telah menjadi kekuatan regional dengan *global responsibility* dan *global interest*. Kami akan selalu aktif menguatkan hubungan kerja sama dan kemitraan dengan negara sahabat manapun, tentu atas kepentingan nasional dan kepentingan bersama kita.”<sup>15</sup>

Sesungguhnya tidak ada yang baru dalam *million friends zero enemy*. Dilacak pada periode SBY sebelumnya, kebijakan bertipikal seperti ini juga diterapkan walaupun tanpa embel-embel slogan *million friends zero enemy*.

<sup>15</sup> “Transkrip paparan Presiden Republik Indonesia Mengenai Perkembangan Tanah Air Kepada Kalangan Diplomatik”. 15 Februari 2012. diakses dari <http://www.setkab.go.id/index.php?pg=detailartikel&p=4012>, pada 2 maret 2012, pk 07.45.

Terbukti dalam sikap pemerintah dalam kasus Malaysia yang ternyata tidak ada perubahan dengan periode sebelumnya. Upaya maksimal yang dilakukan pemerintah hanya dengan sebatas mengirimkan nota protes diplomatik yang hingga kini tidak kuasa menghentikan rentetan kasus TKI dan kedaulatan. Serta tidak ketinggalan masih lestarynya sikap mendua pemerintah dalam menanggapi kasus Israel-palestina. Terbukti, dalam kasus kontemporer dimana penyanderaan WNI dalam kapal Asvi Marmara tidak mendorong lahirnya sikap tegas pemerintah. Bahkan upaya diplomasi perbatasan Kinabalu sebagaimana yang senantiasa ditekankan pemerintah tidak kunjung menuai hasil.

Oleh karena itulah variabel perpolitikan domestik tidak diaplikasikan menjadi level analisis dalam membedah kasus ini. Hal tersebut karena terlihat adanya kesamaan prinsip kebijakan meski dalam periode perpolitikan yang berbeda. Meskipun secara general sama, tapi slogan *million friends zero enemy* menjadi pintu masuk penting bagi penelitian ini untuk mengupas logika dibalik sikap tidak asertif pemerintahan SBY. Karena melalui slogan inilah, tersirat adanya perspektif Neoliberalisme yang dianut pemerintah dengan mengedepankan sikap kooperasi pada setiap entitas .

Dalam dunia yang sedang bertransformasi, atau yang disebut Menlu Marty Natalegawa sebagai *dynamic equilibrium*, sikap non konfrontatif diyakini sebagai sebuah langkah strategis. Prinsip *million friends zero enemy* juga diasumsikan Menlu sesuai dengan prinsip bebas aktif yang selama ini menjadi landasan idiil Politik luar negeri Indonesia. Slogan *million friends zero enemy* tidak dimaksudkan untuk menggantikan prinsip bebas aktif serta mendayung diatas dua karang. Bahkan *million friends zero enemy* justru menjadi komplemen atas prinsip bebas aktif dalam konteks kekinian. Namun keterangan bahwa politik bebas aktif tidak mengalami perubahan sama sekali tersebut ternyata berbeda ketika kita korelasikan dengan pernyataan presiden SBY sbb:

“Kita menyadari, di Abad ke-21, politik bebas aktif saja tidak cukup. Kita harus menjalankan diplomasi bebas, aktif, dan transformatif”<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Situs Resmi Presiden RI. “Presiden paparkan perkembangan kepada 128 negara”. diakses dari <http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/2012/02/15/7673.html> pada 10 maret 2012, pk 01.00

Memahami substansi mengenai alasan pemilihan redaksional *million friend* agaknya cukup sulit dimaknai. Terlebih lagi faktanya jumlah negara di dunia tentu jauh dari angka satu juta. Namun alasan pemerintah perlunya satu juta sahabat dilandasi oleh kesadaran jika sahabat Indonesia bukan hanya negara. Era kontemporer memungkinkan diplomasi antar individu (*people to people*). Maka dari itu pada tanggal 15 Agustus 2011 pemerintah meresmikan Pfoi (*presidential friend of Indonesia*) yang dikembangkan dalam konteks peningkatan *people to people contact*.<sup>17</sup> Pfoi diasumsikan juga dapat mendukung tema keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011 dengan motto ASEAN *Community within the Global Community of Nations*.

Terlepas dari problem redaksional yang mengiringi sikap pencitraan Indonesia, namun perlu diakui pengakuan Internasional mengalir ke Indonesia yang pada tahun 2010 berhasil memperoleh kursi menjadi anggota DK PBB. Sebuah prestasi yang baik apalagi setelah beberapa tahun lalu Indonesia masuk dalam kategori *failed state*. Yang terbaru, Indonesia didaulat menjadi ketua ASEAN tahun 2011 dengan semboyan *ASEAN towards Global Community of Nation*. Keketuaan Indonesia di ASEAN 2011 dengan mengusulkan keterlibatan Amerika dan Rusia dalam *East Asia Summit* menjadi manifestasi dari semboyan ini sekaligus refleksi pemikiran Marty Natalegawa dalam kiasanya *dynamic equilibrium*. Oleh karena itulah, Menlu Marty Natalegawa menegaskan bahwa Indonesia harus menghindari diplomasi marah-marahan dalam menyelesaikan persoalan. Berikut merupakan kutipan dari pernyataan Menlu Marty Natalegawa di Kantor Kementerian Luar Negeri di Pejambon, 24 Juni 2009 untuk melihat dasar argumentasi perlunya *one thousand friends zero enemy*.

“Dengan kita mengatakan kita punya sahabat, kawan, dekat dengan berbagai negara, bukan berarti kita harus membuat semuanya senang dan tidak ada prinsip,” Menurut saya, yang penting kita konsisten dengan prinsip. Dengan kita mengatakan kita punya sahabat, kawan, dekat dengan berbagai negara, bukan berarti kita harus membuat semuanya senang dan tidak ada prinsip”<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Kementerian Luar Negeri. “Pfoi sebagai salah satu upaya Million friend zero enemy”, diakses dari <http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=5086>, pada 2 April 2012, pk.21.21.

<sup>18</sup> Rene Kawilarang, “Indonesia Hindari Diplomasi marah-marahan”, 24 Juni 2010. diakses dari <http://analisis.vivanews.com/news/read/160062-indonesia-hindari-diplomasi-marah-marahan> pada 2 Februari 2012, pk 22.00

Melalui pernyataan tersebutlah Menteri luar negeri menekankan bahwa Prinsip *Million friend zero enemy* bukanlah sebagai sebuah sikap yang tidak berprinsip. Hal tersebut terefleksikan dari sikap pemerintah yang hingga sekarang tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pemerintah juga masih mengirimkan bantuan materil kepada Palestina, termasuk dukungan penuh atas kemerdekaanya. Namun prinsip tidak membuka hubungan dengan Israel tersebut ternyata malah menunjukkan inkonsistensi pemerintah dengan *million friends zero enemy*. Kasus Israel dan Palestina ini menjadi titik tolak untuk menunjukkan jika semboyan *million friends zero enemy* merupakan pencitraan. Semboyan tersebut dalam derajat tertentu memiliki cita-cita yang tinggi namun terbentur pada problem implementasinya, sebagaimana kutipan berikut.

“Dengan demikian, Indonesia bisa melakukan all direction foreign policy. Kita harus menciptakan *million friends and zero enemy*. Kita bisa kerja sama dengan siapa pun,”<sup>19</sup>

Namun terlepas dari ambivalensi posisi, ternyata banyak pujian Internasional yang diterima pemerintah Indonesia dimasa presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menlu menunjukkan posisi Indonesia di forum internasional sebagai bentuk penghargaan internasional atas sikap bersahabat Indonesia. Bahkan tidak jarang beberapa kali Indonesia didaulat untuk menjadi mediator dalam kasus konflik di luar teritori Indonesia, semisal antara Kamboja dan Thailand tahun 2010. Terlebih lagi, Indonesia dimasa pemerintahan SBY secara intensif ditunjuk menjadi tuan rumah dalam beberapa konferensi terkemuka seperti *United Nation Forest amd Climate Change*, *Konferensi Asia Afrika* dan *Bali Democracy Forum*. Tak bisa dipungkti Indonesia pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat paling banyak menjadi tuan rumah ketimbang era presiden sebelumnya.

Namun pujian melimpah di luar negeri berbanding terbalik dengan yang terjalin didalam negeri. Presiden SBY dan Menlu Marty mendapat banyak sekali kritik dan sindiran yang diterima dari masyarakatnya sendiri. Terutama jika terkait dengan problem kedaulatan dan perlindungan WNI yang tidak kunjung

<sup>19</sup> “Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden SBY-Budiono”, 20 Oktober 2009, diakses dari <http://www.presidentri.go.id/index.php/pidato/2010/08/16/1457.html>, 2 Februari 2012 pk 08.20.



menemukan penyelesaian. Semisal sengketa perbatasan di Camar Bulan dan Tanjung Datu semakin memerahkan rapor pemerintahan SBY karena dinilai tak mampu menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hingga tahun 2012, tidak kurang dari tiga kilometer patok 104 di Kalimantan bergeser sehingga lebih memperluas daerah Malaysia. Belum lagi, Pulau Bintan yang berulang kali menuai persoalan dalam ruang publik hingga presiden SBY harus mengeluarkan konferensi pers di Puri Cikeas.<sup>20</sup> Sebagai contoh kutipan berikut ini yang tersurat dalam pernyataan SBY terkait insiden pulau Bintan Oktober 2010;

“Terhadap insiden ini, kita semua sangat prihatin, dan saya ingin agar masalah ini segera di selesaikan secara tuntas, dengan mengutamakan langkah-langkah diplomasi”.<sup>21</sup>

Kutipan tersebut mengindikasikan adanya manifestasi gaya presiden SBY dalam negeri dengan mengungkapkan keprihatinan. Implikasinya muncul wacana jika Diplomasi pemerintahan SBY dinilai belum sepenuhnya mampu melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayat yang menilai situasi diplomasi terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam era SBY bersifat *extraordinary*. Di masa pemerintahan SBY, Tiga TKI divonis tetap oleh Mahkamah Agung Malaysia dengan hukuman mati. Meskipun juga masih terdapat kelemahan, tetapi Anis Hidayat mengapresiasi perhatian penuh kedua mantan Presiden, yaitu Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Keduanya dinilai cukup memerhatikan nasib para TKI yang menghadapi persoalan hukum ketimbang presiden SBY. Gus Dur bertindak cepat ketika Siti Zainab yang merupakan TKI asal Madura dengan langsung menghubungi Raja Fahd di Arab Saudi sehingga ditunda vonis hukuman matinya.<sup>22</sup> Sedangkan pemerintahan presiden SBY belum mampu mendorong Malaysia yang hingga

<sup>20</sup> “kepuasan Rakyat Terhadap Kinerja SBY terus Menurun” Republika online 16 oktober 2010. diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/11/10/16/lt5h1c-kepuasan-rakyat-terhadap-kinerja-sby-terus-menurun> pada 20 november 2011, pk.07.56.

<sup>21</sup> “Pidato Presiden SBY dalam Insiden Pulau Bintan”. Agustus 2010. diakses dari <http://www.sbypresidenku.com/content/politik> pada 3 Januari 2011, pk.11.10.

<sup>22</sup>“Diplomasi SBY Soal TKI Paling Lemah” diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/11/20/10170421/Diplomasi.SBY.soalTKI.Paling.Lemah>, pada 2 maret 2012, pk.10.44.

sekarang menentang konsep *legally binding* dan standar perlindungan pekerja migran ilegal berdasarkan hak asasi manusia.

Kontroversi senantiasa terjadi terkait persoalan penyelesaian batas wilayah dengan negara tetangga Indonesia. Diplomasi yang belum selesai juga terlihat dari kasus perundingan perbatasan dalam konteks *Joint Ministerial Committee* 6 september 2011 di Kinibalu. Perundingan tersebut membahas soal empat segmen wilayah perbatasan yang sampai sekarang masih dipersengketakan kedua negara, seperti Segmen Selat Malaka, Selat Singapura, Laut China Selatan, dan Laut Sulawesi. Menurut Marty Natalegawa, proses perundingan adalah suatu proses yang panjang. Jika mengacu pada perundingan antara Indonesia dan negara lain, seperti Singapura dan Vietnam, prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama, masing-masing lima dan 32 tahun.

Sedangkan keberpihakan yang ambivalen juga terindikasi dalam kebijakan luar negeri presiden SBY di wilayah timur-tengah. Mengutip pernyataan John Esposito, maka politik dan agama dalam kasus timur tengah ibarat dua sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan secara tegas.<sup>23</sup> Karena terlanjur menjadi paradigma umum, maka suatu kesadaran bahwa konflik yang terjadi antar negara di timur tengah sejatinya adalah semata-mata kepentingan politis akan sulit untuk dipercaya. Dalam sejarahnya Muhammad Natsir melalui karyanya “Kapita Selekta” merupakan tokoh yang piawai dalam mendorong keterlibatan aktif Indonesia dalam forum Internasional. Namun jika kita komparasikan dengan *million friends zero enemy*, pemikiran natsir juga menekankan semangat Islam yang demokratis dan tanpa kekerasan yang hal tersebut beliau implementasikan ketika mengembangkan Masyumi.

Persepsi macam inilah yang kemudian menjadi dilema bagi implementasi kebijakan luar negeri Indonesia di wilayah Timur tengah. Hal tersebut karena kata timur tengah sendiri seringkali penuh dengan nuansa agama meskipun kata timur-tengah sejatinya dimaksudkan sebagai sebutan untuk region diluar eropa. Apalagi korelasi antara Islam dan Indonesia merupakan aspek yang sulit untuk disangkal ditambah lagi dengan eksistensi status sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga cukup sulit untuk meyakini bahwa konflik di timur-

<sup>23</sup> John Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?*, (New York : Oxford University Press, 1995).

tengah adalah semata-mata politis, sehingga selalu muncul semacam imajinasi ideal mengenai peran Indonesia dalam kawasan ini. Akan tetapi sejarah mencatat bahwa dalam implementasinya, kebijakan luar negeri Indonesia dalam region timur tengah seringkali bersifat pragmatis dengan tidak secara lugas berani mengakuisisi nama Islam dalam menjalin relasi dengan Timur-tengah.

Ambiguitas dalam kebijakan luar negeri presiden SBY mengembalikan perdebatan klasik antara agama dan negara. Idealnya, negara tidaklah memiliki otoritas untuk mencampuri ataupun mengintervensi urusan agama. Namun, upaya untuk memisahkan secara tegas antara agama dan kebijakan luar negeri dalam wilayah timur tengah yang penuh dengan nuansa agama justru akan berkonsekuensi pada dilematisnya posisi Indonesia. Apalagi seiring dengan adanya diskursus *war on terror* yang semakin menuntut keberpihakan Indonesia ditengah barat dan Islam. Sebaliknya, pilihan menerapkan solidaritas Islam juga menjadi tidak mudah karena disisi lain Indonesia menganut suatu prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif.

Terlepas dari tendensi keberpihakan tersebut, yang menarik adalah fenomena tersebut lebih menunjukkan kesesuaian antara pencitraan presiden SBY dengan diplomasi Indonesia terutama ketika mempromosikan Islam yang moderat. Presiden SBY rutin mempromosikan Islam moderat dalam beberapa konferensi seperti *Global Interfaith Dialogue*, KTT OKI dan Gerakan Non Blok dimana senantiasa dikaitkan dengan keberhasilan pemilu 2004. Serangkaian pidato tersebut secara implisit hendak menunjukkan sosok Presiden SBY sebagai seorang Islamis yang tidak barat-baratan, namun juga tidak anti terhadap barat lewat *platform* nasionalis-religius partai Demokrat.<sup>24</sup> Pencitraan sosok muslim moderat juga terlihat jika menyimak tata cara presiden SBY berpidato pada KTT-ASEAN 2011 di Jakarta, *Bali Democracy Forum*, ataupun G-20-Swiss yang selalu dimulai dengan ucapan assalamualaikum untuk menunjukkan penekanan keislaman beliau. Dengan demikian, maka subabb selanjutnya akan mengelaborasi lebih lanjut bagaimana kesamaan karakteristik tersebut terjadi, dan apa tujuan dibalik pencitraan.

<sup>24</sup>Lingkaran Survey Indonesia, "Tumbuhnya muslim demokrat", Juni 2006, diakses dari <http://www.lsi.co.id/artikel.php?id=220> pada 13 desember 2011, pk.05.34.

### 2.3 *Million Friends Zero Enemy* dan Problem Pencitraan

Ditengah segala problematika yang mengiringitata kelola *million friends zero enemy*, sikap kritis mengenai urgensi slogan tersebut pun bermunculan. Banyak opsi jawaban yang disediakan oleh level analisis guna menjawab logika apa yang melatarbelakangi. Perdebatan tidak bisa dihindari ketika observasi sesaat lebih menekankan ideosinkretik presiden SBY. Sedangkan Level analisis makro menekankan perubahan struktur internasional yang dilukiskan sebagai *turbulent ocean*. Namun Jika dikaitkan dengan penjelasan pada bab sebelumnya, maka logika kebijakan ini perlu ditelusuri dengan menggunakan level analisis kolaborasi dimana media juga memainkan peran. Data mengenai pengaruh media diperlukan guna mengelaborasi bahwa kebijakan luar negeri *zero enemy* merupakan konsekuensi dari pencitraan sebagai respon atas liberalisasi informasi.

Pertanyaan muncul guna mempertanyakan apa urgensi pemerintah untuk melakukan pencitraan dalam kebijakan luar negeri. Sebagaimana kita ketahui dalam literatur perperspektif kebijakan luar negeri, pencitraan dianggap hanya merupakan aspek sekunder dalam hubungan internasional. Kaum Realis menjelaskan jika kepentingan nasional tidak lain sebagai tujuan utama dari kebijakan luar negeri, bahkan ketika harus mengorbankan citra sekalipun. Selain itu, juga terdapat dilema analisis dalam menentukan apakah pencitraan ini untuk keluar atau kedalam negeri. Untuk itulah guna melacak tujuan dan fokus dari pencitraan tersebut, maka perlu dikaji ulang bagaimana dan dalam konteks apa pencitraan tersebut diimplementasikan.

Untuk menggali lebih dalam implementasi *million friends zero enemy* didalam era informasi, peneliti perlu mendapat keterangan langsung dengan dengan subyek pelaku. Peneliti telah melakukan wawancara dengan bapak Priyatna Alibasya yang menjabat sebagai direktur informasi dan media Kementerian Luar Negeri. Bapak Priyatna menjelaskan jika departemen luar negeri merupakan *agent of change* dalam era keterbukaan informasi di Indonesia. Oleh karena itulah, departemen luar negeri tidak akan pernah menjadi institusi yang tertutup, bahkan pada era orde baru yang tertutup sekalipun, kementerian luar negeri telah menjalin keterbukaan dengan Media. Pengaruh perkembangan informasi menurut bapak Priyatna semakin signifikan dalam kebijakan luar negeri kontemporer,

namun deparlemen luar negeri tetap tidak harus terprovokasi dengan setiap pemberitaan dan selalu perlu untuk menyelidiki informasi lebih dahulu. Terkait dengan slogan *million friends zero enemy* tersebut, pak Priyatna menjelaskan slogan tersebut hanya merupakan sebuah simbolisasi untuk menampilkan sosok Indonesia sebagai negara yang bersahabat.

Lebih lanjut, Priyatna menjelaskan ide mengenai slogan tersebut muncul dalam era presiden SBY kali kedua. Dan presiden SBY tidak lain merupakan figur yang menggagas sekaligus secara intensif mensosialisasikan semboyan tersebut. Bapak Priyatna menjelaskan jika slogan tersebut tidak lebih dari sekedar *brand* demi menjalin persahabatan dengan berbagai entitas. Beliau berpandangan baik slogan *thousand friends zero enemy* dan *million friends zero enemy* dipakai secara bersamaan sekilpun presiden SBY telah menentukan *Million friends*. Dengan kata lain, beliau secara tidak langsung menekankan jika Indonesia perlu menetralkan kesan dan persepsi dalam menjalin relasi dengan internasional. Berikut ini merupakan kutipan hasil wawancara dengan bapak Priyatna.

“kesan sebagai negara yang bersahabat menjadi penting untuk kita manfaatkan demi kepentingan kita”<sup>25</sup>

Tidak semua kebijakan luar negeri Indonesia merupakan hasil gagasan presiden SBY. Namun dalam penjelasan sebelumnya secara generalisasi terlihat adanya kesejajaran antara karakter personal presiden SBY yang merasuki kebijakan luar negeri Indonesia. Peneliti memandang perlu refleksi historis pemilu 2004 untuk melacak kesesuaian antara citra personal presiden dan slogan tersebut. Dari ulasan sekilas tentang modal simbolik SBY, maka dapat dilihat indikator kuatnya legitimasi Citra SBY pada awal pemerintahannya. Kondisi pada awal terpilihnya presiden SBY secara langsung berkaitan dengan tata kelola diplomasinya. Interrelasi tersebut dapat dilihat dalam suatu konteks isu besar di Indonesia pada masa pemerintahan 2004 yakni terorisme. Apalagi status SBY sebagai mantan menkopolhukam yang dirasa berpengalaman dalam menangani terorisme. Dari survey Indobarometer tahun 2007 dapat disimak bagaimana terorisme menjadi ketakutan masyarakat yang utama dengan 58 persen jika

<sup>25</sup> Wawancara dengan Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, 3 Mei 2012.

dibandingkan dengan isu perbatasan ataupun melindungi pulau terluar yang hanya tiga puluh persen. Indobarometer 2007 justru memperlihatkan mayoritas umat Islam memandang toleransi penting dengan suara 57 persen.<sup>26</sup>

Dengan kata lain, slogan *Million friends zero enemy* telah terrefleksikan presiden SBY ketika presiden memenangkan perpolitikan domestik. Namun sejauh mana presiden benar-benar moderat, ternyata memunculkan banyak skeptisisme, dimana presiden SBY terkesan kurang berpihak pada golongan Islam radikal. Namun penjelasan sebelumnya telah menjawab dimana permusuhan presiden pada Islam radikal adalah paling aman secara pencitraan, sekalipun inkonsistensi dengan *zero enemy*. Hal serupa dalam kasus Israel juga menunjukkan presiden SBY tidak seratus persentidak punya musuh. Inilah yang mendorong Presiden SBY tampil sebagai sosok Islamis, yang bukan Islam radikal, melainkan muslim moderat yang juga memberantas terorisme. Implikasinya citra tersebut kemudian dikejawantahkan melalui simbolisasi nasionalis-religius partai demokrat yang kemudian mendasari promosi nilai Islam Moderat ke luar negeri.

Citra *million friends zero enemy* senada dengan politik citra SBY yang berupaya menonjolkan sikap non-konfrontatif dalam konstelasi pemilu 2004. Popularitas citra SBY berkembang disaat Megawati berseteru dengan Gus Dur ataupun Amin Rais sebagai penggagas reformasi yang dianggap lawan Wiranto sebagai jenderal orde baru. Tim marketing politik SBY menjelaskan bahwa kemenangan SBY merupakan kemenangan politik santun karena masyarakat kurang suka terhadap politik konfrontatif dan agresif. Sekalipun peneliti tidak menemukan survei opini publik yang secara spesifik membuktikan kesantunan menjadi citra pendongkrak elektabilitas, namun dalam penjelasan selanjutnya akan dieksplorasi tentang kontestasi kronologi citra kesantunan tersebut. Berikut ini adalah sekilas cuplikan pidato presiden SBY yang bagi peneliti memiliki relasi dengan kebijakan luar negeri.

“Jadi sebagai seorang kesaria, tidak elok, kurang santun kiranya bertindak membalas tindakan-tindakan kurang terpuji yang dilakukan lawan“.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Indobarometer. “Hasil Survey Perilaku Memilih dalam Pemilu 2004”. April 2005.

<sup>27</sup> Hermanto, “Politik Santun Kunci Kemenangan SBY”. 2 September 2009. Diakses dari <<http://www.sbypresidenku.com/php67/45/content/files>, pada 3 maret 2012, pk 07.48.



Pernyataan yang dimainkan sebagai pencitraan domestik ini menjadi sampel dalam melihat *style* diplomasi presiden SBY secara umum. Bahkan ternyata statement yang bernada kurang asertif ini memiliki relasi dengan sikap pemerintah dalam menangani kasus kedaulatan dan TKI dengan Malaysia. Ungkapan kerpihhatian sebagaimana yang beliau praktikkan dalam kancan domestik acapkali mengiringi pernyataan presiden SBY saat melangsungkan konferensi pers terhadap kasus ini. Berikut ini merupakan contoh sampel pernyataan presiden SBY saat melangsungkan konferensi pers terkait insiden pulau Bintan september 2010.

“Terhadap insiden ini, kita semua sangat prihatin, dan saya ingin agar masalah ini segera di selesaikan secara tuntas, dengan mengutamakan langkah-langkah diplomasi”.<sup>28</sup>

Ungkapan presiden SBY tersebut sekaligus menguji asumsi teoritik pendahuluan yang melihat adanya beban citra dalam negeri. Sebuah beban yang menjadi habit dalam implementasi kebijakan luar negeri. Alasan keselamatan TKI yang dikemukakan pemerintah untuk melegitimasi sikap non konfrontasi perlu dipertanyakan kembali. Justru ketika pemerintah terlalu serius menyajikan sosok sebagai negara dengan *zero enemy*, maka keselamatan TKI senantiasa terancam. Maka dari itu, pencitraan merupakan alasan yang lebih terlihat jika dibandingkan keselamatan TKI. Pencitraan telah menjadi semacam merk yang terlanjur menemukan segmentasi pasarnya dan melekat sehingga terus mengikuti langkah presiden SBY. Sehingga pemerintah selalu mengutamakan konsistensi atas citra meskipun justru dapat membelenggu adanya terobosan kebijakan yang perlu dalam mengarungi dinamisitas samudra bergejolak.

Hemat penulis, diplomasi merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan perosalan dan bukan ganyang Malaysia. Namun diplomasi yang dimaksudkan disini adalah diplomasi yang tuntas dalam menyelesaikan perkara secara tegas dan jelas. Diplomasi yang diharapkan cepat menyelesaikan masalah terhambat saat dihadapkan pada dualisme antara citra dan kontroversi yang dialami presiden

<sup>28</sup> “Pidato Presiden SBY dalam Insiden Pulau Bintan”, 1 September 2010, diakses dari . <<http://www.presidentri.go.id/content/politik>>, pada 3 Januari 2012, pk.08.44.

SBY. Kondisi tersebut dalam perkembangannya menjadi dilema. Pencitraan presiden SBY nyatanya bukan strategi kampanye yang selesai begitu saja setelah beliau terpilih menjadi presiden. Namun, pencitraan dalam perkembangannya menjadi tata kelola sehari-hari demi mempertahankan reputasi sebagai sosok non konfrontatif yang terlanjur melekat. Namun pesimisme publik mengenai efektifitas diplomasi dengan memilih cara kekerasan juga tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan. Hal tersebut karena diplomasi yang dilakukan pemerintah butuh waktu yang sangat lama sehingga rentan kontroversi. Bahkan secara tidak langsung, menteri Natalegawa menyadari diplomasi tidak bisa segera menyelesaikan masalah melalui kutipan berikut.

Proses perundingan tidak bisa selesai dalam sehari. Namun, hal itu harus tetap kita lakukan dengan serius dan dipersiapkan dengan baik. Kami sudah menyiapkan tim yang kuat dari departemen terkait untuk maju ke meja perundingan dengan juru rundingnya dari Kementerian Luar Negeri.<sup>29</sup>

Dengan demikian, maka semboyan *million friends zero enemy* merupakan sebuah aksesoris yang ditujukan untuk pencitraan. Sebuah aksesoris yang secara intensif hadir menghiasi kebijakan luar negeri Indonesia. Tentu pertanyaan pun muncul, mengapa citra tersebut menjadi penting sehingga harus senantiasa dikenakan. Akan lahir sebuah analisis lebih mendalam ketika kita memandang aksesoris tersebut bukan sekedar sebuah aksesoris, melainkan sebagai sesuatu yang lebih sakral. Dengan kata lain, analisis melalui kalung memungkinkan untuk meninjau lebih dalam kepercayaan apa yang diyakini oleh sang pemakai. Dengan demikian, pemakaian simbol tersebut mengisyaratkan sebuah ritual/symbolisasi yang merupakan refleksi dari sebuah keyakinan yang dianut. Keyakinan diplomasi Indonesia adalah percaya hidup dalam dunia yang *paradox of plenty*. Perspektif *paradox of plenty* inilah yang menjadi kata kunci untuk melacak aspek yang mendasari keyakinan pemerintah yang bahkan telah diakui sendiri melalui *statement* pemerintah. Pencitraan yang dilakukan dengan pemakaian kalung *million friends zero enemy*, tidak lain sebuah mantra untuk terhindar dari marabahaya kontroversi dalam era *paradox of plenty*.

<sup>29</sup> "Jangan Berharap Tinggi", *Kompas Online*, 4 September 2010. diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2010/09/04/03405099/>, pada 2 Februari 2012, pk.18.45.

## 2.4 Paradigma Pemerintah Indonesia

Bab sebelumnya secara eksplisit memberikan pengantar mengenai perlunya peneliti untuk melacak seberapa pentingkah informasi dalam artikulasi kebijakan luar negeri Indonesia. Sebagaimana asumsi selama ini yang melihat bahwa kebijakan luar negeri merupakan kebijakan elitis, maka teknologi informasi menjadi kajian yang otomatis dipinggirkan dalam *foreign policy analysis*. Namun sepakat atau tidak sepakat sektor informasi memainkan peranan krusial dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang. Tanpa disadari, urgensi era informasi dalam mempengaruhi kebijakan sejatinya juga mendapat pengakuan implisit dari Menlu Marty Natalegawa melalui kutipan saat melakukan konferensi pers berikut ini.

“Mengenai informasi, tandanya kita bekerja di dunia yang *paradox of plenty*, jadi bukannya kekurangan informasi, yang kita hadapi adalah banyaknya informasi, jadi sekarang adalah bagaimana Kemlu dalam mengambil keputusan mengabsorb berbagai sumber informasi, mana informasi yang betul-betul relevan, dan mana yang tidak. Dari aspek pembuatan kebijakan saja sudah sangat membawa dampak besar. Selain itu, dalam arti dissemination [penyebaran wacana], menyebarkan kinerjanya harus bersaing dengan banyak informasi-informasi yang sedemikian banyaknya, bagaimana kita bisa memperoleh kepedulian dari khalayak ramai di tengah banyaknya sumber masalah-masalah yang harus ditekuni dan difokuskan, *to make ourselves to stand out in a good way*. Inilah tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa menyebarkan informasi secara baik. Itu baru faktor kuantitas. Faktor lain adalah faktor kualitasnya, dalam arti kata sekarang semua serba real time. Dengan konsep Facebook, Twitter, itu berarti sesuatu yang terjadi di suatu belahan dunia pada saat yang sama diketahui bahkan bisa dipantau oleh khalayak ramai, semua serba instan”.<sup>30</sup>

Ungkapan Marty Natalegawa diatas memberikan kata kunci adanya indikasi nuansa pemikiran neoliberal institusionalisme dibalik semboyan *one thousand friends zero enemy*. Marty Natalegawa mengutip teori Joseph Nye yang menyebut era informasi sebagai *paradox of plenty*.<sup>31</sup> Karakteristik paradoks informastisasi dapat diuraikan dalam empat hal penting, yaitu: pertama, perlu untuk mengetahui persepsi dan sikap publik global terhadap suatu negara tertentu

<sup>30</sup> Renne R.A Kawilarang, Harriska Farida Adiat, “Indonesia Hindari Diplomasi marah-marah”, 14 juni 2010, diakses dari <http://analisis.vivanews.com/news/read/160062-indonesia-hindari-diplomasi-marah-marah>, pada 2 februari 2011, pk.06.55.

<sup>31</sup> Joseph Nye. *Loc.cit*.

mengingat pasca Perang Dingin banyak terjadi realiansi politik dan ekonomi. Kedua, Transparansi media komunikasi membuat kelompok sasaran tidak terbatas pada satu negara saja, tapi berada pada tataran global. Ketiga, menurunnya kredibilitas pesan yang ada dalam proses diplomasi publik. Masyarakat cenderung mempersepsikan apa yang dikomunikasikan oleh pemerintah sebagai bentuk propaganda. Yang terakhir, muncul banyak saluran komunikasi yang membutuhkan peninjauan ulang terhadap model komunikasi apa yang mesti digunakan. Dengan demikian Kepercayaan Menlu atas *paradox of plenty* menjadi kata kunci untuk menelaah logika neoliberalisme dalam pencitraan.<sup>32</sup>

Menata kelolakebijakan luar negeri dalam era liberalisasi informasi yang paradoks membutuhkan kelihaihan khusus. Menurut Menlu, diplomat bukan sekedar harus melek informasi, namun lebih jauh diplomat adalah aparat yang mampu mengolah informasi, sebaliknya bukan informasi yang mengolah diplomasi. Dengan demikian, maka apa yang disampaikan Menlu Natalegawa akan diplomat harus melek informasi menunjukkan signifikansinya informasi dalam artikulasi kebijakan luar negeri. Seperti yang dikatakan oleh Mantan Menlu AS, George Shultz, bahwa bahan baku diplomasi adalah informasi, yakni bagaimana memperolehnya, menganalisis, dan menempatkannya dalam sistem.

Indikasi adanya paradigma neoliberal Institusionalisme dalam kebijakan luar negeri Indonesia juga dapat ditelusuri melalui pernyataan presiden SBY. Sebagaimana yang telah dijelaskan, Presiden SBY diawal pemerintahannya mengemukakan suatu prinsip "*navigating a turbulent ocean*". Pernyataan tersebut sejatinya menunjukkan bahwa Presiden SBY dan Mentri Natalegawa mempercayai Indonesia sedang berada dalam konteks zaman yang inheren dengan apa yang disebut Nye sebagai *paradox of plenty*.<sup>33</sup> Joseph Nye mendasari analisisnya pada struktur internasional yang berubah. Kebijakan luar negeri dipandang sebagai instrumen pragmatis dimana kerjasama tidak lagi bisa dihindari dalam dunia yang sukar diprediksi. Kerjasama menjadi instrumen perwujudan kepentingan nasional yang strategis dibandingkan sikap konfrontatif. Berikut ini

<sup>32</sup> Marty Natalegawa, "Jakarta menjadi salah satu diplomatic capital bagi kawasan asia timur" dalam, 19 maret 2012. Dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/component/content/article/154-4-article-maret-2012/1356-jakarta-menjadi-salah-satu-diplomatic-capital-bagi-kawasan-asia-timur.html>, pada 27 maret 2012, pk.06.39.

<sup>33</sup> Joseph Nye, 2006. *Op cit*.

dapat disimak ulasan pernyataan pemerintah saat memperingati ulang tahun RI ke 65 agustus 2010 yang mana juga terindikasi mengedepankan nilai neoliberal institusionalisme.

Waktu itulah saya tawarkan, atas apa yang kita lakukan sekarang ini, kita "*navigating in the turbulent ocean*". Ocean di sini adalah *turbulent world* yang terus dinamis, terus menghadirkan tantangan-tantangan dan permasalahan-permasalahan baru. Tentu lebih kompleks, memerlukan navigation skills yang lebih bagus dari kita semua, dari *policy makers* dan dari semua diplomat yang mengemban tugas di berbagai belahan bumi ini.<sup>34</sup>

Kutipan pernyataan dari kedua figur yang krusial dalam kebijakan luar negeri Indonesia tersebut tentu tidak bisa dikesampingkan. Neoliberal institusionalisme dapat berfungsi sebagai pembacaan terhadap pemikiran yang dianut pemerintah Indonesia. Ditinjau secara teoritik, pemikiran neoliberalisme institusionalisme mengasumsikan bahwa negara tidak lagi bersifat independen dalam dunia yang kompleks. Namun kepercayaan pada dunia yang "kompleks" sebagaimana asumsi Joseph Nye justru membuat kebijakan luar negeri Indonesia terkesan penuh kekhawatiran. Wajar kiranya jika kebijakan luar negeri Indonesia sangat jauh dari sikap asertif karena aparat kebijakan mengadopsi prinsip *friendly state* yang berasal dari mahzab neoliberal. Pandangan neoliberal institusionalisme tersebut juga secara tidak langsung membelenggu pemerintah untuk berani mengambil sebuah resiko terobosan.

Ketidakleluasaan kebijakan luar negeri tersebut perlu ditelaah pola dan mekanismenya lebih lanjut. Analogi menarik jika kita komparasikan pencitraan kebijakan luar negeri Indonesia seperti halnya *marketing communication* dalam perusahaan. Analogi tersebut menjadi penting untuk melacak yang membedakan antara pencitraan dalam kebijakan luar negeri dengan diplomasi publik. Dengan kata lain, *million friends zero enemy* boleh dikatakan semacam iklan untuk menanamkan persepsi pada publik guna menjaga citra perusahaan. Pencitraan dilakukan dalam rangka *self advocacy* sebagaimana yang dilakukan oleh *public relation*, sehingga tidaklah bersifat dialogis. Tak ayal, Kebijakan luar negeri dan

<sup>34</sup> "Pidato peringatan HUT Republik Indonesia ke 65". 18 Agustus 2010. Diakses dari <<http://www.setkab.go.id/index.php?pg=detailartikel&p=3666>, pada 3 maret 2012, pk.08.44.

isu internasional diasumsikan sebagai komoditas dalam era informasi. Bahkan Pernyataan mengenai pentingnya pencitraan dalam era informasi diakui sendiri oleh Menteri Marty Natalegawa sbb

“Kita harus senantiasa menjaga citra dan jatidiri kita sebagai bangsa yang bermartabat dalam menjalin hubungan internasional, tanpa kehilangan prinsip dasar politik luar negeri yang bebas dan aktif, dan yang diabdikan untuk kepentingan bangsa kita.”<sup>35</sup>

Sedangkan diplomasi publik mempunyai pengertian sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara terhadap publik sendiri maupun masyarakat internasional untuk memperbaiki citra yang negatif kearah yang positif. Jay Wang melihat diplomasi publik sebagai usaha untuk mempertinggi mutu komunikasi antara negara dengan masyarakat yang dalam pelaksanaannya tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah.<sup>36</sup> Semisal, citra buruk yang diperoleh pemerintah Amerika dari kebijakan luar negerinya ke Timur Tengah terkait dengan munculnya istilah standar ganda, serta akibat yang dialami seperti diserangnya berbagai fasilitas, properti dan peralatan serta personil militer Amerika oleh “teroris” sampai pada runtuhnya gedung WTC September 2001, mendorong munculnya gagasan untuk memperbaiki citra tersebut.

Meskipun diplomasi publik mempunyai dua arah yaitu publik dalam negeri serta publik internasional, yang lebih terkait dengan hubungan internasional adalah yang kedua. Sebagaimana Pada saat Presiden Bush berpidato mengucapkan kalimat yang kemudian diralat bahwa Amerika sedang mengalami “*crusade*” alias perang salib. Kekeliruan inilah yang kemudian diperbaiki dengan berbagai cara termasuk pernyataan Amerika tidak memusuhi Islam, penerbitan berbagai media yang menggambarkan bahwa umat Islam dilindungi di AS. Informasi tentang Islam di Amerika atau kehidupan beragama di AS disebarluaskan melalui USIS (*United States Information Service*) ke negara-negara yang berkomunitas Muslim berupa film atau buku dan program-program TV seperti VOA (*Voice of America*). Analisis Informasi merupakan mekanisme

<sup>35</sup> Renne Kawilarang, “Indonesia Hindari Diplomasi marah-marah” dalam <http://analisis.vivanews.com/news/read/160062-indonesia-hindari-diplomasi-marah-marah>, diakses 12 maret 2012, pk.12.55.

<sup>36</sup> Jay Wang, “Public Diplomacy and Global Business”. *The Journal of Business Strategy* 27:3, (2006), 22 Januari 2008 p. 49-58. <http://proquest.umi.com/>, pk.22.22.

yang diperlukan dalam *paradox of plenty*, berikut merupakan kutipan Menteri luar negeri tentang perlunya diplomat memahami informasi.

Diplomat di era kontemporer seperti saat ini haruslah melek informasi. Tantangan yang dihadapi oleh diplomat bukan lagi keterbatasan Informasi, melainkan '*paradox of plenty*'. Untuk itu, diplomat diharapkan mampu mengidentifikasi informasi yang relevan dan mendiseminasikannya secara baik dan tepat kepada seluruh pihak terkait.<sup>37</sup>

Menganalisis eksistensi Pencitraan dalam kaitanya dengan pemikiran neoliberal institusionalisme memiliki problem level analisis. Hal tersebut karena neoliberal institusionalisme merupakan pemikiran yang menekankan analisis pada level struktur internasional. Nye mengutip Kenneth Waltz bahwa kebijakan luar negeri merupakan obyek dari sistem, sehingga alur logikanya adalah *outside in*. Sebaliknya pencitraan lebih merupakan kontradiksi dari kondisi politik dalam negeri yang diprakondisikan oleh citra presiden SBY. Dengan kata lain pencitraan menggunakan pola analisis *inside out*.

Sejak awal telah ditekankan jika penelitian ini lebih menekankan pada level analisis media dan informasi. Sehingga sedikit sukar meyakini jika prinsip *zero enemy* merupakan ideosinkretik presiden SBY. Ideosinkretik mengangankan adanya pemikiran asli dari figur pemimpin yang memiliki andil besar dalam perumusan kebijakan luar negeri. Namun sebagai pemimpin sebuah negara, pemikiran asli merupakan konsep yang problematis untuk diuji eksistensinya secara empirik. Hal tersebut karena tentu ada perbedaan antara karakter original seseorang dan karakter ketika seseorang berperan sebagai presiden. Dengan kata lain ideosinkretik tidak akan pernah seelusage sebagaimana yang diungkapkan oleh Rosenau. Slogan *zero enemy* lahir akibat adanya dorongan aspek struktural *paradox of plenty*, dan bukan kehendak sepenuhnya dari figur tertentu. Dengan demikian ideosinkretik lebih merupakan produk dari lingkungan, ketimbang originalitas dari pemikiran.

Sekalipun kebijakan luar negeri Indonesia tidak hanya dirumuskan oleh seorang presiden SBY semata, namun terlihat secara kuantitas manifestasi slogan

<sup>37</sup> "Menlu Marty M. Natalegawa membuka Diklat Internasional ke-9 Sisdilu dan Sespardu di Gedung Pancasila". 10 April 2012. Diakses Dari [http://www.kemlu.go.id/\\_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemID=ad15ef98-529d-4923-86ca-b8c2d55d5f94](http://www.kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemID=ad15ef98-529d-4923-86ca-b8c2d55d5f94), pada 25 april 2012, pk.21.21.



banyak diperankan oleh figur presiden. Hadirnya dominasi presiden bukanlah barang baru di Indonesia dimana implementasi bebas aktif dalam perkembangan sejarahnya tidak bisa dengan mudahnya dipisahkan dari turunan dari karakter sang presiden. Semisal dalam era Sukarno yang mana implementasi bebas aktif dikejawantahkan dalam upaya dalam memerangi imperialisme. Namun yang membedakan, langkah diplomatik yang diambil pemerintahan SBY menunjukkan sikap keragu-raguan dan tidak asertif.<sup>38</sup>Terlebih lagi, tata kelola pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi kontroversi acapkali sebatas dilakukan dengan sebuah retorika yang mengaburkan keberpihakan. Jika dianalisis lebih lanjut, pencitraan merefleksikan ketergantungan yang sangat atas retorika. Apalagi dipadu dengan gaya bahasa yang pada umumnya digunakan oleh institusi swasta *profit oriented*, seperti halnya *public relation*.

Dari banyak kasus sensitif yang telah dikronologikan, mulai kasus penganiyaaan TKIsampai dengan masalah kedaulatan, terlihat bahwa *Zero enemy* berupaya untuk mempertahankan reputasi pemerintahan ditengah kontroversi yang muncul. Perlu diingat, kasus Manohara dan krisis Ambalat berlangsung kontroversi dalam nuansa pemilu presiden, tepatnya pada bulan juni 2009. Tetapi, justru hasil pemilu kembali memunculkan presiden SBY sebagai pemenang pemilu presiden hanya dalam satu putaran dengan suara yang signifikan. Kokohnya kekuatan citra dan terpilihnya kembali SBY merupakan salah satu contoh kekuatan citra meskipun kasus Malaysia merupakan kasus yang sensitif dan punya konsekuensi politis.<sup>39</sup>Maka dari itu, prinsip *zero enemy* ketika diartikulasikan oleh presiden SBY bukanlah merefleksikan sebuah sikap “lunak” sepenuhnya. Dalam suatu kasus tertentu, apalagi berkaitan dengan isu yang politis, presiden SBY juga tidak jarang menunjukkan balasan dan pernyataan keras. Meskipun balasan tersebut tidak signifikan dalam mempengaruhi lawanya, namun upaya tersebut signifikan secara pencitraan.

Oleh karena itulah, pada subbab selanjutnya akan lebih menjelaskan alur pola dari pencitraan dan bagaimana kaitanya dengan sistem Internasional. Yang

<sup>38</sup> Riza Noer Arfani., “Diplomasi Paras Tinggi Untuk Indonesia”. 2008. dalam <http://www.ire.php.view sss//=2346.Htm>, diakses 30 oktober 2009, pk.20.45.

<sup>39</sup> Lingkaran Survey Indonesia. Negara Tetangga Yang Paling Mengancam”, diakses dari <http://www.lsi.or.id/riset/40/negara-tetangga-yang-paling-mengancam>, 23 Januari 2010, pk.21.34

terjadi dalam konteks keindonesiaan, Hibrida antara sektor informasi dan pasar bebas menjelma menjadi semacam struktur yang kemudian dikenal masyarakat sebagai marketing politik. Metode kualitatif akan dipakai guna memahami secara mendalam pencitraan yang dalam penelitian ini diasumsikan sebagai implikasi lanjutan dari neoliberalisme dan bagaimana dampaknya dengan kebijakan.

### **2.5 *Million Friend Zero Enemy*: Mengarungi Turbulensi dengan Pencitraan**

Pencitraan dan kontroversi adalah dua sisi mata uang. Kembali pada skema yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan jika kontroversi tidak kunjung selesai tetapi malah bereproduksi secara kontinyu. Oleh karena itulah, pencitraan yang dilakukan oleh presiden SBY dilakukan bukan tanpa resiko dimana pencitraan justru menjadi beban. Merujuk pada judul subbab diatas, misteri mengenai simbolisasi *million friends zero enemy* sedikit demi sedikit telah terurai dimana pencitraan menjadi strategi propaganda ditengah turbulensi. Dengan demikian, subbab pembahasan ini dikemas guna mengurai secara konkrit bagaimana skema kontradiksi antara pencitraan dan turbulensi isu.

Serangan terhadap sikap diplomasi Indonesia melatarbelakangi presiden SBY untuk tidak bersikap abai terhadap isu luar negeri, terutama dalam kasus sensitif. Salah satu sampel perlunya respon sesegera mungkin terefleksikan melalui apa yang diutarakan presiden SBY di media massa 2 juni 2009. SBY mengisyaratkan bahwa perang bukan tidak mungkin tidak terjadi jika diplomasi dengan Malaysia gagal. Tentu sikap ini menjadi contoh kasus partikular yang unik untuk menganalisa apa dibalik sikap ketegasan SBY. Namun satu variabel lainnya yang perlu kita perhatikan adalah konflik tersebut terjadi dalam nuansa pemilu presiden 2009. Dengan demikian terbesit sebuah harapan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia berpotensi dapat menjadi asertif ketika dihadapkan dalam pertarungan diskursif pemilu presiden yang berkaitan dengan reputasi pemerintah, sebagaimana yang tertuang dalam kutipan berikut.

Apa yang diklaim Malaysia tidak bisa kita terima, Sejengkal wilayah laut pun kalau itu milik kita harus kita pertahankan, tidak ada kompromi.<sup>40</sup>

Tidak dapat dipungkiri, isu luar negeri dalam momentum ajang pemilu menjadi salah satu komoditas penting. Kampanye kritis kemudian dilakukan para lawan SBY- Budiono semisal yang dilakukan pasangan JK-Wiranto termasuk pasangan Prabowo dan Megawati guna mengangkat isu kelemahan pertahanan Indonesia yang dianggap lemah. Namun ternyata serangan tersebut kurang berhasil meskipun keduanya tampil dengan solusi pertahanan yang menunjukkan urgensi pergantian pemerintahan lama demi martabat bangsa. Argumentasi adanya kelebekan presiden SBY menyikapi Malaysia dan Australia yang semula diprediksi menjadi pemicu turunya popularitas SBY ternyata tidak berhasil. Dalam realitanya, SBY dan Budiono tetap terpilih menjadi capres dan cawapres Indonesia 2009-2014, bahkan satu putaran dengan suara signifikan.

Secara politik, pencitraan yang termuat dari ungkapan pidato tersebut signifikan pengaruhnya dalam menjaga kontroversi publik. Ungkapan tersebut dikemukakan SBY sebagai anitesis dari wacana yang mengasumsikan pemerintah melakukan pembiaran dan ketidaktegasan adanya ancaman terhadap kedaulatan. Contoh diatas merupakan kutipan pidato SBY ketika melangsungkan rapat bersama menkopolhukan Widodo AS pada 3 juni 2009.<sup>41</sup> Ungkapan presiden tersebut setidaknya membuktikan bahwa bukan berarti Indonesia tidak berani bersikap asertif atas Malaysia. Apalagi asumsi yang menyatakan presiden SBY hanya melakukan upaya kooperatif terus-menerus tanpa membuahkan hasil. Kementerian luar negeri juga menambahkan dengan memunculkan kebijakan mengirimkan tiga belas nota protes diplomatik yang telah dikirimkan ke pemerintah Malaysia. Nota protes dianggap deplu bukanlah cara yang lembek, melainkan ungkapan yang menunjukkan ketegasan dan kekecewaan Indonesia atas Malaysia.

<sup>40</sup> Anwar Khumaini. "Perang Adalah Jalan Terakhir". 2 Juni 2009. Diakses dari <http://www.detiknews.com/read/2009/06/02/183146/1141643/10/sby-perang-adalah-jalan-terakhir> pada 4 April 2012, pk.21.45.

<sup>41</sup> Kementerian Luar Negeri, 2009. "Masukan P3k2 Aspasaf tentang Isu Ambalat", 5 Juni 2009.

Lalu apakah pencitraan tersebut dapat diasumsikan berhasil, padahal kontroversi dalam *million friends zero enemy* masih terjadi?. Berhasil dalam konteks pemerintahan presiden SBY masih eksis, sekalipun popularitasnya menurun drastis dan kontroversi masih mengiringi. Namun mengapa strategi pencitraan masih dipertahankan meskipun terlihat beresiko?. Kembali ke skema kerangka teoritik, jika pencitraan diprakondisikan oleh beban citra yang sudah terlanjur melekat kepada presiden SBY,. Meskipun melalui slogan *million friends zero enemy* pemerintah tidak bisa meredam gejolak yang ada, tapi pencitraan tersebut sanggup meminimalisir gejolak tersebut agar tidak menjadi kontroversi yang besar. Dalam konteks era *paradox of plenty*, maka gejolak tidak mungkin bisa dihindari, namun bisa ditahan. Dengan kata lain, sekalipun slogan *million friends zero enemy* yang menonjolkan sikap tidak asertif rentan mendapat kritikan, namun pencitraan masih dapat bertahan dari turbulensi tersebut.

Dengan kata lain, berhasil tidaknya pencitraan tidaklah harus selalu diukur dengan grafik popularitas publik yang pada umumnya diteliti oleh lembaga *survey*. Jika menggunakan analisis popularitas publik, maka pencitraan diasumsikan menemukan masa kejayaannya jika melakukan generalisasi popularitas SBY sejak awal kepemimpinannya, sekalipun telah mengalami penurunan pada periode keduanya. Namun peneliti perlu untuk mengambil sampel persepsi publik Indonesia dalam kebijakan luar negeri. Misalnya dalam kasus Ambalat pada 4 maret 2005, terdapat ambivalensi antara kemarahan publik yang ditampilkan dalam media massa dengan hasil jajak pendapat. Peneliti mengambil hasil jajak pendapat kompas tertanggal 12 Maret 2005 yang mana masyarakat mengakui bahwa langkah diplomatik merupakan langkah terbaik dengan 91 persen suara, dibandingkan perang yang hanya memperoleh sembilan persen suara.<sup>42</sup> Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa serangkaian protes semacam demo macam “ganyang Malaysia” yang marak tidaklah selalu merepresentasikan secara pasti jikalau masyarakat menuntut diplomasi yang keras. Publik merupakan massa anonim dan bisa berubah persepsinya secara *floating* mengikuti pergeseran wacana yang cepat berubah.

<sup>42</sup> Toto Suryaningtyas, “Bersikap Tegas Namun Kepala Tetap Dingin”, *Kompas*, 12 Maret 2005. hal. 40

Signifikansinya strategi pencitraan dalam menghadapi kontroversi publik juga dapat disimak dalam kasus Israel-palestina. Mungkin jika ingin memetakan secara komprehensif mana yang lebih moderat antara Gus Dur dengan SBY, barangkali tidak jauh berbeda. Sejatinya presiden SBY lebih pandai memainkan sikap moderat dalam tataran permukaan. Menlu Alwi Shihab ers Gus Dur mengeluarkan suatu konsep *Ecumenical* yang sesungguhnya mengandung banyak spirit Islam moderat. Namun terobosan tersebut justru menyakiti umat islam karena mengandung indikasi ingin membuka hubungan dengan Israel. Bahkan beberapa kali Gus Dur terlihat mengadakan pertemuan dengan Ariel Sharon yang dipersepsikan merupakan sikap menjajaki kemungkinan membuka hubungan diplomatik. Implikasinya, Gus dur kemudian keislamannya dipertanyakan oleh ormas dan partai Islam, naik moderat maupun garis keras. Sedangkan SBY sesungguhnya juga tidak luput dari kontroversi seputar wacana pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Bahkan pemerintah dianggap mengabaikan palestina terkait kasus insiden beberapa sukarelawan Indonesia yang berjuang atas nama pribadi. Namun kontroversi yang mengiringi SBY ternyata tidak menghasilkan gugatan sekeras yang diterima Gus Dur. Dengan demikian, maka SBY lebih dapat menjaga sikap kontroversial dari turbulensi media, sehingga secara permukaan tampak lebih moderat.

Kontroversi juga muncul terkait rencana kunjungan presiden G.W Bush ke Indonesia pada 20 november 2006. Dalam pemberitaan disebutkan bagaimana rencana pemerintah untuk membuat landasan helikopter khusus bagi Bush di istana Bogor meskipun akhirnya tidak terealisasi karena Bush tidak berkunjung ke Istana. Fokus pertemuan ini sesungguhnya adaah mempererat bilateral antara AS dan Indonesia terkait isu flu burung, Bantuan tsunami dan kerjasama ekonomi diman. Namun keberpihakan yang kentara ketika SBY mengawali pernyataanya dengan mengsumsikan jika dalam kasus Irak perlu adanya rekonsiliasi antara tiga sekte yakni, Syiah, Kurdi, dan Sunni. <sup>43</sup>

Dengan kata lain, pencitraan *million friends zero enemy* dilakukan sebagai sebuah mekanisme pertahanan diri (*self advocacy*) dari isu perlawanan yang

<sup>43</sup> Lembaga Survey Inonesia, "Upaya Presiden Menghapus Presiden Persepsi". 2007 . diakses dari <http://www.lsi.or.id/liputan/247/kiprah-sby-menghapus-anggapan-presiden-persepsi>, pada 12 April 2012, pk.23.12.

dapat membahayakan posisi pemerintahan presiden SBY. Namun pilihan pemerintah untuk melakukan pencitraan bukan berarti tanpa resiko. Gerak sentripetal dan gerak sentrifugal terjadi secara bersamaan dalam konstelasi diskursif wacana di Indonesia.<sup>44</sup> Hal inilah yang menyebabkan mengapa gejala menuntut diplomasi asertif tidak pernah berhenti. Dengan kata lain, pemerintah hendak menciptakan suatu generalisasi citra dalam kondisi dimana informasi terliberalisasi atau terpartikularisasi yang rentan kontroversi.

Fenomena berikut menunjukkan begitu berbahayanya era informasi. Harian Australia *The Age* edisi Jumat 11 maret 2011 memuat berita utama tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden (SBY). Laporan harian itu berdasarkan kawat-kawat diplomatik rahasia kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta yang bocor ke situs WikiLeaks.<sup>45</sup> Kawat-kawat diplomatik yang diberikan WikiLeaks khusus untuk *The Age*, mengatakan jika presiden Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik. Sebuah kontroversi yang berdampak pada hubungan internasional saat kemudian diklarifikasi oleh duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia.

Kasus Wikileaks tersebut menunjukkan jika Liberalisasi informasi yang tidak bisa dikontrol merupakan *turbulent ocean* yang berpotensi berbahaya bagi reputasi pemerintah Namun yang perlu dicatat adalah respon pemerintah yang cepat bahkan statement tersebut diungkapkan dalam nuansa sidang PBB bulan Maret 2011. Berikut ini merupakan pernyataan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan sidang PBB:

"Wikileaks telah membuat kesulitan bagi pemerintah di berbagai belahan dunia,"<sup>46</sup>

<sup>44</sup> "Indonesia Prioritaskan Tiga hal saat Pimpin ASEAN", *Berita Sore*, 12 Januari 2011. Diakses dari <http://beritasore.com/2011/01/12/indonesia-prioritaskan-tiga-hal-saat-pimpin-asean/> pada 4 Maret 2012, pk. 23.10.

<sup>45</sup>"SBY: Wikileaks Cuma bikin Masalah", *Suara Pembaruan*, 12 Maret 2011. Diakses dari <http://www.suarapembaruan.com/home/sby-wikileaks-cuman-bikin-masalah/4861>, pada 4 Maret 2012, pk. 22.45.

<sup>46</sup>"Presiden SBY: Wikileaks buat kesulitan di banyak negara", *Republika*, 25 Maret 2011. Diakses <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/23/171684-presiden-wikileaks-buat-kesulitan-di-banyak-negara>, pada 2 april 2012, pk.20.45.

Pencitraan menjadi kata kunci dalam melacak jejak neoliberalisme di Indonesia. Tendensi bahwa terdapat jembatan penghubung konsep neoliberalisme dan *million friends zero enemy* adalah karena pencitraan dalam era pemerintahan SBY acapkali disinonimkan dengan terminologi marketing politik. Sehingga logika pencitraan dalam *Million friends zero enemy* sesungguhnya adalah logika pemasaran. Oleh karena itulah, proses pengidentifikasian neoliberalisme bukan hanya disimak dari bagaimana implementasi kebijakannya, melainkan juga pada tataran input kebijakan tersebut untuk melihat adanya mekanisme pasar. Dengan kata lain, pilihan sikap non konfrontasi terindikasi merupakan output dari mekanisme pasar. Implikasinya, diplomasi luar negeri memiliki tampilan yang relatif serupa dengan citra dalam negeri. Serupa tampilan serupa jugalah tujuannya, yang tidak lain adalah untuk menjaga reputasi. Politik luar negeri dan politik dalam negeri tidaklah merupakan dikotomi dimana justru menunjukkan keduanya merupakan dua fondasi legitimasi yang sama pentingnya. Namun masih memunculkan kritisisme apakah pencitraan tersebut demi reputasi negara. Dengan kata lain, reputasi tidak bisa diabaikan, namun bagaimana ketika reputasi mengalahkan kepentingan nasional itu sendiri

Oleh karena itulah, pencitraan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni yang bertipikal defensif dengan offensif. Tata kelola inilah yang membedakan antara pencitraan di masa SBY dengan pencitraan di masa Suharto dan Sukarno. Pada zaman kedua presiden tersebut, pencitraan dilakukan secara *top down*. *Top down* dalam pengertian ini diartikan sebagai pencitraan yang offensif yang secara masif menanamkan sebuah simbol pada masyarakat. Sebaliknya pencitraan *bottom up* merupakan model pencitraan yang defensif dimana simbol ditonjolkan untuk menutupi kekurangan pemerintah. Pencitraan pada masa presiden SBY sebatas dilakukan sebagai langkah defensif dalam turbulensi pemberitaan yang ada. Secara ideal, pencitraan dapat merubah persepsi publik yang semula melawan menjadi mendukung kebijakan ini sebagaimana konsepsi diplomasi publik. Namun pemerintah mengimplementasikan pencitraan secara tidak leluasa karena turbulensi pemberitaan yang ada. Meskipun hingga sekarang pemerintah belum



menemukan gugatan yang membahayakan, namun potensi turbulensi masih memungkinkan untuk membahayakan reputasi. Sejatinya, pencitraan dapat dijadikan alat untuk meraih tujuan. Tetapi yang menjadi problem adalah ketika pencitraan tersebut ternyata bukanlah semata alat untuk memperoleh tujuan, namun pencitraan telah menjadi tujuan itu sendiri..

## **2.6 Million Friends Zero Enemy : Pencitraan Sebagai Problem Identitas**

Tanpa disadari problem dalam semboyan *million friends zero enemy* mengingatkan kembali pada problem identitas nasional Indonesia. Ketika pemerintah hendak mencitrakan sosok Indonesia sebagai sahabat bagi semua negara, maka tanpa disadari pemerintah telah merumuskan siapa Indonesia. Sebuah citra yang menjadi paradoks ketika dikaitkan dengan problem kemana arah kebijakan luar negeri Indonesia. Mengutip renungan Yudi Latif dimana Indonesia adalah negara paripurna. Sebuah negara yang belum selesai dalam mengidentifikasi siapa dirinya.<sup>47</sup> Namun justru inilah pekerjaan rumah bagi penerus bangsa kontemporer dengan dialog terus menerus untuk melakukan identifikasi mengenai jatidiri Indonesia. Yang menjadi paradoks, proses identifikasi mengenai jatidiri Indonesia melalui *Million friends zero enemy*, belum menunjukkan kemana arah dan siapa Indonesia.

Pencitraan yang diimplementasikan pemerintah cenderung *top down*, padahal dalam perumusan siapa identitas Indonesia seharusnya dilakukan secara *bottom up*. Apalagi dalam era *paradox of plenty* yang berkejolak, maka komunikasi antara pemerintah dan publik dimungkinkan. Mulanya pencitraan dapat menjadi modal dalam mengarungi gelombang samudera luar negeri (*navigating a turbulent ocean*) dimana salah satunya pertentangan barat dan Islam. Maka dari itulah kebanggaan sebagai negara Islam yang demokratis dirasa perlu bagi pemerintah untuk menetralkan keberpihakan Indonesia. Sebagaimana diketahui, sebelumnya banyak persepsi yang memandang Islam tidak demokratis sehingga kemudian melatarbelakangi kementrian luar negeri untuk mengagas *global interfaith dialogue*. Terlebih lagi dalam diskursus benturan antar peradaban, Indonesia dituntut untuk menempatkan posisinya secara hati-hati ditengah

<sup>47</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna : Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011).

ketegangan Barat dan Islam. Islam moderat secara etimologi didefinisikan sebagai “jalan tengah” dan tidak berlebih-lebihan. Jika memakai definisi tersebut, maka Islam moderat akhirnya memiliki komparasi distingtif yang cukup jelas dalam pemerintahan SBY, yakni Islam dan barat.<sup>48</sup> Meskipun definisi Islam moderat SBY tersebut tidak substansial karena moderat dilatarbelakangi oleh pemahaman mendalam atas perbedaan dan bukan sintesis artifisial. Sebagaimana kontestasi pemilu 2009 menunjukkan terpilihnya Presiden SBY merupakan hasil kolaborasi kedua elemen tersebut.

Simbolisasi *zero enemy* tersebut menjadi sebuah kontroversi ketika dalam perumusannya mengabaikan publik. Inilah problem identitas, ketika tidak adanya konsensus dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Identitas semakin diperparah ketika masyarakatnya tidak diikutsertakan dalam input kebijakan dan hanya menjadi konsumen kebijakan. Padahal Joseph Nye menganjurkan diplomasi publik guna melibatkan masyarakat sebagai produsen. Dengan demikian, maka diperlukan buku putih dalam kebijakan luar negeri karena buku diplomasi Indonesia 2010 yang dikeluarkan kemlu belum mengarah pada operasional. Tanpa buku putih, maka bukan kebijakan yang mengontrol isu, namun isu yang mengontrol kebijakan. Buku putih juga akan membantu Indonesia dalam menentukan siapa yang perlu diwaspadai, meskipun presiden SBY setengah hati mengakui tidak punya lawan sebagaimana kutipan berikut.

“Diperlukan buku putih tentang *foreign policy* untuk periode sebuah pemerintahan. Dan ini harus di-update setiap tahun. Jangan sampai paparannya tidak segaris dengan apa yang direncanakan. Itu namanya pecah kongsi, membingungkan kawan dan lawan. Walau kita tidak punya lawan,<sup>49</sup>

Agar terjadi sinergi antara isu dan kebijakan sekaligus demi terwujudnya identitas, maka ruang publik diperlukan dalam menggali pendapat publik demi buku putih yang berjatidiri. Ruang publik merupakan instrumen dialog sebagai

<sup>48</sup> Bashori, “Tiga Pemikiran Islam: Radikal, Moderat dan Liberal.” 2009. diakses dari <http://www.ppalanwar.com/index.php?mact=News,cntnt01,print,0&cntnt01articleid=122&cntnt01showtemplate=false&cntnt01returnid=49>, pada 23 november 2011, pk.19.58.

<sup>49</sup> Esther Lazania, “Perlunya Buku Putih Kebijakan Luar Negeri”. *Tempo*, 23 februari 2012. Diakses dari <<http://www.tempo.co/read/news/2012/02/23/078385923/SBY-Perlu-Buku-Putih-Kebijakan-Luar-Negeri>>, pada 2 april 2012, pk. 21.08.

sebuah prakondisi terbentuknya *Collective identity*. Identitas kolektif sebagaimana asumsi Wendt, merupakan ruh bagi kebijakan luar negeri.<sup>50</sup> Tanpa adanya Identitas kolektif maka segregasi gagasan untuk kepentingan bersama tidaklah memungkinkan. Ruang publik merupakan sarana yang dialogis dan edukatif, dan bukan sebuah turbulensi yang hanya mengejar sensasi.. Ruang publik yang bebas dari liberalisasi informasi merupakan sarana untuk menunjang adanya kebebasan individu dalam berpendapat yang menuai sinergi demi identitas nasional. Kembali pada asumsi Bung Hatta, tanpa komunikasi yang dialogis, maka persatuan tidaklah lebih dari persatean Sebuah identitas kebangsaan tentunya diperlukan sebagai pelepas dahaga dibalik ambivalensi *miliion friend zero enemy* demi kebijakan luar negeri yang berkarakter.

Dengan buku putih maka pemerintah tidak lagi mendua dan berdiri diatas dua kaki yang ternyata membebani. Semisal membawa simbol sebagai negara muslim terbesar, presiden SBY seiringkali berada dalam pilihan dua opsi yang ekstrim. Oleh karena itulah, pekerjaan berat pemerintah adalah bagaimana kemudian simbolisasi Islam moderat harus tampak tidak memihak kedua polaritas secara frontal. Islam moderat disimbolisasi dari konstelasi domestik berupa perpaduan sintesis balutan disparitas nasionalisme abangan dan religius sekaligus dalam simbolisasi partai Demokrat. Modal citra lainnya adalah saat Presiden SBY muncul sebagai figur yang dianggap berhasil menangan terorisme semasa menjadi menkopolkukan, meskipun disisi lain presiden SBY merupakan pilihan koalisi partai Islam.<sup>51</sup> Konsep yang menengah tersebut selain berguna untuk meraih dukungan dari partai muslim, juga agar tetap menjaga hubungan baik dengan barat, sekaligus seolah pas dalam mensimbolisasi citra Islam moderat.<sup>52</sup>

Terdapat dikotomi saat mengelaborasi pola dan mekanisme pencitraan dalam kebijakan luar negeri *million friends zero enemy*. Pencitraan tidak lain merupakan mekanisme perpaduan antara pola *inside out* sekaligus *outside in*. Bermula dari citra domestik presiden SBY yang dikejawantahkan dalam

<sup>50</sup> Alexander Wendt, "Collective Identity Formation and the International State". *American Political Science Review*, 88: 2 (1994): 384-396.

<sup>51</sup> Indobarometer, "Islam: Potensi terror Terbuka." 2007. Diakses dari <[http://www.indobarometer.com/ib/index.php?id=13&&menu=artikel\\_detail&&jdl=Islam:%20Potensi%20Teror%20Terbuka](http://www.indobarometer.com/ib/index.php?id=13&&menu=artikel_detail&&jdl=Islam:%20Potensi%20Teror%20Terbuka), pada 3 Maret 2012, pk.21.32.

<sup>52</sup> Ahmad Bakir Ikhsan, "Menebar Toleransi Menyemai Harmoni: SBY dalam Wacana Perdamaian, Moderatisme dan Keadilan", (Bandung: Rosdakarya, 2009)

kebijakan luar negeri yang disebut sebagai *inside out*. Termasuk bagaimana citra dan pujian presiden SBY diluar negeri dicitrakan untuk membendung perlawanan dari kontroversi domestik atau *outside in*. Dengan kata lain, Meskipun jika melihat slogan tersebutseolah diimplementasikan sebagai pencitraan keluar negeri. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Islam moderat juga didorong dari konstelasi ruang publik “dalam” negeri sekaligus berupaya menahan diri dari konstelasi diskursif didalam negeri. Maka dari itulah kita tidak lagi bisa membedakan antara ranah pencitraan keluar dan kedalam dalam konteks pencitraan pemerintahan SBY. Fakta tersebut merefleksikkan kerangka teoritik pada bab pendahuluan bahwa pencitraan tidak bisa dilepaskan dari konteks struktural, sehingga selain bersifat *top down*, juga *bottom up*. Daris inilah Liberalisasi informasi merupakan aspek struktural yang berkaitan erat dengan implementasi semboyan *Million friend zero enemy* tersebut.

Paradigma kebijakan luar negeri Indonesia era presiden SBY dapat menjadi refleksi ontologi dari kajian diplomasi. Kajian Diplomasi dalam ilmu hubungan internasional dihadapkan pada dikotomi antara penganut mazhab relationalis dan substansionalis. Johnson dan Hall menekankan bahwa para teoritis HI lebih cenderung substansialis ketimbang relasionalis. Kaum substansialis terkenal akan *self actiontheory* yang melihat bahwa aktor negara sebagai unit yang independen. Substansialis juga menekankan bahwa dalam derajat tertentu, *self action* akan berkembang menjadi *interaction* yang digambarkan sebagai suatu *billiard ball* yang acak. Sedangkan relationist lebih memandang bahwa diplomasi dalam hubungan internasional merupakan suatu kesatuan unit yang kompleks yang digambarkan sebagai suatu web yang cair dan turbulen.<sup>53</sup>

Diantara dualisme tersebut, peneliti lebih pada mazhab yang terakhir dimana diplomasi digambarkan layaknya jaring atau web. Hal tersebut sesuai dengan kiasan samudra bergejolak dari presiden SBY. Semboyan *million friends zero enemy* berfungsi sebagai sebuah benteng pertahanan dalam kondisi global yang tidak terstruktur secara pasti layaknya web. Benteng jika kita imajinasikan merupakan instrumen yang kaku padahal yang sedang dihadapi adalah web yang dapat dianalogikan seperti sebuah benda cair yang lentur dan kompleks. Pada

<sup>53</sup> Johnson and Hall, *The Essence of Diplomacy*, (London: Sage, 2001).

hakikatnya, diplomasi *soft* merupakan sebuah seni kelenturan yang sifatnya eklektik. Dengan demikian, maka menimbulkan skeptisisme sampai kapan benteng citra sanggup menahan gejolak web.

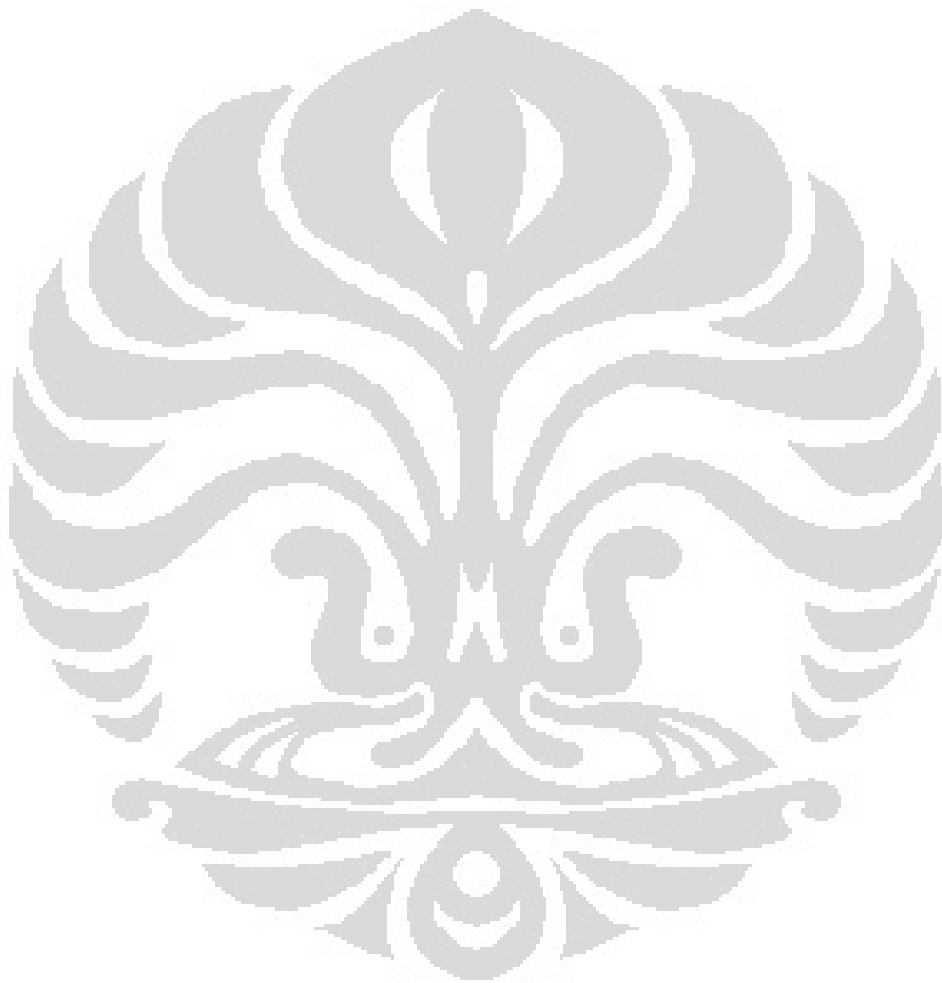
Ditinjau dari sejarah teoritisnya, pencitraan merupakan konsep yang cenderung tidak terikat oleh sesuatu determinan. Namun dalam konteks presiden SBY, pencitraan ternyata tidak dilakukan subyektif secara independen. Pencitraan khususnya terkait dengan slogan *million friend zero enemy*, justru hadir sebagai konsekuensi dari Liberalisasi Informasi. Hal ini menunjukkan jika subyektif tidak leluasa untuk membingkai konsep citra yang dikehendaki. Pencitraan lebih merupakan respon pemerintah Indonesia terhadap turbulensi informasi yang berpotensi membahayakan reputasi pemerintah. Apalagi ketika mengelaborasi kembali, terdapat kesamaan karakteristik citra luar negeri dan domestik. Dalam beberapa contoh kasus, terlihat jika sikap non konfrontatif sejajar dengan pencitraan presiden tentang kesantunan. Dengan sedikit generalisasi, maka sikap santun dalam pengertian tidak membalas sikap dan pernyataan lawan dengan cara-cara yang tidak santun. Untaian kata-kata seperti tidak elok, tidak ksatria, saya prihatin, merupakan *keyword* yang senantiasa hadir bersamaan mengiringi diplomasi presiden.

Dengan demikian, maka *Style* senantiasa lebih ditonjolkan dalam berdiplomasi ketimbang argumentasi dalam era informasi. Meskipun *style* tersebut tidak memberi kontribusi yang kongkrit bagi kepentingan nasional Indonesia. Seharusnya ketika melankolis tidak cukup bisa menyelesaikan sebuah perkara, dalam konteks ini kedaulatan, maka perlu sesekali meninggalkan sisi melankolis. Sehingga wajar jika *style* rock ala bung Karno kembali dikumandangkan. Pencitraan sebagai konsep mampu menjelaskan mengapa pemerintah tidak sanggup meninggalkan sisi melankolis. Hal tersebut karena melankolis terlanjur menjadi beban citra yang melekat..

Pada saat Indonesia mendeklarasikan keinginan untuk mendapat tempat terhormat dalam tatanan internasional, pada saat itu pula dihadapkan pada paradoks ketiga, yakni paradoks posisi internasional Indonesia. Dalam konfigurasi hubungan internasional dewasa ini, Indonesia berpotensi sebagai negara yang memiliki potensi untuk maju dan gagal sekaligus. Potensi gagal berpotensi terjadi

ketika pemerintah tidak bersandar pada gagasan yang terarah tentang siapa aktor internasional yang harus didekati dan siapa yang harus dijauhi. Ide tentang polaritas menjadi penting ketika Indonesia benar-benar ingin mendapat teman yang berguna. Sebagaimana asumsi Wendt, teman menjadi setia adalah ketika memiliki musuh bersama. Dengan demikian, adalah kebutuhan dalam mengevaluasi *million friend zero enemy* sebagai slogan yang kurang memperjelas orientasi Indonesia dalam hubungan luar negeri.

Pemaparan data di atas menunjukkan adanya inherensi antara slogan *million friends zero enemy* dengan paradigma neoliberalisme. Keterkaitan tersebut diperoleh ketika penulis merangkai serangkaian kutipan pemerintah yang berserakan dalam serangkaian peristiwa yang berbeda-beda. Serta tidak ketinggalan adalah content analisis terhadap *dynamic equilibrium* dan *navigating a turbulent ocean* sebagai kedua perspektif kebijakan luar negeri Indonesia. Namun penulis memaknai kedua karya tersebut tidak *taken for granted* sehingga memunculkan urgensi sebuah proses reinterpretasi atas *dynamic equilibrium* dan *Navigating a Turbulent Ocean*. Jika kedua karya tersebut menterjemahkan kondisi kontemporer sebagai konsekuensi globalisasi, maka penulis mengasumsikan justru konsekuensi liberalisasi informasi dimana ketika negara pun tidak mampu mengontrol Informasi. Dengan demikian maka selanjutnya akan dijelaskan oleh bab ketiga untuk menunjukkan proses liberalisasi informasi secara lebih komprehensif.





**BAB III**  
***MILLION FRIENDS ZERO ENEMY* SEBAGAI RESPON ATAS**  
**LIBERALISASI INFORMASI**

Perkembangan informasi yang terjadi di Indonesia bukanlah semata perkembangan teknologi dan sains. Namun lebih jauh, Perkembangan informasi di Indonesia sejatinya tidak bisa dilepaskan dari transformasi struktur material (*capitalism*) yang terjadi. Anasir pada bab kedua memberi pengantar bahwasanya peranan Informasi dengan segala paradoksnya tidak bisa dilepaskan guna memprakondisikan pencitraan dalam kebijakan luar negeri. Oleh karena itulah, bab ketiga ini disusun sebagai uji empirik adanya pengaruh liberalisasi informasi yang diasumsikan menjadi determinan dari pencitraan. Maka dari itulah, sistematika penulisan akan dimulai dengan penjelasan tentang genealogi minimalisme peran negara dalam sektor informasi. Selanjutnya peneliti perlu melakukan perbandingan era sebelum liberalisasi dan pasca liberalisasi informasi untuk menguji liberalisasi informasi sebagai determinan. Yang terakhir, pada bab menjelang kesimpulan akan dideskripsikan bagaimana pola pencitraan dalam menghadapi turbulensi persepsi publik.

**3.1 Genealogi Perkembangan Liberalisasi Informasi di Indonesia**

Dialektika materialisme Karl Marx berpijak pada asumsi dasar bahwa perilaku manusia dalam derajat tertentu diprakondisikan oleh aspek material. Dengan kata lain, manusia hanyalah obyek dari sejarah kebendaan. Dialektika sejarah materialisme tersebut relevan dalam melacak bagaimana transformasi baik sosial, politik, dan kebudayaan merupakan efek dari kontradiksi material. Sebagai contoh Vedi Hadiz yang menelaah perkembangan gerakan radikal dalam perspektif dialektika material.<sup>1</sup> Logika Marxis memiliki implikasi teoritis yang berpengaruh dalam banyak aspek sosial, tak terkecuali kebijakan luar negeri.

Dengan demikian maka ekonomi politik tidaklah hanya dipandang sebagai sebuah kasus, melainkan sebagai perspektif. Begitu pula dengan Pencitraan politik, yang tidaklah muncul semata kehendak dari aktor politik yang sengaja

<sup>1</sup> Vedi Hadiz, *Dinamika Kekuasaan* : Ekonomi Politik Indonesia Pasca Suharto, (Jakarta : LP3ES, 2005).

yang mencitrakan diri. Melainkan Pencitraan politik muncul dikonstruksi oleh adanya perubahan-perubahan struktur material ekonomi dalam perpolitikan Indonesia. Struktur material yang dimaksudkan adalah sektor informasi .dimana informasi yang semula beradadalam kontrol negara, secara gradual mulai menjadi *privat goods* dan komoditas.

Ketika Informasi telah menjadi komoditas, maka terdapat mode produksi kapitalisme yang bertransisi dari sektor industri menuju post industri.<sup>2</sup> Bahkan Manuel Castell berkeyakinan bahwa era revolusi Industri sudah berakhir, dan digantikan oleh revolusi informasi.<sup>3</sup> Informasi yang semula hanyalah kebutuhan sekunder bagi perekonomian, menjadi kebutuhan primer. Sebagaimana Anthony Giddens mengatakan bahwa kita hidup dalam lokomotif modernitas yang begitu cepat hingga negara tidak sanggup lagi bersikap eksklusif.<sup>4</sup> Asumsi Giddens tersebut diamini oleh Joseph Nye dan Keohane yang memandang dunia telah memasuki era *paradox of Plenty*. Keterlibatan Nye dan Keohane dalam sebuah kepercayaan bahwa informasi menjadi penting, munculllah argumen jika Neoliberalisme merupakan ideologi yang beridiri sejajar dengan perkembangan teknologi informasi Meskipun masih juga menjadi dualisme antara apakah neoliberalisasi yang mendorong lahirnya informatisasi, atau sebaliknya. Namun yang tidak bisa dipungkiri adalah, Teknologi Informasi telah membuat perbedaan waktu dan tempat menjadi tidak relevan lagi (*time space compressed*) dalam ekonomi sebagaimana keyakinan Thomas Friedman dalam karyanya "*the lexus and the olive three*".

Penetrasi neoliberalisme ke segala bidang tersebut, dimungkinkan melalui instrumen, yakni teknologi informasi. Teknologi informasi memberikan kekuatan ekstra bagi pasar finansial dan bursa efek untuk bertransaksi dengan cepat. Teknologi Liberalisasi informasi memungkinkan proses liberalisasi berjalan dengan sendirinya, ibarat pengusaha yang membiarkan perusahaanya berjalan sendiri karena sistem sudah berjalan. Kecenderungan tersebut paralel dengan deskripsi terkenal Lyotard tentang kondisi paska-modern sebagai kondisi di mana

<sup>2</sup>Era Post Industri acapkali disinonimkan dengan Era Informasi. Lebih lanjut pada Daniel Bell, , *The Cultural Contradiction of Late Capitalism*, (London: Routledge, 2003).

<sup>3</sup> Manuel Castells, *Network Society*, (New york: Palgrave Macmilian, 1987).

<sup>4</sup>Anthony Giddens, *The Constitution of Society*, (Cambridge: Polity press, 1984).

kontrak sementara menggantikan institusi permanen.<sup>5</sup> Meskipun kurang bernilai ekonomis, teknologi informasi sesungguhnya memiliki implikasi yang besar terhadap negara. Sebagai contoh Cina yang dianggap manifestasi negara merkantilis ternyata juga kesulitan membendung liberalisasi Informasi seiring kasus Goggle yang mengekspos diktatorial China. Tinjauan pustaka tersebut secara tidak langsung memperluas pemahaman atas neoliberalisme. Neoliberalisme selama ini didefinisikan secara praktis mengenai minimalisme peran negara dalam finansial sebagaimana sepuluh poin versi John Williamson.<sup>6</sup>

Oleh karena itulah, *Market* dalam pengertian Harvey tidak hanya merupakan tempat sirkulasi barang dan jasa semata, Melainkan juga merupakan tempat transaksi *idea*, nilai, persepsi dan Citra sebagai suatu komoditas era informasi. Dengan kata lain, pasar bebas tidak hanya menjual produk materiil saja, tetapi juga produk imateriil dimana salah satu manifestasinya adalah marketing politik yang menjual citra. Neoliberalisme tidak lagi berpijak pada asumsi normatif tentang pasar sebagaimana pandangan liberal klasik Adam Smith. Neoliberalisme sangat meyakini pasar sebagai institusi yang bergerak secara alamiah, mengutip Thatcher yang menyebut "*There is no Alternative*".<sup>7</sup> Seperti kita ketahui, neoliberalisme seringkali disinonimkan dengan fundamentalisme pasar karena keyakinannya didasarkan pada "*the invisible hand*"

Ketertarikan neoliberalisme terhadap informasi dapat terlihat dari trend peraturan lembaga internasional kontemporer. Sebelumnya fokus utama lembaga internasional adalah privatisasi sektor *raw material* dan *finance*. Namun privatisasi sektor informasi justru berimplikasi pada adanya kesenjangan teknologi digital dalam skala global atau yang dikenal sebagai *digital divide*. Kaum Neoliberal menekankan perlunya rezim yang mengisyaratkan privatisasi sektor informasi perlu guna membuka ruang bagi setiap orang untuk memiliki akses. Apalagi dengan lahirnya traktat internasional *General Agreement on Trade in Services*(GATs) dalam WTO, maka ketergantungan teknologi nyatanya lebih merugikan negara berkembang secara *share value*, sehingga implikasi kedepan

<sup>5</sup> Jean Francois Lyotard, *Libidinal Economy*, (New York: Althone Press, 1994)

<sup>6</sup> John Williamson, *Latin American Readjustment: How Much has Happened*, (Washington: Institute for International Economics, 1989).

<sup>7</sup> Endre Szerso, *Between Neopositivism, Neoliberalism and Postmodernism*, *Academic Press*, Vol.4, No.3, 2007, hal. 244-286.

negara berkembang akan terus menerus mengandalkan investasi teknologi informasi dari negara maju.<sup>8</sup>

Liberalisasi Informasi tidak bisa dipisahkan dari faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan reformasi telekomunikasi nasional. Kenyataan kontemporer bahwa rezim telekomunikasi nasional telah menjadi bagian dari rezim perdagangan global yang diadministrasikan oleh WTO (*World Trade Organization*). Akhirnya pada tahun 1997, sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, telah menanda-tangani apa yang dinamakan *World Trade Organization (WTO) Agreement on Basic Telecommunication* yang dimaksudkan untuk meliberalisasikan pasar jasa telekomunikasi dasar. Sebagai konsekuensinya, sejak 1 Januari 1998 dasar hubungan dalam lingkungan telekomunikasi dunia berubah dari bilateral menjadi multilateral.

Implikasinya, liberalisasi sektor informasi semakin berkembang tanpa bisa dikontrol negara. Rezim Internasional WTO tersebut menandai bahwa pemerintah Indonesia tidak lagi punya kontrol akan sektor informasi sebagaimana yang pernah dipraktikkan pada era orde baru.<sup>9</sup> Meskipun keterbukaan pada pasar bebas telah terjadi pada era orde baru, ternyata sektor informasi masih belum sepenuhnya menjadi komoditas strategis. Adopsi perundang-undangan pertama liberalisasi informasi baru ditandai dengan dikeluarkannya UU No.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang merupakan manifesto dari *practical discourse* neoliberalisme. Diasumsikan demikian, lantaran ada keterlibatan IMF yang tertuang dalam *Letter Of Intent* tertanggal 19 Januari 1998 yang substansinya adalah anjuran untuk meliberalisasi informasi. Berikut ini merupakan kutipan dari matriks *structural reform* dokumen *letter of Intent*:

*"Initiate sales of additional shares in listed state enterprises, including at a minimum, the domestic and international telecommunication corporations"*<sup>10</sup>

Akselerasi investasi informasi yang semakin kurang kontrol akibat Liberalisasi tersebut menciptakan arsitektur informasi (Teledensitas) yang lebih

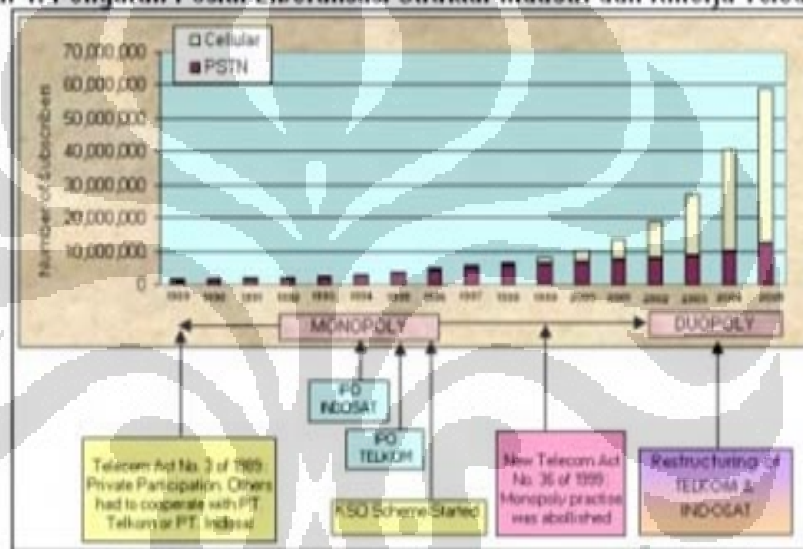
<sup>8</sup>Ilene Grabel, dan Chang, *Membongkar Mitos Neolib: Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan*, (Yogyakarta: Insist Press, 2008).

<sup>9</sup> Broto, *Gatra*, November 2009, hal.7

<sup>10</sup>International Monetary Fund, "*Letter of Intent*", 22 April 2008.

cepat dari biasanya. Grafik dibawah ini akan memperlihatkan bagaimana Teledensitas berkembang pesat pada periode setelah munculnya undang-undang telekomunikasi tahun 1999. Lahirnya Undang undang Telekomunikasi memndorong munculnya perjanjian *Telecom act*. Ketentuan nomer tiga dalam Telecom act disebutkan adanya konsep “privat participation” yang tidak lain menjadi petanda minimalisme kontrol informasi dari negara. Kinerja struktur teledensitas sebagaimana yang diulas paragraph sebelumnya, merupakan dampak lanjutan dari adanya intervensi institusi interbasional pasca 1999.

Gambar 1: Pengaruh Positif Liberalisasi Struktur Industri dan Kinerja Teledensitas



Sumber: <http://www.antara.co.id>, diakses pada 3 Januari 2012

Gerak sejarah material dalam konteks multilateral tersebut juga dapat diekstraksi untuk meninjau kondisi yang terjadi di Indonesia. Jika ditinjau berdasarkan dimensi kesejarahan, sesungguhnya teknologi *time space compressed* baru berkembang pada periode pasca reformasi. Terlihat Pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan cetak biru telekomunikasi Indonesia sebagai respon atas GATS dalam WTO tersebut. Ada tiga pokok pembaruan yang dicanangkan, antara lain dengan menghapuskan bentuk monopoli, menghapuskan diskriminasi dan restriksi bagi perusahaan swasta besar maupun kecil dan koperasi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi mengkhhususkan peran pemerintah sebagai pembina yang terdiri atas pembuatan

kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi serta memisahkannya dari fungsi operasi.<sup>11</sup>

Struktur informasi yang berubah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pencitraan bukanlah semata-mata *rational choice* yang dilakukan berdasarkan kehendak personal dan kepiawaian pemerintah. Melainkan juga didorong oleh suatu transformasi material kapitalisme sebagai determinan. Ternyata kedah IMF tersebut diimplementasikan dengan lahirnya Liberalisasi. Suatu kebijakan yang intinya mengarahkan pelaksanaan telekomunikasi di Indonesia tidak lagi secara monopoli tetapi mengarah ke persaingan bebas, walaupun kenyataannya pada masa tersebut masih bersifat duopoli dengan eksistensi Indosat sebagai pesaing Telkom. Dalam konteks ini agaknya kita mulai terjebak pada perdebatan klasik epistemologi antara Max Webber dengan *rational choice* dan Karl Marx dengan analisa deterministiknya. Analisa mengenai struktur material ala Marx tersebut sejatinya dikedepankan tanpa harus menihilkan peranan *rational choice* Aktor versi Webber. Dengan kata lain, pencitraan dipandang sebagai aktivitas kesengajaan rasional yang diprakondikan oleh basis infrastruktur.

### **3.2. Minimalisme Kontrol Negara terhadap Sektor Informasi dan Implikasinya**

Subab sebelumnya memberikan analisa bahwa Era reformasi merupakan momentum perubahan politik yang tidak bisa dilupakan kontribusinya dalam mendorong liberalisasi informasi. Sehingga asumsi tersebut memunculkan perdebatan mengenai apakah tanpa lahirnya era reformasi maka liberalisasi informasi takkan terjadi di Indonesia. Atau dengan kata lain, mungkinkah pencitraan sebagaimana dipraktikkan presiden SBY lahir dalam sistem yang tidak demokratis. Dalam epistemologi ilmu sosial, jawaban atas pertanyaan semacam ini dihadapkan pada benturan level analisis. Perubahan politik dramatis seperti halnya reformasi 1998, memiliki konsekuensi logis secara analitik. Sehingga butuh semacam teori mikro dalam menganalisa konteks partikular Indonesia dalam interkoneksinya dengan rezim global guna menunjukkan bahwa perubahan

<sup>11</sup> Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1999 Tentang Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi Indonesia.

dalam konteks makro (internasional) tidaklah selalu berdampak secara linier dalam konstelasi domestik.

Dengan kata lain, transformasi Indonesia ke arah reformasi dan sistem demokrasi adalah logika internal Indonesia yang tidak bisa dipisahkan secara analitik dari logika eksternal. Jika ditinjau berdasarkan dimensi kesejarahan, sesungguhnya teknologi *time space compressed* baru berkembang pada periode pasca reformasi. Pada intinya, era reformasi merupakan variabel yang melengkapi, namun tidak utama dalam memprakondisikan pencitraan. Sebagaimana yang diurai dalam bab pendahuluan, jika perubahan sosial akibat neoliberalisasi merupakan proses yang berlangsung dalam tempo yang tidak singkat. Begitu juga minimalisme peran negara dalam sektor informasi di Indonesia yang tentu tidak begitu saja langsung terjadi. Bahkan departemen komunikasi dan informasi sendiri mengakui reformasi telekomunikasi Indonesia bukan merupakan satu peristiwa, melainkan satu proses yang iteratif. Untuk restrukturisasi suatu perusahaan saja kebanyakan tidak dilakukan sekaligus dalam satu ketika. Justru kebijakan reformasi yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu yang terlalu singkat, tidak akan mencapai sarannya.<sup>12</sup>

Mendefinisikan apa saja yang tergolong instrumen pencitraan merupakan tugas selanjutnya dalam penelitian. Instrumen pencitraan identik dengan komoditas-komoditas post industrial. Post Industrial merupakan bagian dari upaya kapitalisme untuk menciptakan “kemasan” yang lebih menarik perhatian ketimbang substansi produk. Jean Baudrillard mengambil contoh iklan sebagai sampel dimana “kemasan” memberikan sensasi untuk dikonsumsi meskipun kemasan tidak senantiasa merepresentasikan substansi kualitas. Ketika berbicara tentang desain kemasan, perkembangan sektor ekonomi kreatif dalam derajat tertentu dapat dijadikan indikator melacak instrumen pencitraan. Dan tidak bisa dipungkiri pencitraan hadir dibingkai layaknya ekonomi kreatif dimana kemasan haruslah menarik.

Sektor informasi yang paling terkena dampak langsung dari kinerja teledensitas tidak lain adalah internet. Teknologi *world wide world* dalam internet menjadi contoh perubahan ruang yang mempermudah interaksi diskursus dalam

<sup>12</sup> Keputusan Menteri Perhubungan, *op cit*



ruang publik. Sebuah prakondisi neoliberalisme yang seringkali ditekankan oleh kaum *globalist* neoliberal seperti Thomas L. Friedman yang manyakini jika “*world is flat*” menyebabkan pasarbergerak secara cepat.<sup>13</sup> Melalui Grafik dibawah ini dapat diketahui jika Internet merupakan komoditas yang kurang berkembang pada periode Orde Baru. Internet baru menjadi komoditas dan terus bertambah dalam jumlah pelanggan hampir seratus persen setelah munculnya undang-undang telekomunikasi yang mendorong teledensitas menjadi mesin penggerak utama. Kinerja Teledensitas di Indonesia pasca reformasi menunjukkan adanya perubahan struktur informasi sebagaimana yang David Harvey sebut sebagai *time space compressed*. Perbandinganya dapat dilacak pada periodisasi Orde Baru dimana teledensitas hanya bergerak secara gradual dan sebatas teknologi komunikasi saja. Perkembangan liberalisasi bergerak sejalan dengan perkembangan telekomunikasi menyebabkan masyarakat memiliki akses komunikasi yang memadai<sup>14</sup>

Munculnya rezim multilateral ini tentu berbeda sekali dengan kelaziman yang berlaku bagi jasa telekomunikasi sejak dulu. Pelayanan telekomunikasi selalu dianggap sebagai jasa yang non-komersial dan pada umumnya diselenggarakan oleh negara dalam lingkungan monopoli. Lagi pula, sejak dulu konvensi internasional yang dituangkan dalam ITR (*International Telecommunications Regulation*) di bawah payung ITU (*International Telecommunication Union*) selalu didasarkan pada kedaulatan negara masing-masing dalam mengatur telekomunikasinya. Tabel struktur Informasi dibawah ini menunjukkan pergeseran dialektika kepemilikan kapital sektor informasi. Dari gambar 3.1. tersebut dapat disimak secara kronologis jika teledensitas dapat berkembang hampir seratus persen setiap tahunnya setelah Liberalisasi Infromasi tahun 1999. Undang Undang Liberalisasi tersebut menandai perkembangan konsepsi tentang ruang yang berbeda dengan era sebelumnya sebagai konsekusi perkembangan informatisasi.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Thomas Freidman, *op cit*.

<sup>14</sup> Palimbong, *Media Indonesia*, 2010, hal. 4.

<sup>15</sup> Kementrian Perhubungan, 1999, *op cit*.

**Tabel 3.2. Struktur Informasi di Indonesia** <sup>16</sup>

SEGMENT				STRUKTUR	PENYELENGGARA				
					HINGGA 2004	HINGGA 2005	HINGGA 2010	HINGGA 2011	
T E L E K O M U N I K A S I	J A R I N G A N	JASA	MULTIMEDIA	MULTIMEDIA INTERAKTIF	PERSAINGAN	TERBUKA			
				INTERNET	PERSAINGAN	TERBUKA			
		TETAP	JASA	JASA TELEKOMUNIKASI TETAP SAMBUNGAN INTERNASIONAL	PERSAINGAN (EKSKLUSIVITAS)	INDOSAT SATELINDO	+ TELKOM + OPERATOR LAIN		
				JASA TELEKOMUNIKASI TETAP SAMBUNGAN LANGSUNG JARAK JAUH	PERSAINGAN (EKSKLUSIVITAS)	TELKOM	+ INDOSAT + OPERATOR LAIN		
			JASA	JASA TELEKOMUNIKASI TETAP SAMBUNGAN LOKAL	PERSAINGAN (EKSKLUSIVITAS)	TELKOM + KSO + BBT		+ OPERATOR LAIN	
						TELKOM + RATELINDO		+ OPERATOR LAIN	
		BERGERAK	VAS (JASA NILAI TAMBAH)		PERSAINGAN	TERBUKA			
			GMPCS		PERSAINGAN	TERBUKA			
			SELULER		PERSAINGAN	TERBUKA			
			TRUNKING		PERSAINGAN	TERBUKA			
	RADIO PANGGIL UNTUK UMUM		PERSAINGAN	TERBUKA					
	SIRKIT SEWA TRANSPONDER SATELIT & PENJUALAN KEMBALI		PERSAINGAN	TERBUKA					
	JARINGAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS	PENYIARAN		PERSAINGAN	TERBUKA				
		PEMAKAI TERTUTUP	SRR; PIP	TIDAK ADA PERSAINGAN	RRI DAN TVRI				
			LAINNYA	TIDAK ADA PERSAINGAN	TIDAK DIREGULASI, KECUALI PENGGUNAAN FREKUENSI SWASTA				
		PEMERINTAH		TIDAK ADA PERSAINGAN	PEMERINTAH				
		DEPARTEMEN HANKAM		TIDAK ADA PERSAINGAN	ANGKATAN BERSENJATA				
		NON-CPE		PERSAINGAN					
		CPE		PERSAINGAN	TERBUKA				
	PERALATAN			PERSAINGAN					

Neoliberalisme tidaklah selalu diasosiasikan sebagai kepemilikan asing karena tabel tersebut menunjukkan kepemilikan pengusaha domestik. Secara analisis tabel diatas tidak dimaksudkan untuk memastikan jika era SBY merupakan jangkar awal neoliberalisasi sektor informasi. Hal tersebut karena sejarah perkembangan Neoliberalisme Indonesia tidak sepenuhnya berjalan dengan linier. Namun pada paragraph pertama telah menunjukkan Era pasca reformasi 1998 menunjukkan adanya diskontinuitas sektor-sektor yang diswastanisasi, dibandingkan dengan era orde baru. Neoliberalisme dalam berbagai aspek komoditas sejatinya telah terjadi pada era orde baru, seperti sumber daya alam, perbankan, namun kecuali sektor informasi sebagai implikasi dari GATs.

Penetrasi neoliberalisme ke dalam dunia politik, dimungkinkan melalui instrumen, yakni teknologi informasi. Teknologi informasi memberikan kekuatan ekstra bagi pasar finansial dan bursa efek untuk bertransaksi dengan cepat. Teknologi Liberalisasi informasi memungkinkan proses liberalisasi berjalan dengan sendirinya, ibarat pengusaha yang membiarkan perusahaanya berjalan sendiri karena sistem sudah berjalan. Kecenderungan tersebut paralel dengan

<sup>16</sup> Naskah Kajian Undang Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Dikaitkan dengan Perkembangan Konvergensi Telematika.

deskripsi terkenal Lyotard tentang kondisi paska-modern sebagai kondisi di mana kontrak sementara menggantikan institusi permanen.<sup>17</sup>

Meskipun kurang bernilai ekonomis, teknologi informasi sesungguhnya memiliki implikasi yang besar terhadap negara. Sebagai contoh Cina yang dianggap manifestasi negara merkantilis ternyata juga kesulitan membendung liberalisasi Informasi seiring kasus Goggle yang mengekspos diktatorial China. Tinjauan pustaka tersebut secara tidak langsung memperluas pemahaman atas neoliberalisme. Neoliberalisme selama ini didefinisikan secara praktis mengenai minimalisme peran negara dalam dinansial sebagaimana sepuluh poin versi John Williamson.<sup>18</sup>

Oleh karena itulah, *Market* dalam pengertian Harvey tidak hanya merupakan tempat sirkulasi barang dan jasa semata, Melainkan juga merupakan tempat transaksi *idea*, nilai, persepsi dan Citra sebagai suatu komoditas era informasi. Dengan kata lain, pasar bebas tidak hanya menjual produk materiil saja, tetapi juga produk imateriil dimana salah satu manifestasinya adalah marketing politik yang menjual citra. Neoliberalisme tidak lagi berpijak pada asumsi normatif tentang pasar sebagaimana pandangan liberal klasik Adam Smith. Neoliberalisme sangat meyakini pasar sebagai institusi yang bergerak secara alamiah, didasarkan pada "*the invisible hand*".<sup>19</sup> Sekalipun kebijakan luar negeri merupakan produk elitis, namun bukan berarti. Karena dengan fokus pada antek neolib, sama dengan menjustifikasi jika neoliberal kuat dalam tataran *black box*. Padahal neoliberalisme selain turut berjasa dalam memainkan logika pasar dalam upaya *marketing communication* pemerintahan SBY

Neoliberalisme tidak lagi berpijak pada asumsi normatif tentang pasar sebagaimana pandangan liberal klasik Adam Smith. Namun Neoliberalisme sangat meyakini pasar sebagai institusi yang bergerak secara alamiah, mengutip Thatcher yang menyebut "*There is no Alternative*". Seperti kita ketahui, neoliberalisme seringkali disinonimkan dengan fundamentalisme pasar karena keyakinanya didasarkan pada "*the invisible hand*".

<sup>17</sup> Jean Francois Lyotard, *Libidinal Economy*, (New York: Althone Press, 1994)

<sup>18</sup> John Williamson, *Latin American Readjustment: How Much has Happened*, (Washington: Institute for International Economics, 1989).

<sup>19</sup> Endre Szerso, "Between Neopositivism, Neoliberalism and Postmodernism", *Academic Press*, Vol.4, No.3, (2007), hal. 244-286.

Penjelasan tersebut membawa kita kedalam analisa mengenai ketersinggungan antara kapital dan informasi. Oleh karena itulah terdapat perbedaan antara konsep kebebasan pers dan Liberalisasi Informasi. Kebebasan pers memiliki keterkaitan dengan teori Imanuel Kant tentang relasi antara demokrasi dan *friendly policy*.<sup>20</sup> Namun Konsep Kebebasan pers lahir karena dilandasi oleh keyakinan bahwa media massa merupakan institusi netral yang menampilkan informasi senyatanya (*das sein*) dalam ruang publik. Namun dalam dunia Liberalisasi informasi, hasrat material merupakan menjadi lebih krusial ketimbang proyek pencerahan dan edukasi publik. Sehingga Informasi politik dikemas sedemikian rupa untuk menimbulkan sensasi entertainment dimana wacana politik harus dapat menjadi komoditas menarik. Ketika sudah mencapai taraf kejenuhan maka isu tidak lagi dikawal. Aspek inilah yang menyebabkan kenapa kebebasan pers di Indonesia tidak sepenuhnya berimplikasi positif.

Maka dari itulah perlu kiranya kembali pada asumsi Joseph Nye tentang *Paradox of Plenty* dan meninggalkan teori demokrasi Imanuel Kant. Media dalam era liberalisasi Informasi tidak sedemokratis yang dibayangkan Kant. Kekayaan Isu yang dimunculkan oleh media di Indonesia hanyalah mereproduksi kontroversi sekaligus turbulensi yang seketika bisa muncul dan hilang begitu saja. Isu yang dimunculkan media tidak menjadi suatu alat pengawasan yang fokus demi kebijakan yang pro kepentingan publik, melainkan sebagai komoditas. Dengan demikian, maka liberalisasi informasi merupakan konsep yang lebih presisi digunakan dalam penelitian ini ketimbang, katakanlah kebebasan pers atau demokrasi.

### **3.3. Pencitraan Politik Pra Liberalisasi Informasi di Indonesia**

Pencitraan politik sebagaimana yang telah dipaparkan dalam kajian teoritik di bab pendahuluan bukanlah sesuatu yang baru. Penelitian arkeologi menunjukkan data jika pesan komersial dalam menampilkan kampanye politik telah ditemukan di reruntuhan Pompeii dan Saudi kuno. Beberapa peneliti lainnya menemukan iklan di papyrus yang umum di gunakan oleh Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Pencitraan politik pada zaman dahulu tampil dalam rupa yang

<sup>20</sup> Viotti, & Kauppi, *op cit*

penuh dengan citraan kemegahan sang raja yang acapkali dikaitkan dengan simbol titisan Tuhan atau Dewa. Dengan kata lain, sejarah menunjukkan Pencitraan politik sesungguhnya bukanlah temuan baru dalam politik, dimana Pencitraan merupakan simbol dari politik sejak dulu.<sup>21</sup>

Membutuhkan suatu kehati-hatian dalam memetakan genealogi historis pencitraan politik di Indonesia. Terminologi pencitraan politik menjadi sangat populer pada periodisasi sistem pemilihan umum langsung dan cenderung dimonopoli oleh hadirnya sosok SBY. Namun pencitraan dalam pengertian sebagai strategi aktor untuk membingkai citra sejatinya telah dilakukan oleh para pendahulu SBY. Pencitraan juga menjadi bagian dari tata kelola politik masa Sukarno. Slogan Nasakom sebagai perpaduan antara Nasionalis, Islam, dan Marxis merupakan bagian dari upaya Sukarno menanamkan sebuah simbol tertentu pada publik. Sebuah simbol yang signifikan dalam perpolitikan pada masa itu sekaligus pengidentifikasian sosok Sukarno pada periodisasi tersebut. Sukarno juga tidak melupakan penampilan fisik sebagai bagian dari simbolisasi citra dimana kopyah dan jas memiliki makna tersirat yang hendak menunjukkan Sukarno sebagai sosok figur yang tetap menjunjung tinggi keraifan lokal tanpa harus meninggalkan pola berpakaian necis ala Barat.<sup>22</sup>

Pencitraan Sukarno tersebut kemudian menemukan titik klimaksnya dalam diplomasi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Keterlibatan aktif Indonesia dalam KTT Non Blok dan Konferensi Asia Afrika (KAA) merupakan wujud perlunya Indonesia untuk mempertahankan citra sebagai bangsa yang berpegang teguh pada konstitusi yang menekankan sikap anti kolonialisme. Sukarno, sekalipun dekat dengan blok Sovyet namun tetap teguh pada landasan normatif politik luar negeri bebas aktif dengan sterobosan GNB dan KAA tersebut. Status sebagai negara Islam pun tidak bisa dikesampingkan Sukarno dalam relasinya dengan Timur-Tengah dengan memberi dukungan pada palestina. Namun yang tidak bisa dilupakan adalah pada masa tersebut Sukarno terlibat perselisihan dengan Partai Islam Masyumi.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Yasraf Piliang, *op cit*

<sup>22</sup> Kasenda, Peter, Mengenal Sukarno melalui Teks. Makalah disampaikan dalam pemikiran pendiri bangsa forum megawati institut, 17 april 2012.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Tidak ketinggalan pencitraan juga terlihat pada periodisasi Suharto dimana beliau hadir sebagai sosok yang kurang tertarik dengan isu luar negeri karena prioritasnya pada pembangunan. Bahkan presiden Suharto kental nuansa permusuhan dengan mahzab komunis serta tidak ketinggalan Islam garis keras. Masih segar dalam ingatan saat periodisasi akhir 1980an menjelang runtuhnya komunisme, Suharto baru mulai menggeser kebijakan luar negerinya untuk lebih bersahabat dengan negara Islam, dan aktif membantu Palestina. Presiden Suharto lebih dikenal dengan sebutan bapak pembangunan. Dalam periode orde baru, lagu Bapak Pembangunan yang dinyanyikan Titik Puspa gencar ditayangkan oleh TVRI dan televisi swasta lainnya merupakan suatu bentuk kultus permainan tanda yang dilakukannya. Pencitraan tersebut dalam derajat tertentu berimplikasi pada artikulasi kebijakan luar negeri, terutama ketika berkaitan dengan utang luar negeri untuk pembangunan nasional. Namun tidak bisa dipungkiri citra sebagai bapak ASEAN turut mewarnai konstelasi diskursif kebijakan luar negeri pada periodisasi orde baru.<sup>24</sup>

Kuatnya sosok Suharto pada masa orde baru menemukan antitesisnya pada sosok Megawati. Popularitas didapatkan Megawati terutama sejak dirinya terpilih sebagai ketua umum PDI pada kongres di Medan yang tidak direstui oleh Suharto. Sejak saat itulah, Megawati kemudiannya diangkat media sebagai ikon perlawanan terhadap Orde Baru sekaligus simbol kebangkitan ekonomikerakyatan<sup>25</sup> Megawati tidak bisa dipisahkan dari simbol putri proklamator yang tertindas pada zaman Orde Baru yang berideologikan kerakyatan dan cenderung “abangan”. Oleh karena itulah sentimen dari kalangan Muslim tidak bisa dipisahkan dari sosok Ibu Megawati.

Begitu pula Gus Dur yang identik dengan pencitraan sebagai bapak pluralisme. Gus Dur merupakan tokoh yang juga sering berseberangan dengan rezim orde baru. Namun karena citra pluralisme itulah, Gus Dur mendapat tantangan dari kaum Islam dari kalangan modernis dan radikal. Dalam konteks luar negeri, muncul tuduhan Gus Dur merupakan sosok Islam sesat karena

<sup>24</sup>Benedict Khang leong, “Indonesian Foreign Policy: Change And Continuity Amidst a Changing Environment”, Vol. 24, No. 2, 1998, hal.67-89.

<sup>25</sup> Budi Setyono. “Iklan dan Politik. Kampanye Periklanan Pemilihan Umum 2004”, diakses <http://www.siwah.com/pendidikan/marketing-politik/iklan-politik-resensibuku.html>, pada 4 April 2012, pk.21.23.

memiliki hasrat ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Menteri Luar Negeri Alwi Shihab ers Gus Dur mengeluarkan suatu konsep *Ecumenical* yang sesungguhnya mengandung banyak spirit Islam moderat namun ternyata menyebabkan kontroversi.

Tanpa disadari penulis dihadapkan pada problem mengenai dimana sebaiknya mengklasifikasikan kedua presiden ini. Meskipun Gus Dur dan Megawati berada dalam periodisasi pasca reformasi, namun penulis memandang pencitraan yang dilakukan keduanya berbeda dengan SBY. Dengan kata lain kedua presiden terindikasi melakukan pencitraan, namun apakah pencitraan keduanya terpengaruh oleh Liberalisasi Informasi?. Perlu kiranya untuk melakukan perbandingan sejarah dalam melacak perbedaan karakteristik ketiga presiden tersebut. Liberalisasi Informasi terjadi pasca 1999, namun tidak seketika itu implikasinya merasuk dalam ranah politik.

Perbedaan dapat dilacak ketika melihat mekanisme kampanye dan segmentasi ideologis antar ketiganya. Citra Gus Dur dan Megawati lebih pada faktor ideologis, sedangkan citra presiden SBY merupakan karakter personal. SBY lebih mengandalkan pada teknologi informasi dan media sebagai penstimulus citra, sedangkan citra Megawati dan Gus Dur dikemas oleh para tim sukses dan pendukungnya. Maka tidak heran jikalau tingkat popularitas kedua presiden tersebut cenderung *fix* karena memiliki akar pendukung. Sebaliknya tingkat popularitas SBY cenderung *floating* mengikuti pemberitaan dalam dunia virtual yang acapkali berubah ubah.<sup>26</sup> Perbedaan determinan tersebutlah yang menjadi stressing point jikalau tidak semua pencitraan diprakondisikan oleh liberalisasi informasi.

Kampanye lewat iklan politik merupakan ikhtiar untuk menciptakan, meminjam istilah Jean Baudrillard sebagai “*pseudo-event*” (peristiwa semu).<sup>27</sup> *Pseudo event* ini bukanlah kejadian yang spontan, melainkan direncanakan, dideseminasi dan ditanamkan melalui bantuan media massa. Boleh jadi orang menganggap pseudo event itu sekadar rekayasa, manipulasi yang dilakukan lewat media, seperti dikatakan Baudrillard pseudo event adalah “*the new kind of novelty*.”Citra (image) yang mencuat dari media massa (termasuk

<sup>26</sup> Ali, “Diplomasi Dua Kaki”, *Harian Rakyat Merdeka*, 20 November 2006.

<sup>27</sup> Jean Baudrillard. *op cit.*, hal 112.

iklan politik) sejatinya merupakan tegangan antara apa yang terlihat dan peristiwa yang “sungguh-sungguh” terjadi. Seperti dikeluhkan Yasraf Piliang dalam “Kata Pengantar” dimana “Kekuatan mantra elektronik telah menghanyutkan para elit politik dalam gairah mengontruksi diri, tanpa peduli relasi citra itu dengan realitas sebenarnya”.<sup>28</sup> Tapi, bukankah yang tampak “otentik” dalam iklan juga sesuatu yang dirancang dan diciptakan juga? Bisakah realitas dipindahkan “apa adanya” melalui proses mediasi yang melibatkan proses seleksi, kombinasi dan konstruksi?.

Dengan kata lain, sebelum terpilihnya SBY pada 2004, liberalisasi informasi belumlah menjadi determinan pencitraan sebagaimana yang dipraktikkan SBY sebagai pencitraan defensif. Lalu apa *feature* yang dapat menjadi komparasi distingtif antara pencitraan era sebelumnya dengan pencitraan yang diasumsikan merupakan konsekuensi dari liberalisasi informasi? Terlihat bahwa Gus Dur dan Megawati memainkan pencitraan yang tidak bisa dilepaskan dari warna ideologis partai sehingga disebut sebagai pencitraan offensif yang sejatinya inheren dengan era presiden sebelum reformasi. Dengan demikian Kaburnya ideologi menjadi kata kunci yang tepat untuk menggambarkan keunikan dari pencitraan era Liberalisasi Informasi.

Namun sebagaimana yang menjadi metodologi penelitian ini bahwa neoliberalisme bukanlah aspek makro yang pasti berlaku universal. Dengan kata lain tidak selalu liberalisasi informasi berimplikasi pada pencitraan. Pencitraan tidak signifikan dalam kebijakan luar negeri, jika mengambil contoh negara yang memiliki buku pedoman kebijakan luar negeri yang *rigid* seperti Inggris dan AS. Inkonsistensi substansi kebijakan luar negeri dapat pula diruntut dari negara dengan ideologi yang mapan seperti Amerika, Eropa dan Asia Timur yang modus diplomasinya dapat dibingkai kedalam sebuah warna-warna ideologi negara yang khas sehingga pencitraan dirasa menjadi aspek yang tidak begitu krusial.

Kesulitan utama analisa neoliberal adalah menentukan wujud neoliberalisme itu sendiri. Tersirat dalam buku “*empire*” karya Hardt & Negri yang menyatakan bahwa kapitalisme informasi bergerak secara *multitude* dimana lokasi kekuasaannya mengalami *de-centering* sehingga sulit diidentifikasi batas-

<sup>28</sup> Yasraf Piliang, *Transpolitika*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2005)



batas territorialnya .<sup>29</sup> Liberalisasi Informasi bergerak dengan pola yang sebagaimana asumsi Hardt dan Antonio Negri.

Neoliberalisme Informasi dalam konteks ini dipandang sebagai struktur yang menjadi prakondisi. Namun salah satu prinsip dalam neoliberalisme yang sering diabaikan adalah logika ketidaksengajaan termasuk otonomi pemerintah dalam menentukan pilihan *million friends zero enemy*. Asumsi tersebut mengembalikan ingatan kita kepada konsensus washington yang didalamnya sengaja dilakukan untuk meliberalisasi perekonomian. Dengan kata lain konsensus washington sejatinya menunjukkan inkonsistensi dengan prinsip ketidaksengajaan yang khas dari gerak neoliberalisme. Disinilah perlunya untuk mereinterpretasi neoliberalisme bukan sekedar pemikiran yang ekonomi sentris.

Terlebih setelah menyimak asumsi Nicholas Onuf yang menguraikan dua istilah menarik, yakni spontanitas dan intensi dalam Neoliberalisme.<sup>30</sup> Pemahaman akan kedua *keyword* tersebut mengantarkan pada pemahaman bahwa pasar bebas bergerak secara alamiah. Dengan kata lain, pilihan tiap-tiap individu dalam transaksi ekonomi akan memiliki efek kumulatif terhadap institusi politis. Pendapat Nicholas Onuf terinspirasi dari pemikiran bapak neoliberal Frederick Hayek yang berujar jika aktivitas ekonomi secara kumulatif dan gradual dapat menstimulus institusi politis sekaligus menunjukkan bahwa perilaku politik dilahirkan dari transaksional pasar.<sup>31</sup>

#### **3.4. Pencitraan Politik pasca Liberalisasi Informasi**

Sebagaimana yang dijelaskan melalui kerangka teoritik dimana Liberalisasi Informasi ditandai oleh perubahan struktur dan instrumen politik. Liberalisasi Informasi memungkinkan adanya kreatifitas baru dalam perpolitikan. Perubahan struktur informasi tersebut tersebut salah satunya dapat ditinjau dari nuansa dalam perubahan Iklan politik dalam era pemilu 2004. Iklan pemilu 2004 lebih menonjolkan figur capres dan cawapres yang berbeda dengan pemilu 1999 yang masih menekankan simbol partai politik. Selain itu, perkembangan lembaga

<sup>29</sup> Michael Hardt, & Antonio Negri, *Empire*, (Harvard: Harvard University Press, 2000).

<sup>30</sup> Nicholas Onuf, "Institution, Intention, and International Relation", *Review of International Studies*, Vol.28, No.1, Maret 2002, hal. 211-228.

<sup>31</sup> Frederick Hayek, *The Road of Serfdom*, (Cambridge: Polity Press, 2008), hal. 90-94.

marketing politik dan lembaga *survey* politik menyajikan suatu wahana baru dalam mengukur persepsi publik yang hadir memarakan penyelenggaraan pemilu 2004.<sup>32</sup>

Tranformasi politik pada Pemilu 2004 berlangsung Khas karena berada dalam konteks historis perkembangan media yang tidak terkontrol. Yasraf Amir Piliang mengemukakan adanya paradoks dalam dunia virtual sebagai efek dari liberalisasi informasi. Ketika teknologi informasi diharapkan membantu masyarakat memahami realitas, Teknologi informasi justru semakin mengaburkan antara yang realitas dan yang simulasi. Oleh karena itulah, keunikan politik dalam Era Liberalisasi Informasi ialah kaburnya batas-batas antara dunia *entertainment* dan dunia politik. Dalam konteks keindonesiaan, munculnya selebriti yang mengandalkan aura fisik dan popularitas kian menjadi *trend* dalam ranah politik, meskipun tidak jarang para selebriti tersebut diragukan kapabilitasnya dalam mengeksplorasi wacana politik.

Implikasinya, muncullah figur-figur dalam perpolitikan yang dalam derajat tertentu sesuai dengan karakter tontonan masyarakat. Seperti hanya Filipina, dimana interseksi antara dunia *entertainment* dan dunia politik ditandai dengan munculnya Joseph Estrada. Jauh kebelakang, politik selebritis juga sempat melanda AS dimasa pemerintahan Ronald Reagan yang merupakan seorang aktor. Namun yang menarik, Ronald Reagan memproklamasikan model kebijakan *reaganomics* yang menjadi simbol “neoliberal” di zamanya. Namun kedua presiden tersebut muncul sebagai sampel politik pencitraan yang ternyata justru mengeluarkan kebijakan luar negeri yang “keras”. Joseph Estrada terlibat dalam upaya meredam MLFP, sedangkan Ronald Reagan bersikap asertif dalam menaggal komunisme. Kedua sampel pencitraan tersebut adalah contoh kontradiktif dengan presiden SBY yang justru mengarahkan kebijakan luar negeri kepada spirit *Million friend zero enemy*. Komentar dikemukakan oleh sutrdara Garin Nugroho dalam menyikapi politik pencitraan di Indonesia. Garin Nugroho dalam karyanya “opera sabun” menunjukkan adanya diplomasi

<sup>32</sup> Haris, S & Syafarani, T, “Pola Kecenderungan Perilaku Memilih Pemilu 2004”, diakses dari <<http://www.pdii.lipi.go.id/index.php/.../6409/6410.pdf>, pada 3 Maret 2012, pk. 23.10.

melankolia yang dilakukan presiden SBY.<sup>33</sup> Politik melankolia ini terbukti dapat mempengaruhi persepsi publik, terutama dikaitkan dengan logika sinetron Indonesia. Sebagaimana yang dicontohkan pada paragraph sebelumnya dimana pencitraan disakiti acapkali dipakai pak SBY dalam konferensi pers. Apalagi ditengah semarak musik Melayu yang tengah banyak dinikmati masyarakat Indonesia dimana kesedihan didramatisasi secara berlebihan tanpa argumen yang jelas. Pakar komunikasi berpendapat bahwa dalam adegan pencitraan senantiasa ada dramaturgi yang dibutuhkan untuk mengguncang ketidaksadaran penonton<sup>34</sup>. Sekalipun tidak terdapat kaitan yang kausalitas antara perilaku memilih dengan politik dramatisasi, namun secara korelasional setidaknya memiliki kaitan.

Acapkali interseksi antara entertainment dan dunia politik menjadi ambivalen dimana citra karakter jauh lebih penting dibandingkan ideologi. Presiden SBY merupakan pemimpin tampan dan santun yang sesuai dengan karakter tontonan masyarakat menjadi sebuah Simbolisasi yang dikonsepsi oleh tim kampanye SBY pada pemilu 2004. Selain itu, kemampuan SBY dalam menyanyi ditonjolkan sehingga secara tak langsung dapat membentuk persepsi publik bahwa SBY merupakan presiden yang santun dan melankolis. Ditambah lagi, Jenis pakaian, *gesture*, gaya rambut dan gaya bicara juga menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari pencitraan seiring dengan hadirnya marketing politik seperti Fox Indonesia. Dalam konteks anggaran, pemilu 2004 menyedot dana yang jauh lebih besardibandingkan pemilu 1999 dimana lebih dikeluarkan untuk pencitraan. Dalam konteks neoliberal, pemilu merupakan perwujudan dari kapitalisme post industri, yakni perusahaan *advertising*.

Dengan kata lain, pencitraan politik tidak muncul dengansendirinya, melainkan dikonstruksi oleh adanya epos historis yang mendahuluinya, yaitu adanya perubahan-perubahan struktur dalam perpolitikan. Salah satu perubahan struktur tersebut dapat ditinjau dari Iklan politik dalam era pemilu 2004 yang lebih menonjolkan simbol figur capres dan cawapres. Fenomena yang tentu berbeda dengan pemilu 1999 yang masih menonjolkan *motto* partai politik. Selain itu, perkembangan lembaga marketing politik dan lembaga *survey*

<sup>33</sup> Garin Nugroho, *Opera Sabun SBY*, (Yogyakarta: Obor, 2006)

<sup>34</sup> Lembaga Penelitian Penerangan Ekonomi dan Sosial, "Temuan Pokok Survey Nasional: Sikap Pemilih Pada Pemilihan Presiden 2004", Oktober 2005.

politik menyajikan suatu instrumen baru guna mengukur persepsi publik yang hadirmemarakkan pemilu 2004 dan dalam derajat tertentu mempengaruhi persepsi publik. Struktur yang pada akhirnya membuat Pemilu 2004 menjadi khas adalah liberalisasi Informasi, ketika ideologi partai mulai ditinggalkan menuju ke citra personal. Tim peneliti dari CSIS juga menemukan bahwa loyalitas Partai Demokrat (PD) sangat rendah. Hanya 18.7% mantan pemilih PD akan memilih PD lagi di pemilu 2009.<sup>35</sup> Berikut ini, menunjukkan jika terdapat karakteristik marketing politik yang berbeda antara pemilu 2004 dan 1999.

**Tabel 3.3 Tabel Perbandingan Pencitraan Era Liberalisasi Informasi dan Pasca Liberalisasi Informasi**

Ciri	Pre Liberalisasi	Pasca Liberalisasi
<b>Perkembangan Informasi</b>	Informasi masih berada dalam kontrol Negara	Informasi berada dalam kontrol Swasta
<b>Anggaran</b>	Anggaran banyak diasosiasikan pada kekuatan kampanye sehingga jumlah total belanja iklan hanya 36 miliar.	Anggaran dihabiskan pada iklan jumlah totalnya mencapai 282 miliar dengan jumlah partai hanya 24, dan pemilu 2009 3 kali lipat lebih besar dengan jumlah partai sedikit
<b>Basis Pendukung</b>	Basis Massa yang Tetap dan Ideologis	Floating, Popularitas mengukuti turbulensi di dalam ruang
<b>Metode Marketing</b>	Iklan masih menekankan pada sosialisasi nomor urut partai dan slogan partai	Anggaran iklan yang menonjolkan figur lebih besar ketimbang iklan yang menonjolkan partai
<b>Ideologi</b>	Citra lebih direpresentasikan oleh ideologi atau tradisi	Citra dipresentasikan lebih karena karakter personal ketimbang ideologi atau tradisi

Dari paparan data dalam tabel di atas tersebut, terlihat jika korelasi antara neoliberalisme sektor informasi dan pencitraan dapat dibuktikan secara kronologis. Prasyarat penting dalam mengimplementasikan pencitraan seperti media massa, iklan politik, citra dalam pemberitaan televisi, baru muncul pada

<sup>35</sup> Centre for International and Strategic Studies, "Perilaku Memilih Indonesia 2008", Jakarta, 24 July 2008.

periode pemerintahan menjelang pemilu 2004. Fakta tersebut menunjukkan jika era reformasi dan pemilihan umum langsung adalah variabel pendukung saja, bukan utama dalam menelaah efek liberalisasi informasi. Fakta ini Sekaligus merupakan alternatif jawaban dari pertanyaan mengenai mengapa skenario permainan simbol Megawati sebagai sosok teraniyaya rezim orde baru yang seharusnya menjadi modal citra, ternyata tidak menjadikannya sebagai preiden. Struktur-struktur pendukung pencitraan baru dapat dimanfaatkan oleh aktor politik pada pemilu tahun 2004 seiring dengan kemunculan SBY dengan metode pencitraan yang lain dari biasanya.

Pemilu 2004 menunjukkan suatu data bahwa Televisi selain menjadi kanal komunikasi ke pendapat umum masyarakat juga mampu menjadi pengadilan politik, sekaligus menjadi pelemahan karakter tokoh politik. Survey lembaga Tifa menunjukkan berita politik kini telah mencakup 36 persen dari proporsi berita lainnya.<sup>36</sup> Visualisasi Politik yang imanen dalam ruang televisi dapat menjadi alat untuk merepresentasikan kondisi politik sebagai panduan publik yang bekerja seperti mesin politik. Arti penting televisi dapat disimak ketika Survei preferensi pemilih LP3ES pada pemilu presiden 2004 menunjukkan bahwa mayoritas pemilih menentukan pilihannya karena mendapat informasi dari televisi sebanyak 66,2 persen responden. Sedangkan instrumen lainnya seperti radio, koran, dan kampanye langsung tim sukses hanya 33,8 persen. Era liberalisasi informasi menjadikan Televisi menjadi medium komunikasi politik yang krusial dimana visualisasi calon pemimpin menjadi perhatian. Dari survey juga diketahui jika para pemilih Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sebanyak 72,7 persen, mengakui bahwa mereka dipengaruhi oleh media televisi dibandingkan media masa lain saat menentukan pilihannya. Citra SBY di televisi naik ketika menjabat sebagai menkopolkam ditampilkan sebagai sosok yang tanggap mengatasi terorisme namun tetap santun.

Paradoks era informasi bukan hanya monopoli khas Indonesia, dimana kejadian di negara lain relatif sama dimana lebih mengutamakan sosok karakter ketimbang ideologis. *Institute for Political Communication* di Amerika pernah melakukan survei tentang faktor yang mempengaruhi keputusan pemilih dalam

<sup>36</sup> Yayasan Tifa, et al., "Laporan penelitian rating publik", Jakarta, Februari- April 2009.

pemilihan presiden. Temuannya menarik dan sepertinya tak jauh beda dengan kondisi hari ini. Hasil survey membuktikan 41% perilaku memilih ditentukan oleh karakter sang kandidat, 25% isu yang diusung oleh kandidat, 13% afiliasi partai, 13% keinginan perubahan kepemimpinan, dan 8,5% penampilan di media massa. Dari hasil survai ini tampak bahwa citra (*image*) karakter dari sang kandidat itu menjadi preferensi penting para pemilih.<sup>37</sup> Citra tak hanya muncul dari kontestasinya dengan kandidat yang lain, tapi juga secara umum memproyeksikan keinginan “karakter ideal” yang diimajinasikan pemilih. Hanya sayangnya, survey itu tak mengungkapkan kualitas apa saja yang harus dimiliki oleh seorang kandidat agar tampak ideal di mata para pemilihnya dan apa yang dianggap penting tentang kualitas itu bisa berubah dari masa ke masa..

Analisa terhadap Pencitraan di Indonesia akan menjadi lebih menarik ketika dibandingkan dengan fenomena serupa di Filipina. Joseph Estrada dan SBY sama-sama dipilih secara langsung karena figurinya yang populer di mata publik. Namun perbedaan keduanya terlihat sosok Estrada yang bukan hanya merupakan figur berpengalaman dalam dunia perfilmaan, namun juga terkenal sebagai sosok politisi tulen yang memulai jabatan politis dari senator. Berbeda dengan presiden SBY yang mana karirnya dimulai dari TNI dan kemudian menjabat menteri namun tak pernah terlibat dalam partai politik. Selain itu, Estrada berasal dari partai *First Filipino Republic* yang dominan dengan 33 persen suara dalam pemilu 1998 dan memiliki pengalaman kesejarahan yang berbeda. Bandingkan dengan partai demokrat yang merupakan partai menengah dan baru dibentuk dua tahun sebelum pemilu 2004.<sup>38</sup> Perbedaan selanjutnya, Estrada justru mengeluarkan kebijakan luar negeri yang keras ketika mencetuskan perang total dengan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*), yang mana tentukan kontradiktif dengan kebijakan luar negeri *Million friends zero enemy*.

Namun kesadaran presiden SBY untuk melakukan pencitraan pada hakikatnya merupakan kesadaran yang penting. Pencitraan dalam era liberalisasi

<sup>37</sup> Haris, S & Syafarani, T, “Pola Kecenderungan Perilaku Memilih Pemilu 2004”, 3 Maret 2010 diakses <http://www.pdii.lipi.go.id/index.php/.../6409/6410.pdf>. pada 2 Februari 2012, pk 09.45.

<sup>38</sup> Gun Gun Heryanto, “Marketing Politik dan Industri Citra”, *Seputar Indonesia*, 16 November 2009, hal. 4.

informasi menjadi wujud adanya upaya untuk tidak mengabaikan diskursus dalam ranah publik. Namun sungguh amat disayangkan ketika presiden SBY tidak mampu meninggalkan pencitraan sebelumnya yang secara tidak langsung menghambat upaya meredesain citra yang kontekstual.. Padahal pada suatu isu dimana pemerintah dituntut untuk mengedepankan sikap yang asertif terbebani oleh citra yang terlanjur melekat. Dengan demikian, maka penulis menganjurkan perlunya pencitraan yang lebih lentur dan sesekali perlu mengabaikan citra yang terlanjur melekat.

Oleh karena itulah, Pencitraan pada masa pemerintahan SBY memiliki karakter yang berbeda dengan pencitraan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Pencitraan bukanlah fenomena politik baru karena pencitraan sebagai kampanye dan propaganda telah menjadi praktik politik sejak zaman dahulu. Namun pencitraan pra era liberalisasi informasi dilakukan secara *top down* dan memiliki kecenderungan offensif. Sedangkan Pencitraan dalam era pasca liberalisasi informasi tidak sepenuhnya *top down*, namun lebih ke pola *bottom up*. *Bottom up* disini dipahami sebagai upaya yang tidak proaktif melainkan responsif dan defensif dalam merespon isu.

### **3.5. Liberalisasi Informasi: Segregasi Citra di tengah Turbulensi**

Subab terakhir ini disusun guna menganalisis secara lebih domestik anasir-anasir yang muncul subab kelima pada bab kedua. Dalam bab sebelumnya, kebijakan *Million friend zero enemy* hadir ditengah turbulensi persepsi publik. Implikasinya muncul upaya segregasi citra oleh pemerintah disatu sisi yang intens mempromosikan simbol *million friend zero enemy*, namun di sisi lain adalah intensitas gerakan perlawanan yang tidak kunjung berhenti mengkritisi implementasi kebijakan luar negeri Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan jika liberalisasi informasi memungkinkan adanya duel antara perlawanan antara pihak yang kontra dan pemerintah. Dengan kata lain, liberalisasi informasi bukanlah pemikiran yang langsung mempengaruhi pemerintah begitu saja. Di sisi lain neoliberal turut berjasa melahirkan suatu turbulensi isu sebagai konsekuensi perselingkuhan antara kapital dan informasi.

Banyak yang memandang neoliberalisme adalah rezim pemikiran yang anti gerakan sosial. Opini tersebut lahir sebagai sebuah tafsiran atas interpretasi Marxist tentang perlunya kekerasan untuk redistribusi kapital. Namun bagaimana jika gerakan sosial justru dibutuhkan demi perkembangan kapitalisme-neoliberal?. Dalam karyanya "*the brief history of neoliberalism*" Harvey menyebut jikalau Neoliberalisme memproklamirkan kelahiran "masyarakat informasi". Masyarakat informasi salah satu alasan mengapa negara seharusnya tidak mengintervensi perekonomian demi kesejahteraan karena ruang untuk kebebasan telah dibuka oleh teknologi informasi. Frederick Hayek dalam "*the road of serfdom*" bersikap optimis bahwa masyarakat informasi merupakan penanda dimana pasar bebas secara gradual turut membantu pembebasan masyarakat.<sup>39</sup> Sebaliknya kehadiran negara yang dominan justru dianggap manifestasi feodalisme yang mengganggu penyebaran informasi sebagai pembebasan masyarakat. Terlebih lagi jika melakukan perbandingan sejarah, maka kita akan dipertontonkan oleh fakta bahwa ide neoliberalisme berkembang dalam suatu epos historis yang dikenal sebagai "revolusi informasi" sekitar 1960an.

Jika Neoliberalisme sangat berkeyakinan bahwa intensitas gerakan sosial adalah karena didorong oleh kemajuan informasi, maka muncul sebuah pertanyaan besar, terutama jika membandingkan dengan kasus timur-tengah. Kenapa timur-tengah dengan kemajuan informasi yang masih belum *established* justru masif dalam melakukan gerakan sosial seiring sebagaimana yang kita saksikan pada tahun 2011. Sebaliknya, negara Asia timur dengan perkembangan informasi yang lebih masif, ternyata masih miskin terjadinya gerakan sosial. Bahkan Cina dengan tingkat melek informasi tertinggi di Asia malah menjadi contoh antitesis dimana perkembangan informasi yang pesat justru mengizinkan dominasi negara yang luar bisa besarnya dalam merepresi gerakan sosial. Hal yang sama juga ditemukan di Korea Selatan dimana hingga sekarang hanya ada (*people solidarity for participatory democracy*) PSPD yang aktif mengontrol pemerintahan. Perbandingan antara kedua aspek yang kontradiktif ini menjadi celah kritik terhadap isu *digital divide* dimana Teknologi informasi tidaklah selalu menstimulus segregasi ide bersama untuk melakukan gerakan perlawanan.

<sup>39</sup> Frederick Hayek, *The Road of Serfdom*, (Chicago University Press, 2004)



Optimisme bahwa perkembangan teknologi informasi senantiasa berbanding lurus dengan kesadaran untuk melakukan gerakan kritis ternyata tidak sepenuhnya berlaku universal. Contoh lainnya adalah Jepang yang menjadi contoh partikular unik meskipun selama ini terkenal dengan produsen teknologi informasi yang maju. Sebagai sebuah negara demokrasi, Gerakan sosial Jepang seolah tidak banyak berperan meskipun permasalahan politik juga tidak sedikit. Jepang merupakan negara ketiga terbesar dalam penggunaan internet di Asia dengan jumlah pengguna Internet hampir seratus juta, itu menunjukkan bahwa sekitar 78,2 persen dari seluruh populasi Jepang merupakan pengguna Internet. Yang menarik adalah bahwa situs yang paling sering diakses oleh masyarakat Jepang merupakan situs media sosial seperti *facebook*, *twitter* yang berdasarkan pengalaman Occupy, merupakan instrumen krusial yang memudahkan kemunculan suatu gerakan sosial.<sup>40</sup>

Tidak bisa disangkal justru muncul asumsi sebaliknya yang memandang bahwa informasi menyebabkan turbulensi, dan bukan segregasi. Dalam kasus koin untuk Prita Mulyasari misalnya, gerakan yang dimulai dari media sosial *facebook* dapat meraih simpatisan mencapai satu juta orang dapat berlangsung hanya dengan tempo lima hari. Nmaun hal kontradiktif ditemukan dalam kasus gerakan *facebook* untuk pembebasan Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah yang membutuhkan waktu lebih lama bagi mahasiswa untuk memunculkan reaksi jika dikomparasi dengan kasus Prita. Bahkan adegan bakar diri dari Sondang Hutagalung yang berupaya meniru aksi serupa di Tunisia ternyata kurang dapat menginspirasi lahirnya gerakan sosial. Ironinya, media sosial justru lebih aktif menyoroti kasus Nunun ketimbang aksi Sondang yang merenggut nyawanya didepan istana. Dengan demikian, maka paradoks ketika informasi dilempar ke tangan pasar, tersebut menjadi sulit dikontrol oleh siapapun.

Paradoks teknologi informasi kembali terjadi pada kemunculan gerakan Occupy di Indonesia yang diadakan pada November 2011. Gerakan Occupy Jakarta merupakan pergerakan yang diusung para demonstran yang mengusung isu anti kapitalisme, persamaan hak kemanusiaan, kemiskinan, lingkungan hidup sampai dengan tingginya tingkat pengangguran. Gerakan tersebut dilakukan

<sup>40</sup> "Top 20 Internet countries". Diakses dari <http://www.internetworldstats.com/top20.htm>, pada 13 November 2011, pk 22.34.

dengan menduduki gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) setelah sebelumnya juga menyebar undangan melalui dunia maya. Namun ironisnya, sebuah gerakan yang pada hakikatnya penting, ternyata justru nyaris tidak diliput oleh media. Media bahkan lebih memilih untuk menyoroti *reshuffle* kabinet ketimbang sebuah gerakan populis yang diwakili oleh berbagai NGO. Bahkan tidak ada respon apapun dari pemerintah terhadap tuntutan yang dikeluarkan Occupy Jakarta karena terlalu sibuk mengurus Kabinet baru.<sup>41</sup>

Logika Pasar bebas Informasi membuat visi dan model gerakan tiap hari bisa berubah karena tiap hari masyarakat berjumpa isu yang tubulen dan tidak jelas agenda jangka panjangnya. Mengutip Daniel Bell, pada era informasi setiap orang adalah jurnalis (*everybody's journalist*). Kontrak sementara melalui media inilah yang terus dikawal oleh masyarakat. Implikasinya, sistem yang berjalan masih tetap neoliberal, namun hanya berganti pada orangnya saja. Semisal tuntutan gerakan anti-neoliberal Indonesia untuk mengganti Sri Mulyani. Namun pasca ditinggalkan Sri Mulyani, nyatanya tetap saja Indonesia belum sepenuhnya melepaskan diri dari neoliberal. Hal tersebut lantaran neoliberal bukanlah antek. Neolib merupakan sistem yang selain mereproduksi kader neoliberal juga memungkinkan reproduksi gerakan perlawanan untuk mengkritik kapitalisme, demi kapitalisme yang lebih. Dengan demikian, mengutip Laclau dan Mouffe, kapitalisme informasi telah mereproduksi sensasi, dimana salah satu sensasi yang direproduksi adalah sensasi untuk melawan kapitalisme itu sendiri.<sup>42</sup>

Melalui perbandingan sejarah, akan terlihat jika Liberalisasi Informasi sejajar dengan neoliberalisasi. Susan Strange mengemukakan bahwa perekonomian pasca runtuhnya *bretton woods* dianalogikan seperti halnya kita bermain casino yang penuh ketidak pastian. Apalagi sistem moneter yang didasarkan atas *floating exchange rate* yang secara langsung memberikan kedaulatan bagi spekulasi untuk membeli mata uang yang tentu akan berdampak negatif bagi neraca keuangan negara. Belum lagi rezim pasar bebas dalam *casino capitalism* acapkali melestarikan sektor derivatif yang hanya mengejar

<sup>41</sup>“Jakarta Tolak Ekonomi Kapitalis” diakses dari <http://occupyindonesia.org/berita/dalam-media/84-occupy-jakarta-tolak-ekonomi-kapitalis->, pada 4 Desember 2011, pk.23.45.

<sup>42</sup> Ernesto Laclau, dan Chantal, Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy : Towards a Radical Democratic Politics*, (London dan New York: Verso, 2001).

pertumbuhan ekonomi finansial non-rii dan secara perlahan malah melemahkan perekonomian yang produktif.<sup>43</sup> Namun tanpa adanya perkembangan informasi, proses transaksi keuangan yang cepat dalam bursa efek sebagaimana yang ditekankan neoliberal tentu tidak terjadi. Sehingga pada periodisasi 1970an pemikiran neoliberal mulai menggema secara global dan diimplementasikan oleh tokoh tokoh seperti Ronald Reagan, Margaret Thatcher, dan tak ketinggalan Deng Xiaoping. Pada periode yang sama, GATT digantikan oleh WTO yang kemudian muncul sebagai institusi yang berpengaruh besar dalam liberalisasi sektor informasi.

Namun neoliberal dalam penelitian ini memandang dengan pencitraan sebagai analisis. Nuansa konstelasi diskursif begitu kental saat kita korelasikan kutipan pidato presiden SBY di forum internasional dengan tatanan simbolik citra presiden didalam negeri. Citra presiden SBY sebagai seorang muslim moderat menjadi modal dalam mengarungi pertentangan Barat dan Islam yang tengah terjadi. Hal tersebut dapat terlihat dari segmentasi ideologis yang dibawanya menjelang pemilu 2004. Meskipun partai Demokrat merupakan partai nasionalis, namun jenis nasionalisme yang dibawa bukanlah “abangan” seperti yang diklasifikasikan oleh Clifford Geertz. Nasionalisme yang diusung SBY berupaya untuk tidak menonjolkan pertentangan antara Islam ‘hijau’ atau abangan dengan tagline demokrat sebagai partai nasionalis-religius. Bahkan dalam pemilu presiden tahun 2009, otomatis SBY merupakan pilihan dari koalisi partai islam dimana banyak massa PKS, PPP dan PAN yang memilihnya. Konsepsi Islam yang dimiliki partai demokrat secara implisit merupakan manifestasi sikap non-konfrontatif yang khas dalam moderatisme *Million friends zero enemy*.

Kebijakanluarnegeripemerintah presiden SBY tidaksepenuhnya mengkomodasineoliberalismepar excellence. Kepercayaan penganut neoliberalismeseharusnya merefleksikan sebuah kebijakanluarnegeri yang liberal an sich sebagai antitesis dari radikal seperti penerapan kompromi, transaksional dan kooperasi yang an sich. Namun dalam prinsip jalantengah yang khas presiden SBY jugaberlandaskan spirit non-konfrontatif yang setidaknya mengandung unsur neoliberalisme. Tentu adanya kasus Indonesia

<sup>43</sup> Susan Strange, *Casino Capitalism*, (London : Blackwell, 1997)

menunjukkan adanya pengetahuan baru dan sekaligus menimbulkan keingintahuan yang mendalam mengenai dinamika neoliberalisme sekaligus implikasinya.

Implementasi Kebijakan luar negeri *zero enemy* selain meredefinisi secara tidak langsung berupaya memikirkan kembali apakah presiden SBY merupakan antek Neoliberalisme. Kata antek disini cenderung lebih merupakan konsep problematis ketimbang konsep analitis. Pengertian Antek seolah mengangankan optimisme semu bahwa ketika antek neoliberal tidak menjabat di Indonesia, maka bangsa ini akan terbebas dari ide neoliberalisme. Dengan demikian penelitian justru ingin menghindari adanya tuduhan tersebut dengan mengemukakan neoliberalis sebagai sebuah praktik/obyek kajian yang diprakondisikan oleh logika material. Dengan kata lain, penelitian ini hendak menunjukkan bahwa nilai multilateral ala neoliberal institusionalisme ternyata diterapkan dalam *million friends zero enemy* melalui logika pasar. Slogan *zero enemy* lebih dari sekedar slogan, yaitu merupakan sebuah kepercayaan, sehingga wajar jika disosialisasikan dengan sangat intensif.

Liberalisasi informasi menjadi konsep yang menunjukkan posisi penulis berbeda pandangan dengan konsepsi *dynamics equilibrium* yang mengasumsikan Globalisasi adalah determinan bagi sikap *million friend zero enemy*. Peneliti memandang yang terjadi di Indonesia adalah Liberalisasi informasi, bukan globalisasi. Penetrasi informasi di Indonesia terindikasi datang melalui intervensi lembaga finansial internasional IMF Melalui LOI butir ke dua puluh yang merekomendasi kepada Indonesia untuk meliberalisasi sektor ICT.<sup>44</sup> Selain itu, rezim *General agreement trade and service (GATs)* sebagai hasil perundingan WTO signifikan kontribusinya bagi melemahnya kontrol negara atas informasi. Fakta yang sekaligus menunjukkan jika terjadi liberalisasi informasi sebagai kondisi spesifik di Indonesia berimplikasi pada kebijakan luar negeri.

Redefinisi mengenai Neoliberalisme tersebut secara tidak langsung mengingatkan bahwa era neoliberalisme belum berakhir. "*Freefall*", menjadi ungkapan populer yang diperkenalkan Joseph Stiglitz sebagai gambaran terhadap perekonomian pasca krisis 2008. Setelah neoliberalisme selama puluhan tahun menghiasi struktur internasional dan selalu bisa bangkit sekalipun beberapa kali

<sup>44</sup> International Monetary Fund, "*Letter of Intent*", 22 April 1998.

ditimpa krisis, maka Stiglitz meyakini jika krisis 2008 telah menandai kejatuhan Neoliberalisme.<sup>45</sup> Amerika Serikat yang sepanjang sejarah paling lantang menyuarakan anti intervensi negara ternyata mengeluarkan *baillout* untuk memperbaiki perekonomiannya pasca krisis 2008. Sebaliknya Cina menjadi pusat perhatian karena pertumbuhan ekonominya yang pesat, padahal kebijakan ekonomi Cina yang banyak mengandalkan campur tangan negara merupakan model yang menyimpang dari Konsensus Washington. Asumsi mengenai *freefall* kembali diperkuat dengan mulai kembalinya peran negara dalam perekonomian sebagaimana yang dicontohkan Brazil, India, Rusia dan China (BRIC). Dengan kata lain, kita sedang memasuki suatu era yang dinamakan post konsensus washington, Sebuah era yang diasumsikan merupakan era kemunduran Neoliberalisme.

Namun sejatinya perlu dipikirkan kembali, apakah benar neoliberalisme telah mengalami kemunduran pasca krisis 2008?. Selama ini analisis mengenai neoliberalisme hanya berfokus pada sektor strategis seperti energi, dan finansial, dsb. Padahal terdapat produk yang meskipun kurang bernilai ekonomis namun memiliki peranan besar bagi kelangsungan neoliberalisme, yaitu teknologi informasi. Teknologi Informasi memungkinkan pasar bukan lagi sebagai suatu arena, namun pasar adalah aktor yang bergerak dengan logikanya sendiri sebagaimana keyakinan Thomas Friedman.<sup>46</sup> Problem akademis diatas memunculkan urgensi untuk melacak manifestasi neoliberalisme Informasi melalui kebijakan non ekonomi. Menarik ketika mengambil studi kasus Indonesia guna menelusuri neoliberalisme informasi. Pasca krisis 2008 menjadi tema akademis yang mengemuka sekaligus memancing perdebatan dalam studi ekonomi-politik internasional. Tinjauan diatas menunjukkan jika neoliberalisme memiliki intensi untuk melakukan ekonomisasi segala bidang, termasuk politik.

### **3.6. Kemungkinan Alternatif atas Kondisi Liberalisasi Informasi**

Penelitian ini dimulai dengan problematisasi mengenai sebuah *brand* yang populer dalam kebijakan luar negeri Indonesia era presiden SBY, yakni *one*

<sup>45</sup> Joseph Stiglitz, *Freefall America, Free Market and the Sinking of Global Economy*, (New York: Norton, 2009).

<sup>46</sup> Thomas Friedman, *The Lexus and Olive Tree*, (Chicago: Farrar Strauss & Giroux, 1999).

*million friend zero enemy*. Slogan tersebut pada awalnya hanya dipandang tidak lebih sebagai sebuah aksesoris semata, namun dalam realitanya slogan tersebut ternyata merupakan sebuah instrumen politis yang acapkali dipromosikan. Slogan tersebut diasumsikan signifikan secara politis ketika dikorelasikan dengan konteks kapan dan bagaimana simbolisasi ini dimunculkan. Ditinjau secara historis, slogan *zero enemy* lahir dalam nuansa dimana seorang presiden terpilih melalui kekuatan citra personal. Pencitraan, terlepas dari urgensinya secara substansial, nayasannya dapat merebut popularitas dalam tempo singkat dalam realitas perpolitikan Indonesia kontemporer.

Namun dibalik segala kisah keberhasilannya, pencitraan juga sekaligus memiliki potensi untuk menurunkan popularitas dalam tempo yang tidak kalah singkat. Menyadari potensi negatif yang bisa saja terjadi, muncul sebuah pertanyaan apakah slogan *million friends zero enemy* merupakan satu satunya simbol kebijakan yang memungkinkan dalam konteks kekinian?. Jawaban atas pertanyaan lanjutan ini dihadapkan pada banyak sudut pandang. Dari segi pemerintah, kebijakan semacam ini dapat menjadi benteng pertahanan citra yang hingga kini terbukti masih eksis ditengah turbulensi informasi yang terjadi. Namun pemerintah bukanlah subyek yang independen dimana persepsi publik tidak bisa diabaikan. Ada suatu masa dimana logika kejenuhan massa, karena seringkali citra tersebut diulang-ulang, bisa berpotensi membalikkan kondisi tersebut.

Kritik pun akhirnya tidak bisa dihindari terkait dengan urgensi simbolisasi *brand* yang dirasa kurang penting tersebut, termasuk juga kritik terhadap penelitian ini yang berupaya mengangkat topik yang diasumsikan kurang penting tersebut.. *Million friends zero enemy* merupakan sebuah mekanisme pertahanan yang memiliki efek distorsi pada ruang publik. Slogan *zero enemy* merupakan pintu masuk peneliti untuk menganalisis hal yang lebih luas. Slogan *zero enemy* lebih menunjukkan sebuah sikap dealership ketimbang leadership,

Setelah sistematisasi argumentasi telah ditemukan tidak kemudian membuat peneliti memaknai realitas tersebut secara *taken for granted* apa adanya. Tidak ada pengetahuan bebas nilai sebagaimana Robert Cox menyebut “ *theory is*

*always for someone and for some purposes*".<sup>47</sup> Meskipun demikian, bukan berarti kepercayaan terhadap tidak adanya *free value* tersebut menjadi apologia bagi peneliti untuk mencampuradukkan antara subyektifitas dengan data yang ditemukan. Namun karena penelitian dimulai dengan sebuah problematisasi, maka penelitian perlu diakhiri dengan solusi atas problem ini.

Peneliti berupaya membaca dengan seksama bagaimana kemungkinan keluar dari kondisi tersebut. Peneliti bersikap skeptis terhadap daya tahan kekuatan pencitraan dalam menghadapi serangan-serangan yang intens meskipun hingga kini masih eksis. Hal tersebut didasari oleh pencitraan sejatinya merupakan refleksi dari sebuah benteng yang kokoh. Justru karena terlalu kokohnya, pencitraan tidaklah dapat menjadi senjata yang luwes dan lentur. Kekakuan benteng citra tentu tidak tepat dalam menghadapi *paradox of plenty* yang dianalogikan seperti kondisi *web* yang cair dan senantiasa turbulen.

Tidak bisa dipungkiri, Indonesia membutuhkan gerak sentripetal untuk meminimalisir turbulensi informasi di era liberalisasi. Gerak sentripetal dapat disusun dari untaian-untaian pemahaman akan diplomasi yang seksama dari masyarakat Indonesia. Gerak sentripetal tersebut sejatinya merupakan tugas pemerintah sebagai pemimpin. Upaya yang didasari dari sikap proaktif pemerintah untuk berkomunikasi dalam ruang publik secara *two way communication*, bukan sebuah propaganda yang *one way communication*. Sedangkan arti penting slogan *million friends zero enemy* hadir dalam sebuah keinginan untuk mempromosikan sebuah kebaikan. Teringat sebuah ungkapan "cara terbaik untuk menjaga reputasi adalah bukan dengan menutupi kelemahan, namun mempertontonkan kebaikan". Namun begitu amat beresiko ketika kebaikan yang dipromosikan ternyata belum sepenuhnya memuaskan publik. Yang perlu untuk dipropagandakan adalah keberhasilan, lebih dari sekedar kebaikan. Ketika masalah personal, dan emosi dibawa ke dalam ruang publik, maka yang terjadi malah gerak sentrifugal yang mendesentralisasi segregasi ide bersama demi kebijakan yang asertif dan terlegitimasi publik. Isu ancaman kedaulatan dan TKI serta permasalahan sentimen agama sejatinya berpotensi besar

<sup>47</sup>Cox, Robert, "Critical Theory", dalam Burchill, S. et.al., *Theories of International Relation 3rd editio*,. (New York: Palgrav Macmilian, 2005), hal. 160-182.

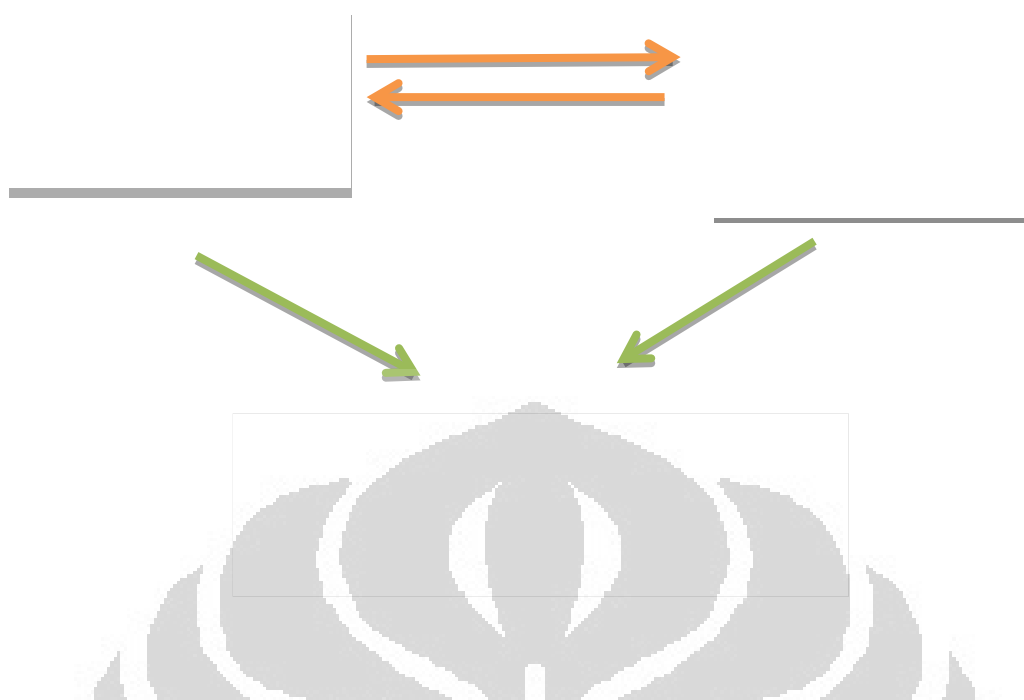
untuk menjadi pintu masuk lahirnya sebuah tekanan bagi pemerintah. Namun hingga sekarang turbulensi dari media massa meminggirkan potensialitas isu tersebut. Namun isu kebijakan luar negeri pada umumnya terpinggirkan oleh isu-isu domestik lainnya. Semisal korupsi dan pertikaian antar politisi yang seringkali memiliki rating yang tinggi.

*Million friends zero enemy* hadir dalam ruang dimana ketika yang simulasi dan yang realitas menjadi kabur. *Paradox of Plenty* merupakan teori yang dalam konteks penelitian ini dipandang sebagai prakondisi kekaburan antara simulasi dan realitas tersebut. Maka dari itulah kemasam menjadi tidak kalah penting ketimbang substansi dari kebijakan luar negeri. Citra kebijakan yang sebelumnya hanya sebagai aksesoris saja, ternyata hadir sebagai sebuah jimat menangkal musuh-musuhnya. Namun sebagaimana logika dalam *paradox of plenty*, persepsi publik bukanlah bersifat tetap. Ada suatu masa ketika logika kejenuhan dalam ruang publik telah terakumulasi karena repetisi kebijakan tersebut monoton dan berulang-ulang, maka akan berimplikasi pada posisi pemerintahan.

Peluang untuk perubahan struktural masih memungkinkan ketika desain liberalisasi dilawan dengan desain yang bersifat antitesis. Desain ruang publik merupakan instrumen yang penting untuk memurnikan kembali ruang publik Indonesia kontemporer. Desain yang dikejawantahkan dari upaya setiap elemen bangsa untuk memainkan etika diskursus ruang publik sebagaimana dianjurkan Juergen Habermas.<sup>48</sup> Bahwa ruang publik merupakan ruang yang seharusnya tidak terkontaminasi oleh demagog-demagog seperti halnya pencitraan. Negara seharusnya merupakan obyek dalam etika diskursus bukan subyek. Intervensi negara adalah diperlukan dalam kaitannya dengan menetralsir dan memproteksi ruang publik tersebut. Oleh karena itu, maka curhat, dan kritik bernuansa personal, bukanlah sesuatu yang bermutu untuk dibawa kedalam ruang publik. Ruang publik merupakan tempat bertemunya argumentasi-argumentasi kritis yang bermutu dan beradu untuk kemudian diartikulasikan sebagai bahan sebuah kebijakan yang merepresentasikan kepentingan publik.

<sup>48</sup> Juergen Habermas. *Theory of Communicative Action*, ( London: Sage, 2000)





**Gambar 3.4. Skema Alternatif atas Liberalisasi Informasi**

Gambar diatas menunjukkan perlunya buku putih kebijakan luar negeri Indonesia. Buku putih diperlukan agar dapat terjadi dialog yang terarah dalam ruang publik yang harmoni antara media informasi dan pemerintah. Dengan demikian maka kebijakan akan senantiasa berusaha untuk mendapatkan masukan dan inspirasi dari masyarakat. Konsepsi inilah yang ditawarkan Vujinovic mengenai perlunya diplomasi publik, dan bukan propaganda. Sedangkan pencitraan lebbih pada propaganda dimana pemerintah mensosialisasikan nilai *zero enemy* secara sepihak dan tidak ada dialog. Implikasinya liberalisasi justru memunculkan kontroversi karena tidak ada sinergi keduanya. Sebuah rencana buku putih yang telah diwacanakan lama namun hingga kini belum sempat untuk terealisasi sebagaimana yang juga diinginkan presiden SBY. <sup>49</sup>

Terlebih lagi, dalam konteks Indonesia eksistensi pencitraan memilikisyarat-syarattambahan,diantaranyaadalah pemilihan umum langsung yang dihiasi oleh liberalisasi Informasi era reformasi. Namun tidaksemuapemilihan umumlangsungjugamenyebabkanpencitraan politik yang

<sup>49</sup> Ezther Lastania,. “Perlu Buku Putih Kebijakan Luar Negeri”, 23 Februari 2012, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/02/23/078385923/SBY-Perlu-Buku-Putih-Kebijakan-Luar-Negeri>, diakses 2 april 2012, pk.21.34.

sama. Semisal contoh kasus AS dimana sosok presiden neoliberal yakni Ronald Reagan yang justru mengeluarkan kebijakan yang keras. Dengan kata lain, adanya pencitraan diadahi oleh akselerasi neoliberal yang mentransformasikan struktur-struktur informasi sebagai sarana pendukung pencitraan.<sup>50</sup> Dalam kasus Indonesia perhatian difokuskan pada kondisi pemilu 2004 yang mendorong adanya suatu strategi kontemporer dalam politik yaitu pencitraan politik. Pemilihan umum presiden langsung secara perlahan mendorong persepsi masyarakat untuk sedikit mengabaikan ideologi. Ideologi yang sebelumnya dimanifestasikan secara intens oleh partai politik, mulai bergeser ke figur ketokohan dan karakter personal. Dengan demikian maka tahun 2004 merupakan starting awal pengaruh Liberalisasi Informasi dalam perpolitikan Indonesia.

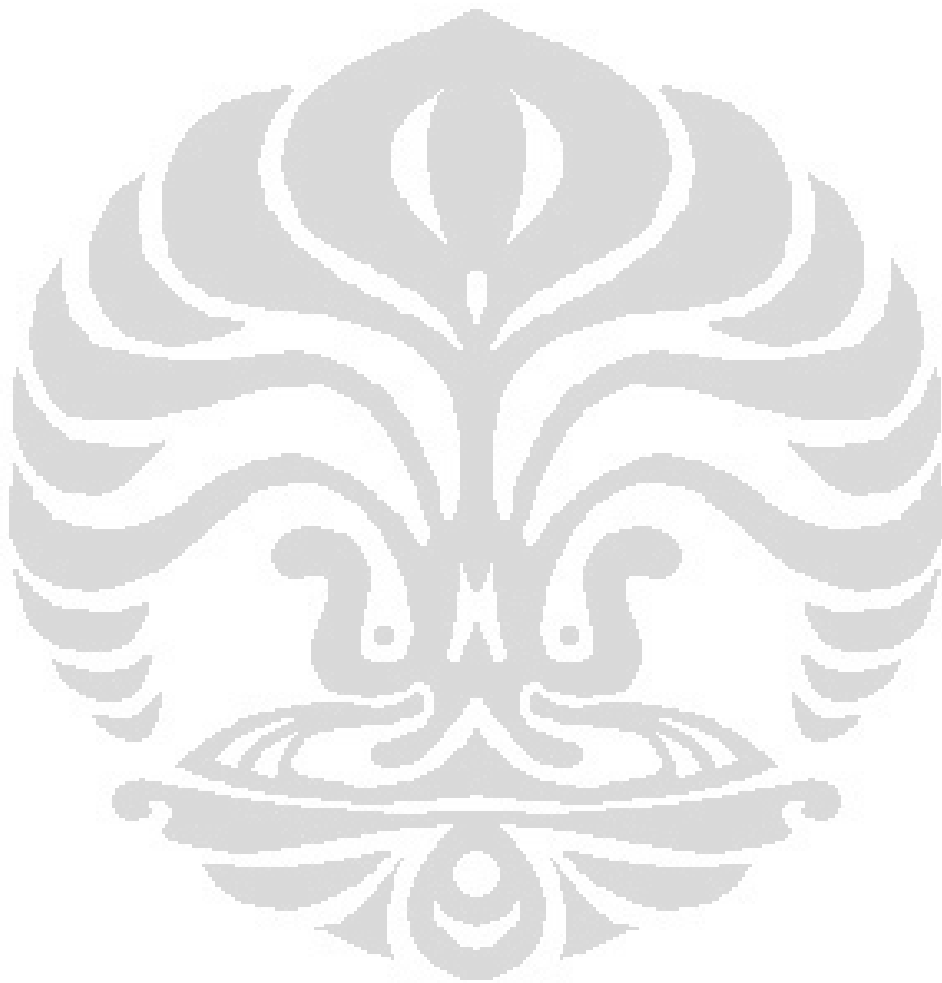
Lalu adakah jalan keluar dari kondisi liberalisasi informasi ini. Kemungkinan keluar bisa jadi kontradiktif ketika ternyata banyak masyarakat kurang berperan aktif. Fakta tersebut terrepresentasikan setelah kita menyaksikan masyarakat tidak secara signifikan menyuarakan sikap kritis dalam merespon isu TKI dan kedaulatan. Sebaliknya disisi lain, rating yang tinggi dalam tayangan-tayangan yang tidak penting mengindikasikan ketidakantusiasan publik untuk menyoroti kasus TKI dan kedaulatan. Namun hasrat untuk keluar jika memang dijalankan sejatinya bukanlah ikhwal utopis. Sebagaimana yang acapkali ditekankan, liberalisasi informasi bukanlah proses alamiah yang terjadi dengan tidak sengaja (*nature*). Dengan kata lain Liberalisasi informasi terjadi secara *by design* dimana ditatakelola melalui perselingkuhan antara akumulasi kapital dan teknologi informasi. Bukan pemerintah harus kembali mengontrol Informasi sebagaimana orde baru dan menihilkan kebebasan pers. Beban untuk mengawal informasi menjadi tugas masyarakat untuk *re-design* kondisi *paradox of plenty* agar tidak separadoks namanya. Beban yang sejatinya dimungkinkan untuk dilepaskan dalam ruang publik yang semakin terbuka.

Melalui analisa sebagaimana yang telah dijelaskan, fenomena liberalisasi informasi sebagai prakondisi pencitraan berlangsung sejajar dengan proses terpilihnya presiden SBY untuk kali pertama tahun 2004. Sekalipun, Liberalisasi informasi terindikasi ada sejak tahun 1999 melalui manifestasi peraturan

<sup>50</sup> Lihat kembali pada tabel perbandingan pencitraan dalam bab ketiga halaman 70.

pemerintah yang mengadopsi ketentuan GATS dari WTO dan LOI IMF, namun perkembangan Liberalisasi informasi hingga menjadi determinan dalam perpolitikan tidak langsung terjadi pada masa tersebut. Maka dari itulah, Meskipun pencitraan sebagai sebuah praktik telah diimplementasikan oleh para presiden pendahulu, namun praktik tersebut bukan sebagai respon atas liberalisasi informasi. Pencitraan pada era Liberalisasi Informasi memiliki stressing point yang berbeda dimana

Turbulensi, begitulah sensasi yang dirasakan saat menggambarkan konteks Liberalisasi Informasi di Indonesia. Tanpa adanya komando negara yang jelas, maka bukan politik yang mengontrol informasi, namun informasi yang politik. Implikasinya isu luar negeri seperti TKI dan Kedaulatan muncul dan hilang dengan sendirinya sebagai wujud kapitalisasi informasi. Namun terlepas dari segala kontradiksinya, Liberalisasi informasi tidak bisa dilupakan perannya dalam membuka ruang publik. Maka dari itulah, pencitraan *Million friend zero enemy* perlu sebagai resistensi atas liberalisasi informasi. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya pencitraan dengan nuansa dan instrumen yang berbeda jika dibandingkan dengan pencitraan dalam periode pre liberalisasi informasi.



## BAB IV KESIMPULAN

Terdapat dua preposisi yang muncul dari pembahasan bab sebelumnya. Pertama, slogan *Million friends zero enemy* sebagai sebuah pencitraan yang senantiasa terbentur pada problem konsistensi. Sedangkan preposisi kedua menyatakan bahwasanya pencitraan merupakan upaya resistensi dari kondisi liberalisasi informasi. Kedua preposisi tersebut bukanlah *statement* yang berdiri sendiri. Maka dari itulah, Bab keempat akan diawali dari proses konseptualisasi guna menunjukkan adanya korelasi antar keduanya. Subbab pertama tidak lain merupakan kolaborasi antar kesimpulan dua bab sebelumnya. Pada subbab selanjutnya akan ditunjukkan adanya implikasi teoritik sebagai hasil dari konseptualisasi tersebut. Kemudian pada bab menjelang akhir akan rekomendasi terhadap keberlanjutan semboyan *Million friends zero enemy*.

### 1.1. Konseptualisasi dan Implikasi Teoritik

Pencitraan dan Liberalisasi Informasi menjadi dua *keyword* yang secara intensif hadir mengiringi setiap kronologi tulisan ini. Kembali pada preposisi yang diajukan di awal, maka *million friends zero enemy* tidak bisa dipisahkan dalam kaitannya dengan pencitraan guna mempromosikan sikap persahabatan ke segala entitas (*all direction foreign policy*). Mencari sebanyak Temuan dari pengamatan menunjukkan terdapat koherensi dengan citra personal presiden SBY. Citra personal dalam derajat tertentu menjadi beban karena citra personal presiden menunjukkan basis massa yang tidak mendasari kesetiaannya tersebut pada ideolog. Implikasinya, ketika ada penyimpangan pada citra personal, maka reputasi yang jatuh akan berkonsekuensi pada posisi pemerintah.

Pemerintah menempatkan semboyan *zero enemy* sejatinya tidaklah dimaksudkan untuk menggantikan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Bahkan *navigating a turbulent ocean* merupakan sebuah ungkapan yang terinspirasi dari filosofi Bung Hatta yaitu “mendayung diantara dua karang”. Namun jika ditelusuri lebih seksama, ungkapan tersebut memiliki perbedaan dalam derajat tertentu. *Million friends zero enemy* merupakan ungkapan amelioratif dari

dilematisasi antara siapa musuh sesungguhnya dan siapa teman sesungguhnya. Di era Bung Hatta, karang yang dimaksudkan adalah jelas, antara blok barat dan blok timur. Sedangkan konsep *turbulent ocean* mengasumsikan lawan yang bisa muncul tanpa diduga. Dengan demikian *million friends zero enemy* hanyalah repetisi seperti yang diimplementasikan pada awal pemerintahan Presiden SBY periode sebelumnya.

Barangkali banyak yang tidak sepakat jika muncul argumen yang menyatakan bahwa pencitraan SBY merupakan efek dari Liberalisasi Informasi yang diasumsikan terjadi pasca reformasi. Ketidaksepakatan tersebut dikarenakan Megawati dan Gus Dur ternyata tidak mengandalkan pencitraan personal meskipun telah memasuki periode pasca liberalisasi informasi pasca diratifikasinya *Letter Of Intent* IMF dan GATs dari WTO. Bahkan pada masa tersebut, pencitraan bahkan bukanlah menjadi strategi politik yang penting bagi legitimasi kekuasaan.

Namun inilah alasan mengapa penelitian ini menggunakan logika penelitian kualitatif karena hubungan antar konsep tidak merupakan hubungan kasualitas. Terdapat rentang waktu yang cukup berjarak antara kapan liberalisasi informasi hadir, sampai mengkondisikan pencitraan. Akan tetapi, meskipun bukan sebab-akibat namun liberalisasi berpengaruh sebagai bentuk tekanan yang kemudian diresistensi oleh pencitraan. Sebagaimana yang digambarkan pada kerangka teori dengan analogi *offense* dan *defense*. Dengan demikian, *Million friends zero enemy* dalam penelitian ini diasumsikan sebagai suatu konsekuensi dari proses neoliberalisme.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan suatu cara pandang universal yang berlaku di semua negara bahwa pencitraan senantiasa mengakibatkan kebijakan luar negeri *zero enemy*.

Sehingga pencitraan dalam kasus negara lain belum tentu selalunya mengakibatkan kebijakan luar negeri bersemangatkan *zero enemy* seperti Indonesia. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh kerangka teoritik, bahwa logika makro tidak selalu berdampak sama di setiap negara. Indonesia menjadi model analisis yang unik lantaran pencitraan presidennya tidak diekstraksi melalui ideologi kepartaian,

melainkan citra personal. Implikasinya, citra personal presiden SBY akhirnya menjadi signifikan dalam kebijakanluarnegerinya.

Dengan demikian kondisi liberalisasi informasi bukanlah tuntutan zaman. Melainkan disetir oleh dialektika material yang mengkonstitusi tuntutan zaman tersebut sebagai bagian dari akumulasi kapital. Ini sekaligus merupakan kritik atas Joseph Nye yang *taken for granted* dalam menganalisis fenomena *paradox of plenty* abad ke 21. Joseph Nye memandang *paradox of plenty* semata karena perkembangan sains dan teknologi. Sedangkan penelitian ini *paradox of plenty* merupakan konsekuensi dari akumulasi kapital dibalik perkembangan sektor informasi. Sebuah kondisi *paradox of plenty* yang digambarkan presiden SBY sebagai *navigating a turbulent ocean*.

Konsekuensi dari terkaitnya kedua konsep utama, yakni neoliberalisme dan kebijakan luar negeri tanpa disadari sampai pada ranah perdebatan mengenai apakah kebijakan luar negeri merupakan subyek atau obyek. Perdebatan tersebut sejatinya merupakan refleksi dari epistemologi ilmu sosial mengenai dikotomi *agency* dan struktur yang terfleksikkan dalam great debate keempat Apakah subyek penelitian merupakan subyek yang sangat otonom dalam menentukan perilakunya, atau perilaku tersebut sesungguhnya terdeterminasi oleh struktur. Peneliti berpandangan, kebijakan luar negeri bukanlah sebuah kebijakan yang lepas begitu saja dalam dimensi ruang dan waktu. Kebijakan luar negeri dalam konteks brand kebijakan *zero enemy* merupakan obyek dari struktur yang disebut Nye sebagai "*paradox of plenty*".

Kebijakan luar negeri dalam era "*Paradox of Plenty*" beradadalam gempuran publikasi yang artifisial dan bersifat temporal. Oleh karena itulah Joseph Nye menekankan perluehati-hatian aparatuir diplomasi dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri demi menjaga reputasi. Tingkat popularitas dan dukungan memungkinkan untuk bisa berubah secara turbulen tanpa pernah diprediksi. Dengan demikian *soft power* penting dalam upaya untuk tidak mengabaikan masalah perspesi tersebut. Pertanyaan besarnya ialah, apakah slogan *million friend zero enemy* benar-benar berfungsi sebagai *soft power*?

Tidak dapat dipungkiri, kedua konsep tersebut akhirnya menjadi refleksi lanjutan atas teori Nye tentang “*Paradox of Plenty*”. Namun teori Joseph Nye menekankan pentingnya diplomasi publik sebagai manifestasi dari *soft power*. *Soft power* dausmsikan Nye merupakan instrumen presisi dalam menghadapi kondisis *Paradox of Plenty*. Sedangkan dalam kasus *one million friend zero enemy* memperlihatkan bahwa Pencitraan dan diplomasi publik merupakan dua manifestasi diplomasi yang berbeda Dalam kaitanya dengan diplomasi publik inilah terlihat teori Nye tidak sepenuhnya relevan dalam konteks kasus Indonesia.

Joseph Nye dalam derajat tertentu pas ketika menjelaskan pentingnya *soft power* dalam era *paradox of plenty*. Salah satu contoh *soft power* adalah pencitraan yang berfungsi pertahanan untuk reputasi diri. Namun kembali pada definisi power yang mana Morgenthau definisikan sebagai “kemampuan aktor untuk mempengaruhi aktor yang lain”. Power dalam konteks tersebut bersifat offensif, sedangkan pencitraan pemerintah lebih defensif. Jika dikorelasikan dengan *one million friend zero enemy*, maka kurang terlihat adanya pengaruh terhadap perilaku aktor lainnya. Malah brand tersebut senantiasa menghasilkan sebuah duel antara kaum yang kontra dan pemerintah.

Dengan demikian teori bagi peneliti bukanlah harus dimaknai layaknya barang konsumsi yang sebatas digunakan begitu saja dalam konteks penelitian. Pada realitanya, *paradox of plenty* sebagai kondisi struktural makro tidaklah selalu berimplikasi sama disetiap negara. Sederhanyanya setiap logika makro dan eksternal seperti *paradox of plenty* tidak sepenuhnya bisa mempengaruhi negara yang nyatanya memiliki logika internal masing-masing dan bervariasi. Dengan begitu, maka pekerjaan besarnya adalah bagaimana peneliti mampu mengindonesiakan teori-teori hubungan internasional yang makro tersebut kedalam konteks mikro. Sehingga, Liberalisasi dalam penelitian ini bukanlah aspek yang bersifat deterministik. Senantiasa ada sebuah kolaborasi antara determinan eksternal dan logika Internal suatu negara. *Million friends zero enemy* menunjukkan sebuah pilihan *style* diplomasi dimana senantiasa ada benturan antara citra tanpa musuh, dan tuntutan yang dimediasi oleh liberalisasi infromasi.

Implikasi lanjutan dari penelitian ini adalah berkaitan sejauh mana independensi kedaulatan sebuah negara. Liberalisasi Informasi dalam nuansa



*paradox of plenty* menjadi beban atas sikap asertif pemerintah. Padahal Logikanya dalam konstelasi politik global yang kompleks dan *uncertainty*, justru sebaiknya disikapi dengan optimisme dan dalam derajat tertentu perlu kiranya mengedepankan sosok citra *High profile*. Kebijakan luar negeri seharusnya lebih merupakan aksi, bukan sekedar reaksi atas keadaan. Seturbulen apapun, *paradox of plenty* tersusun atas sebuah pola-pola, meskipun pola-pola tersebut tidak bergerak tetap sebagaimana deret ukur matematik. Namun pola-pola tersebut dapat dibaca dengan analisa dialektika historis. Bahwa *paradox of plenty* merupakan konstruksi sosial yang terdesain, bukan kenyataan yang alamiah (*nature*). Dengan demikian, maka arah kebijakan luar negeri menjadi titik penting untuk kebijakan yang lebih asertif.

Implikasi teoritik lainnya adalah berkaitan dengan cara memandang Neoliberalisme. Neoliberalisme dan pencitraan selama ini diasumsikan merupakan dua aspek yang tidak berkorelasi. Pencitraan yang sedang dialami Indonesia merupakan refleksi dari the *condition of postmodernity*. Lebih lanjut kondisi posmodernitas tersebut tidak bisa dipisahkan dari perubahan struktur material yang terjadi (liberalisasi informasi). Fenomena yang terjadi Indonesia merupakan prediksi implisit yang pernah diungkapkan Harvey dalam dua karyanya, *The postmodern condition* dan *the brief history of neoliberalism*.

Selain itu, penelitian ini dapat sebagai komplement analisis neoliberalisme terdahulu yang senantiasa menekankan analisis kebijakan ekonomi sebagai manifestasi praktik neoliberal. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak selamanya neoliberalisme diasosiasikan dengan kebijakan ekonomi. Penelitian ini membuka ruang bagi para akademisi Hubungan Internasional dapat turut serta andil dalam mengulas ketika logika perekonomian juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Perluasan ekspansi neoliberalisme tersebut mengembangkan analisis yang selama ini *Foreign Policy* acapkali disamakan dengan *trade policy*. Dengan kata lain, neoliberalisme yang selama ini dipahami selalu inheren dengan preskripsi kebijakan ekonomi seharusnya tidak dapat bersentuhan dengan kebijakan *zero enemy*. Namun realitanya, dalam kasus Indonesia neoliberalisme dalam kebijakan

luar negeri terindikasi baik secara konseptual dan didukung oleh contoh yang telah disebutkan.

Kolaborasi level analisis antara struktur versus agen juga dipakai peneliti dalam menunjukkan liberalisasi informasi yang mendorong lahirnya simbolisasi *Million friends zero enemy*. Terlihat bagaimana ternyata derivasi dalam menghubungkan keduanya tidaklah bersifat deterministik. Peneliti melihat dari sudut pandang adanya kesesuaian antar acirra domestik yang kemudian menjadi beban dalam artikulasi kebijakan luar negeri. Pada hakikatnya masih ada pilihan berupa jalan keluar dari belenggu pencitraan tersebut.

Membuktikan eksistensi neoliberalisme bukan pekerjaan mudah karena neoliberalisme bergerak dalam kerangka wacana yang imaterial. Sehingga upaya memastikan mengenai kapan jangkar awal neoliberalisme dari siapa *agency* dari eksistensi neoliberalisme tentu bukan lah pembahasan yang kiranya bisa dijawab melalui penelitian ini. Penelitian ini tidak bermaksud menutup perdebatan mengenai jangkar awal eksistensi neoliberalisme yang selam ini masih berlangsung. Dengan demikian peneliti mempersilahkan adanya penelitian lanjutan analisis tentang kebijakan luar negeri era presiden SBY.

#### **4.2. Rekomendasi**

*Navigating a Turbulent Ocean* merupakan kiasan yang menjadi *grand picture* kebijakan luar negeri Indonesia era pemerintahan presiden SBY. Namun berlayar ditengah ombak bergejolak bukan pekerjaan yang semudah untuk sekedar dikiaskan. Samudra yang turbulen membutuhkan sebuah kapal yang sanggup dengan lincah bermanuver. Sedangkan *million friends zero enemy* merupakan aksesoris yang justru menjadi beban yang berat bagi kapal. Kapal yang memiliki beban berat ditengah ombak yang juga besar tentunya sangat berpotensi mengurangi kelincihan kapal dalam berlayar. Bahkan sebaliknya justru membuat ritme akselerasi kapal yang terlalu monoton dan menjadi lamban dalam merespon ombak yang turbulen. Implikasinya, setiap kali ombak muncul, kapal tersebut tidak bisa menghindar ombak dengan cepat. Menyadari bahayanya berlayar dalam ombak yang senantiasa turbulen dengan kapal yang demikian lamban, maka

pemerintah perlu segera mengantisipasi dengan mendesain ulang kapal. Semboyan *million friends zero enemy* perlu untuk segera direvisi dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Selain kapal yang tangguh, satu faktor yang tidak bisa diabaikan adalah *skill* navigasi dari sang nakhoda. Skill menjadi faktor krusial bagi keselamatan kapal dalam mengarungi samudra turbulen yang penuh ombak. Pada hakikatnya, cara terbaik untuk merespon ombak adalah bukan dengan mengikutinya, namun justru menghadapinya. Ombak bukanlah sesuatu untuk dihindari karena akselerasi ombak lebih cepat ketimbang akselerasi kapal. Namun sang nakoda justru memilih menghindari bahaya ombak dengan mengikuti kemana arus ombak melalui sikap *all direction foreign policy*. Disinilah arah kebijakan luar negeri perlu untuk segera dipakemkan dalam skala prioritas, dan bukan ke segala arah. Dengan buku putih, diharapkan muncul suatu pertunjukkan diplomasi yang terarah demi *navigating a turbulent ocean*. Dengan kata lain, buku putih dapat menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki tujuan dan jatidiri, terlepas dari bahayanya ombak di lautan yang turbulen.

Kiasan diatas merupakan rekomendasi yang ditawarkan penulis dalam upaya untuk mendesain kebijakan luar negeri Indonesia dalam era Liberalisasi Informasi. Upaya melakukan redesain semboyan *million friends zero enemy* menurut hemat penulis perlu lantaran kondisi yang dihadapi sekarang menunjukkan kontroversi tidak sepenuhnya diatasi dengan sekedar citra. Meskipun tidak tenggelam, namun banyak sekali ancaman dari ombak yang ternyata berimplikasi pada daya tahan kapal. Ancaman tersebut tampil dalam serangkaian kontroversi yang mengiringi kebijakan luar negeri Indonesia yang memiliki pekerjaan berat mengarungi Kasus Kedaulatan, TKI dan diskursus pertentangan Barat dan Islam. Serangkaian kontroversi yang telah disebutkan ternyata tidak direspon pemerintah secara asertif karena terbebani oleh pencitraan. Pencitraan yang semula diasumsikan sebagai strategi dalam mengontrol kontroversi, ternyata justru memicu turbulensi selanjutnya.

Tidak bisa dipungkiri, hasil penelitian ini masih menimbulkan tanda tanya ketika berbicara mengenai kepentingan nasional. Apa kepentingan nasional dibalik upaya simbolisasi *million friend zero enemy*?. Dalam konteks ini

kepentingan nasional perlu dibedakan dengan implikasi positif. Implikasi positif dari upaya menampilkan sosok protagonis dalam kebijakan luar negeri telah diperoleh Indonesia. Semisal bagaimana citra Indonesia berangsur mulai membaik dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum penting Internasional.

Lalu apakah implikasi positif tersebut merupakan wujud dari kepentingan nasional yang berguna bagi kepentingan domestik. Disinilah penulis melihat sebuah keterputusan antara kepentingan dalam negeri dan Luar negeri padahal pada hakikatnya kebijakan luar negeri merupakan pengejawantahan dari kepentingan domestik. Ungkapan pemerintah bahwa kebijakan yang bersahabat akan mendorong datangnya investor dan meningkatkan kemajuan ekonomi merupakan dua hal yang terlalu jauh korelasinya. Mengambil contoh Cina yang masih menjadi tempat tujuan investor sekalipun Cina tidak menampilkan sosok protagonis dalam kebijakan luar negerinya. Penulis lebih memilih untuk absen dalam menjawab pertanyaan yang problematis mengenai ada tidaknya kepentingan nasional tersebut. Meski demikian, Implikasi positif yang diraih Indonesia setidaknya merupakan prestasi bagi presiden SBY.

Barangkali kritikan akan muncul dalam menilai alasan penulis memilih topik *Million friend zero enemy*. Sebuah semboyan yang tidak merepresentasikan kepentingan nasional memungkinkan untuk dipinggirkan dalam kajian akademis Ilmu Hubungan Internasional. Namun justru karena anomali itulah, tema ini memancing penulis untuk mengelaborasi lebih seksama logika dibalik kebijakan tersebut. Anomali merupakan stimulus bagi akademisi untuk mengemas kebaruan analisis sehingga berimplikasi secara teoritik bagi kebijakan luar negeri. Jika selama ini realis meyakini jika kebijakan luar negeri merupakan manifestasi kepentingan nasional, maka Indonesia menjadi prototipe negara anomali yang menciptakan slogan dengan menyisakan absurditas kepentingan nasional.

Dalam konteks penerapan simbol Islam moderat misalnya, maka tidak terlihat ada terobosan yang cukup fundamental pada era pemerintahan presiden SBY. Islam moderat jika didefinisikan sebagai Islam yang demokratis sesungguhnya bukanlah simbol baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Salah seorangng mantan perdana menteri Indonesia, Muhammad Natsir merupakan arketipe sosok tokoh Muslim yang menjunjung tinggi demokrasi. Bapak Natsir

aktif berdiplomasi dalam forum forum besar Internasional terutama berkaitan dengan sikap untuk berupaya mengklarifikasi tuduhan Islam sebagai agama yang tidak demokratis.

Namun yang membuat Islam moderat presiden SBY berbeda adalah keterkaitannya dengan *million friend zero enemy*. Hal tersebut tentu berbeda ketika Bapak Natsir melalui diplomasinya mendapat kecaman dari barat karena sikapnya yang pro gerakan Islam dalam menentang praktik imperialisme. Sedangkan presiden SBY memainkan simbolisasi tersebut untuk bersahabat dengan barat. Pernyataan presiden SBY yang acapkali berupaya untuk mengakuisisi simbol demokrasi dan Islam sekaligus dengan mengagungkan Indonesia sebagai negara demokrasi Islam terbesar sejatinya mencerminkan sikap *zero enemy* yang diekstraksi dari figur diri dari presiden *SBY*. Sebuah pilihan prinsip yang seolah moderat, namun malah dipermasalahkan dalam suatu isu sensitif, sebagai contoh konflik Israel palestina.

Kebijakan asertif tidaklah selalu harus diasosiasikan dengan perang dan atau memutuskan hubungan diplomatik. Sultan Shahrir merupakan arketipe figur yang menjunjung tinggi spirit non konfrontatif dengan mengutamakan langkah-langkah diplomasi. Bukan berarti peneliti menyamaratakan seorang Shahrir dengan presiden SBY yang hidup pada konteks zaman berbeda. Namun zaman pascakemerdekaan memiliki nilai dilematis yang lebih berat ditengah tuduhan Indonesia sebagai bentukan fasis oleh sekutu pemenang perang dunia kedua. Kita tentunya tidak lupa perdebatan antara Shahrir dan Tan Malaka mengenai mana yang lebih baik, diplomasi atau melawan secara fisik. Shahrir dalam bukunya "perjuangan kita" mengkritik karya "gerpolek" dari Tan Malaka yang menyarankan gerilya sebagai solusi mempertahankan kemerdekaan. Shahrir optimis bahwa diplomasi adalah jalan keluar paling rasional dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan sejarah memperlihatkan diplomasi Shahrir pada sidang PBB sangatlah memukau para hadirin dengan menegaskan bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi HAM. Sebuah atraksi diplomasi yang krusial kontribusinya bagi upaya mempertahankan negara kesatuan republik Indonesia pada masa tersebut.

Tidak bisa dipungkiri, perdebatan klasik senantiasa muncul ke permukaan dalam kaitannya dengan model diplomasi yang baik. Sebuah perdebatan yang hingga kini menjadi dikotomi, diantara pedagog dan demagog. Dikotomi terjadi pada awal kemerdekaan, yang mana Shahrir adalah seorang pedagog, sedangkan Sukarno lebih pada sosok demagog. Demagog merupakan kemampuan orasi untuk melakukan mobilisasi massa. Sedangkan pedagog lebih pada menstimulus potensialitas subyek yang sifatnya lebih pada pendidikan dan diplomasi. Tidak bisa dipungkiri, ruang publik membutuhkan keduanya. Sedangkan dalam konteks presiden SBY, peneliti tidak menemukan satupun dari keduanya. Jika kita perhatikan seksama, ungkapan dan Pidato presiden SBY berlangsung datar, dan tidak memiliki efek getaran yang dapat menggairahkan publik sebagaimana Bung Karno. Sebaliknya, presiden juga tidak menunjukkan sebuah statement pedagogik yang memiliki argumentasi berkualitas, edukatif dan posisi ideologis yang jelas sebagaimana Hatta, Natsir dan Shahrir. Tanpa demagog dan pedagog, maka yang terjadi adalah rentetan kontroversi dalam ruang publik yang tidak mencerdaskan, dan emosional. Dengan demikian, maka sebuah konferensi pers dari seorang presiden dan Menteri Luar negeri seharusnya memiliki kedua nilai tersebut, pedagog dan demagog sekaligus, atau minimal salah satu dari keduanya. Sebuah kombinasi antara Sukarno yang demagog dan Hatta yang pedagog akan menghasilkan sebuah cita rasa diplomasi yang berkualitas dan bertujuan nasional.

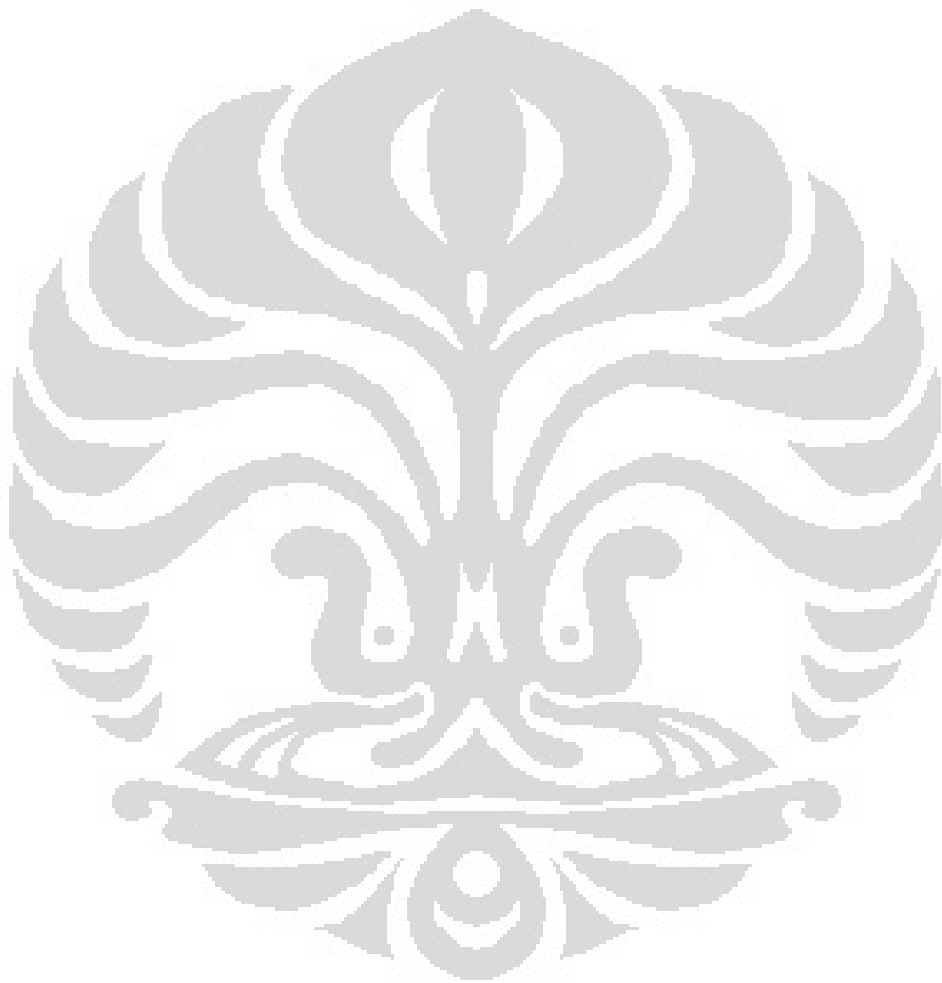
Kolaborasi antara pedagog dan demagog memungkinkan diwujudkan menjadi realita ketika pemerintah mampu menata kelola liberalisasi Informasi. Ruang publik yang semakin dibuka oleh informasi merupakan panggung dimana pemerintah dan masyarakatnya berdialog. Ruang publik secara teoritik juga erat kontribusinya bagi pendidikan politik masyarakat untuk memahami posisi negaranya. Ibarat sebuah panggung, masyarakat membutuhkan atraksi yang lebih inspiratif dan menarik. Sebuah harapan akan ruang publik yang damai Ibarat jauh panggung dari api kondisi jika teater diplomasi sekedar diisi oleh opera sabun pencitraan yang direpetisi hingga mencapai titik kejenuhan.. Sutan Shahrir memberikan sebuah pelajaran bagaimana ruang publik sebagai sebuah *hardware* sebaiknya selalu rutin diinstall dengan *software* berupa kesadaran kritis dari masyarakat. Dengan kesadaran kritis tersebut maka kebijakan luar negeri akan

senantiasa menghasilkan dialog yang komunikatif antara pemerintah dan masyarakatnya.

Dengan kata lain, masyarakat dalam era informasi seharusnya perlu ditempatkan sebagai produsen, bukan konsumen dalam artikulasi politik luar negeri. Namun upaya tersebut senantiasa terbentur pada dilema, dimana dialog tentu membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh konsensus. Tetapi langkah untuk tidak melibatkan juga ternyata memunculkan kontroversi. Maka dari itu, perlu segera proses diplomasi dikemas dengan edukatif dimana informasi dilibatkan dalam proses dialogis tersebut. Namun upaya untuk merubah kondisi liberalisasi informasi akan terhalang sebelum ruang publik dimanajemen dengan edukatif dimana ada kolaborasi antar informasi dan pemerintah.

Oleh karena itulah perlu adanya rekontekstualisasi identitas nasional dengan menghidupkan kembali pergerakan nasional. Identitas hanya bisa diciptakan melalui dialog yang melibatkan publik sebagai produsen, dan bukan sepihak oleh pemerintah. Selain itu, dalam era liberalisasi informasi dimana masalah tidak bisa diprediksi, maka sebuah buku pedoman dalam kebijakan luar negeri perlu untuk ditawarkan. Sebuah buku pedoman mampu memberikan arah mana kontroversi yang harus direspon pemerintah dan mana yang sebaiknya diabaikan. Namun buku pedoman perlu untuk dikomunikasikan secara dialogis dengan berbagai elemen publik sebagai produsen kebijakan luar negeri.

Dengan demikian, maka perlu untuk mengembalikan status Indonesia sebagai subyek dalam hubungan Internasional. Indonesia lahir dengan sebuah tujuan dan arah yang teguh sekalipun didera ombak. Sebagaimana impian Bung Hatta yang memproyeksikan Indonesia sebagai negara yang dengan leluasa sanggup mendayung diantara dua karang. Bung Hatta mengharapkan Indonesia sebagai negara yang tidak terombang ambing dan tidak mudah dirangkul oleh kubu manapun ketika berlayar. Filosofi dalam karya tersebut tentunya masih relevan dalam samudra dunia yang semakin turbulen ini. Dengan kata lain, Indonesia perlu kembali pada tujuan dasar kemerdekaan, yakni untuk menjadi negara yang merdeka seutuhnya ditengah gejolak samudra internasional sebagaimana tertuang dalam konstitusi 1945.





## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Arnsperger, Cristian. *Critical Political Economy: Complexity, Rationality and The Logic of Post-Orthodox Neoliberalism*. London: Routledge, 2008.
- Alan, McKee. *Textual Analysis: A Beginner's Guide*. London: Sage, 2003.
- Baudrillard, Jean. *Simulacra and Simulation*. Cambridge: Polity Press, 2005.
- Bell, Daniel. *The Cultural Contradiction of Late Capitalism*. London: Basic Books, 1991.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Burchill, Scott. et.all. *Theories of International Relation 3rd edition*. New York: Palgrav Macmilian, 2005.
- Castells, Manuel. *Network Society*. New York, Palgrave Macmilian, 1987.
- Comaroff, Jean ed. *Millenial Capitalism and Culture of Neoliberalisme*. London: Duke University Press, 2001.
- Dahm, Bernard. *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1987
- Djalal, Dino P. *Harus Bisa : Seni Kepemimpinan ala SBY*. Jakarta: R&W, 2009.
- Esposito, Joseph. L. *The Islamic Threat: Myth or Reality?*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Fairclough, Norman. *Critical Discourse Analysis*. London: Sage, 1995.
- Fatwa, A.M. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Friedman, Thomas L. *The Lexus and Olive Tree*. Chicago: Farrar Strauss & Giroux, 1999.
- Habermas, Juregen. *Theory of Communicative action*. London: Sage, 2000.
- Giddens, Anthony. *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press, 1984.
- Grabel, Ilene. dan Chang, Ha Joon. *Membongkar Mitos Neolib: Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan*. Yogyakarta: Insist Press, 2008.
- Hadiz, Vedi. *Ekonomi Politik Indonesia Post Suharto*. Jakarta : LP3ES, 1999.
- Hardt, Michael, & Negri, Antonio. *Empire*. Harvard: Harvard University Press, 2000.

- Harvey, David. *The Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press, 2005.
- Hayek, Fredrick. *The Road of Serfdom*. Polity Press, 2008.
- Hudson, Valerie. *Foreign Policy Analysis : Classic and Contemporary Theory*. Plymouth : Rowman and Littlefield Publishers Inc, 2007.
- Johnson, Hall. *The essence of Diplomacy*. London: Sage, 2001
- Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Negara Fisip UI, 2006.
- Laclau, Ernesto dan Mouffe, Chantal. *Hegemony and Socialist Strategy : Towards a Radical Democratic Politics*. London dan New York: Verso, 2000.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Lyotard, Jean Francois. *Libidinal Economy*. New York: Althone Press, 1994.
- Levebre, Henry. *The Survival of Capitalism: Reproduction of the Relation of Production*. New York. St Martin Press, 1976.
- Karen, Liftin, *Public Eyes: Satelite Imegery, The Globalization Transparency, and New Network of Surveillance*. Ed. James. N Rosenau, & J.P Singh, Informational Technology and Global Politics, New York: State University, 2009.
- Natsir, Muhammad. *Kapita Selekta*. Bandung: Mizan, 1999.
- Melissen, Jan. *Public Diplomacy Between Theory and Practice*. Ed. J. Noya The Present and Future of Public Diplomacy: A European Perspective. California: Rand Corporation, 2006.
- Neack, Lousie. *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era*. 2nd ed. Plymouth : Rowman and Littlefield Publishers, Inc, 2008.
- Neumann, William L. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* 6th edition. Boston: Pearson Education, 2006.
- Nye, Joseph. S. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs. *Public Diplomacy in the 21st century*, 2004.
- Piliang, Yasraf. *Transpolitika: Dinamika Politik dalam Era Virtualitas*. Yogyakarta: Jalasutra, 2005.

- Rosenau, James, dan Singh, J.P eds. *Informational Technology and Global Politics*. New York: State University, 2008.
- Rosenau. James. *Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods*. New York: Sage Publications, 2004.
- Stiglitz, Joseph. *Freefall: America, Free market and the sinking of global economy*. New York: Norton Company, 2009.
- Williamson, John. *What Washington Means by Policy Reform*, dalam: Williamson, John (ed.): *Latin American Readjustment: How Much has Happened*. Washington: Institute for International Economics, 1989.
- Viotti, Paul dan Mark V. Kauppi, *Intenational Relation Theory 4th Edition*. New York: Pearson Education, 2010.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. *Indonesia Unggul: Kumpulan Pemikiran dan Tulisan Pilihan oleh Presiden Republik Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2009.

## JURNAL

- Bruce, Cuming. "Political Economy of Chinese Foreign Policy." *Modern China*, 5:4 (Oktober 1979): 411-461 <<http://www.jstor.org/stable/188840>>.
- Kruckeberg, Daniel. & Vujnovic. "Public Relations, Not Propaganda, For US Public Diplomacy in a Post-9/11 World: Challenges and Opportunities". *Journal of Communication Management*, 9:4 (2005): 296-308, <http://proquest.umi.com/>, diakses 22 Januari 2008.
- Onuf, Nicholas. "Institution, Intention, and International Relation". *Review of International Studies*, 28:1 (2002): 211-228.
- Rey, James. "Integrating Level Analysis in World politics". *Journal of Theoretical Politics*, 12:3 (2001): 355-388. London: Sage.
- Rosecrance, Richard. "The rise of Virtual State". *Journal of Foreign Affairs* 7:5 (1996): 46-61.
- Scammell, Margareth. Political Brands and Consumer Citizens: The Rebranding of Tony Blair. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 611, (May, 2007): 176-192.
- Singer, David. "The Level of Analisis Problem in International Relation". *World Politics*, 14:1 (1961): 77-92.

- Soroka, Stuart. "Media and Foreign Policy". *Press Politics*. 8:1 (1993): 27-48.
- Szsero, Endre. "Between Neopositivism, Neoliberalism and Postmodernism". *Academic Press* 4:3 (2007): 244-286.
- Tan, Paige Johnson. "Navigating a Turbulent Ocean: Indonesia Worldview and Foreign Policy". *Asean Perspective*, 31:3 (2007): 147-181.
- Todorov, Alexander. dan Mandizodsa. "Public Opinion on Foreign Policy, The Multilateral Public That Perceive itself as Multilateral". *Public Opinion Quarterly* 68:3 (2007):323-348.
- Wang, Jay. "Public Diplomacy and Global Business". *The Journal of Business Strategy* 27 :3(2006) : 49-58. <<http://proquest.umi.com/>>
- Wendt, Alexander. Collective Identity Formation and the International State. *American Political Science Review* 88: 2 (1994): 384-396.
- Leong Benedict Khang. "Indonesian Foreign Policy: Change And Continuity Amidst A Changing Environment". *POINTER*, 24:2(1998): 167-189. <[http://www.mindef.gov.sg/safti/pointer/back/journals/1998/\\_2/2.html](http://www.mindef.gov.sg/safti/pointer/back/journals/1998/_2/2.html)>

## **TABLOID**

- Aditya, Noviansyah. "Indonesia Buka 21 Hubungan Diplomatik 2011". *Tempo* 12 Januari 2011.
- Ali, D. Januar. "Diplomasi dua kaki". *Harian Rakyat Merdeka*, 20 November 2006. hal. 4.
- Azra, Azyumardi. "Indonesia Menjadi Model Tidak adanya Benturan antara Islam dan Demokrasi. *Tabloid Diplomasi* Maret-April 2012.
- Geovannie, Jefri. "Maksimalisasi Fungsi diplomasi", *Tabloid Prioritas* edisi 12 tahun 1 edisi 2 sampai 8 April.
- Heryanto, Gun. "Marketing Politik dan Industri Citra". *Seputar Indonesia* 16 november 2009. hal. 4.
- Juwana, Hikmahanto. "Sekali Lagi Lindungi TKI!". *Seputar Indonesia*. 21 Juni 2011.
- "Jakarta Menjadi salah satu diplomatik kapital bagi kawasan Asia Timur". *Tabloid Diplomasi* 12 maret 2012

Suryaningtyas,Toto. “Bersikap Tegas Namun Kepala Tetap Dingin”.*Kompas*12  
Maret 2005.

Wedhaswari, Ingrid . “SBY: Thousand Friends, Zero Enemy”. *Kompas*, 20  
oktober 2009. Hal. 7.

## **DOKUMEN PEMERINTAH**

Bappenas. 2005. “Kepentingan Nasional Indonesia dalam Dunia Internasional”. 3  
Januari 2011.dalam [www.bappenas.go.id/get-file-server/node/150/](http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/150/).

Kementrian Luar negeri, 2005. Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri,  
Hassan Wirayuda, Jakarta, 19 Januari 2005.

\_\_\_\_\_. 2010. Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri,  
Marty M. Natalegawa, “Indonesia and the World 2010”. Jakarta, 8  
Januari 2010.

\_\_\_\_\_. 2009. Masukan P3k2 Aspasaf tentang Isu Ambalat. 5  
juni 2009.

Kementrian Komunikasi dan Infomatika. Undang Undang Nomer 14 tahun 2008  
Tentang keterbukaan Infomasi publik

\_\_\_\_\_.Naskah Kajian Undang Undang No. 36  
Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dikaitkan dengan Perkembangan  
Konvergensi Telematika.

Kementrian Perhubungan. “Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 72  
Tahun 1999 Tentang Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang  
Telekomunikasi Indonesia”.

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. “Pidato awal Jabatan Presiden Republik  
Indonesia periode 2009-2014 dalam acara pelantikan di gedung  
DPR/MPR Senayan”. 20 Oktober 2009

-----“Transkrip paparan Presiden Republik  
Indonesia Mengenai Perkembangan Tanah Air Kepada Kalangan  
Diplomatik”. 15 Februari 2012 dalam  
<<http://www.setkab.go.id/index.php?pg=detailartikel&p=4012>> diakses  
2 maret 2012.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Pidato Presiden SBY menanggapi isu Ambalat" 2 September 2010.

Situs Resmi Kepresidenan Republik Indonesia. "Indonesia and america 21st century partnership". 20 november 2008. 28 september 2011. <<http://www.presidentri.go.id/index.php/eng/pidato/2008/11/15/1032.html>>

----- "Presiden paparkan perkembangan kepada 128 negara". November 2011. 10 maret 2012. <<http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/2012/02/15/7673.html>>.

Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

## **LAPORAN ORGANISASI**

Indobarometer. "Islam: Potensi terror Terbuka". 2007. 3 maret 2010 <[http://www.indobarometer.com/ib/index.php?id=13&&menu=artikel\\_detail&&jdl=Islam:%20Potensi%20Teror%20Terbuka](http://www.indobarometer.com/ib/index.php?id=13&&menu=artikel_detail&&jdl=Islam:%20Potensi%20Teror%20Terbuka)>

International Monetary Fund. "*Letter of Intent*" 22 April 1998.

Internet World Stats. "Top 20 countries with highest internet users in 2011" 13 november 2011. <<http://www.internetworldstats.com/top20.htm>>

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. "Pola Kecenderungan Perilaku Memilih Pemilu 2004". 3 Maret 2010 <<http://www.pdii.lipi.go.id/index.php/.../6409/6410.pdf>>

Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Temuan Pokok Survey Nasional. "Sikap Pemilih Pada Pemilihan Presiden tahun 2004". 3 maret 2010 <<http://www.lp3es.or.id/sikap/pemilih/2004>>.

Lembaga Survey Indonesia. "Upaya Presiden Menghapus Presiden Persepsi". 2007. 12 April 2012. <<http://www.lsi.or.id/liputan/247/kiprah-sby-menghapus-anggapan-presiden-persepsi>>

Lingkaran Survey Indonesia "Tumbuhnya muslim demokrat". 2006. 13 maret 2010. <<http://www.lsi.co.id/artikel.php?id=220>>

Tifa, et all. "Laporan Penelitian Rating publik: Menuju Televisi yang Ramah Keluarga". Survey Februari-April 2009.

United Nation. "Indonesia Democratic Response". By Indonesia Foreign Minister Hasan Wirayuda. 15 November 2001. 2 februari 2012  
<<http://www.un.org/webcast/ga/56/statements/011115indonesiaE.html>>

## **WEBSITE**

Arfani, Riza, Noer. "Diplomasi Paras Tinggi Untuk Indonesia". 2008. 30 oktober 2009. <<http://www.ire.php.view.sss/=2346.html>>

Bashori. "Tiga Pemikiran Islam: Radikal, Moderat dan Liberal". 2009. <<http://www.ppalanwar.com/index.php?mact=News,cntnt01,print,0&cntnt01articleid=122&cntnt01showtemplate=false&cntnt01returnid=49>>

"Diplomasi SBY soal TKI Paling lemah. 2 maret 2012. <<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/11/20/10170421/DiplomasiSBY.soalTKI.Paling.Lemah.html>>

"Diplomat Harus Melek Informasi". 2 April 2012. <<http://www.kemlu.go.id/moscow/Pages/News.aspx?IDP=5541&l=id>>

Djibril.Muhammad "Kepuasan Rakyat Terhadap Kinerja SBY terus Menurun". Republika online, 16 Oktober 2011. 2 April 2012. <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/11/10/16/1t5h1c-kepuasan-rakyat-terhadap-kinerja-sby-terus-menurun>>

Harvey, David. *Is This Really the End of Neoliberalism?*, 15 Maret 2010. 1 Februari 2011. <<http://tomweston.net/EndNeoLib.pdf>>

Hermanto. "Santun Kunci Kemenangan SBY". 2009. 3 maret 2010 <[http://www.sbypresidenku.com/content/politik\\_santun\\_kunci\\_kemenangan\\_sby](http://www.sbypresidenku.com/content/politik_santun_kunci_kemenangan_sby)>

"Indonesia pertahankan Islam Moderat". Harian Aceh 14 November 2011. <<http://harian-aceh.com/2011/11/14/sby-indonesia-pertahankan-islam-moderat>>

"Indonesia Hindari diplomasi Marah marah". 2 februari 2011. <<http://analisis.vivanews.com/news/read/160062-indonesia-hindari-diplomasi-marah-marah>>

- “Jakarta Tolak Ekonomi Kapitalis”. 4 Desember 2011.  
<<http://occupyindonesia.org/berita/dalam-media/84-occupy-jakarta-tolak-ekonomi-kapitalis-html>>
- Khumaini, Anwar. Perang Adalah Jalan Terakhir. 2 juni 2009. 3 maret 2011  
<<http://www.detiknews.com/read/2009/06/02/183146/1141643/10/sby-perang-adalah-jalan-terakhir>>
- “Menlu Marty Natalegawa membuka Diklat Internasional ke-9 Sesi dan Sesparlu di Gedung Pancasila”. 10 april 2012”. 25 april 2012.  
<[http://www.kemlu.go.id/\\_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemID=ad15ef98-529d-4923-86cb8c2d55d5f94,>](http://www.kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemID=ad15ef98-529d-4923-86cb8c2d55d5f94,>)
- Palimbong, Luther. “Sikap Pemerintah Indonesia terhadap Liberalisasi dalam Kerangka WTO: Studi Kasus Perdagangan Jasa di Sub-sektor Telekomunikasi”. 2006. 23 November 2011.  
<<http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=79111>>
- Setyono, Budi. Iklan dan Politik. Kampanye Periklanan Pemilihan Umum 2004. 2008. diakses 4 april 2010. <<http://www.siwah.com/pendidikan/marketing-politik/iklan-politik-resensi-buku.html>>

## **TRANSKRIP WAWANCARA**

Responden : Ziyad Falahi



Narasumber : Bapak Priyatna Alibasya, Direktur Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Tempat : Lantai 10, Gedung Pancasila, Jalan Pejambon. Jakarta Pusat.

Waktu : Rabu, 3 Mei 2012, Pk 10.00 WIB.

Penulis memulai proses wawancara dengan menjelaskan secara sepintas judul yang akan diteliti oleh penulis. Oleh karena itulah Pak Priyatna kemudian menekankan adanya ada suatu elemen yang signifikan yang perlu dianalisa yang beliau sebut sebagai : *foreign policy and media effect. Media effect on foreign policy* dapat ditinjau dengan telaah tentang media sebagaimana telaah *content analysis*. Apalagi ketika melakukan content analisis, menelaah surat kabar merupakan aktivitas yang menarik dalam meninjau kebijakan luar negeri, menurut perspektif beliau.

Namun beliau juga menanyakan kembali kepada penulis: apakah media effect itu benar-benar ada. Perkembangan menunjukkan adanya era yang sudah berubah di Indonesia. Departemen luar negeri harus update website tiap detik meskipun departemen luar negeri bukan kantor berita. Namun departemen luar negeri menyadari perlunya update yang berkaitan dengan *foreign policy making*. Pak Priyatna kemudian memberikan buku undang undang nomer 43 tahun 2008 tentang keterbukaan dan informasi publik kepada peneliti dengan menjelaskan adanya era yang semakin berubah. Efek Media menurut pak priyatna merupakan sebuah kecenderungan dimana bisa kita saksikan dalam kasus evakuasi WNI yang ering memicu kontroversi.

Penulis kemudian menanyakan apakah *media effect* sejak dulu tidak terjadi. Pak priyatna menjelaskan sejak dulu keterlibatan media dalam kebijakan luar negeri telah ada. Dan beliau menambahkan departemen luar negeri sebagai sebuah institusi tidak pernah tertutup. Bahkan sejak zaman suharto yang tertutup sekalipun, deplu telah menjadi institusi yang terbuka. Hal tersebut karena departemen luar negeri memiliki misi menjalin persahabatan dan keterbukaan adalah falsafah dan prinsip deplu. Sebagai bukti, pak priyatna menunjuk mantan menteri luar negeri Ali Alatas adalah seorang yang terbuka dan ramah pada media

sekalipun merupakan menteri pada zaman Suharto. Dengan kata lain, pak priyatna menambahkan, ada atau tidaknya efek media, deplu akan selalu terbuka. Deplu adalah subyek yang berperan besar bagi perkembangan media, ujarnya.

Pak priyatna menjelaskan bahwa personel departemen luar negeri merupakan sosok terpilih yang telah memiliki jiwa perubahan dan keterbukaan. Pengalaman hidup di luar negeri telah merubah pola berpikir sehingga deplu tidak bisa tertutup. Berbagai langkah komunikasi dengan media pun dilakukan. Namun media seringkali menganalisa secara bebas dan terlalu berlebihan.

Penulis kemudian menanyakan mengenai semboyan *million friend zero enemy* yang dalam beberapa media juga disebut sebagai *thousand friend zero enemy*. Pak Priyatna menjelaskan bahwa semboyan ini merupakan sebuah alat saja untuk menampilkan sosok Indonesia sebagai negara yang bersahabat. Sebuah kesan positif dari internasional menjadi penting untuk kepentingan nasional bangsa Indonesia. Menampilkan sosok bersahabat untuk dimanfaatkan guna kepentingan bangsa. Kedua slogan tersebut sama sama relevan untuk digunakan. Informasi lain yang diberikan pak priyatna adalah semboyan tersebut merupakan usul dari presiden SBY. Dengan kata lain semboyan ini perlu dalam kaitanya dengan upaya mengoptimalkan potensi kerjasama agar bisa dimanfaatkan. Pernyataan tersebut sekaligus mengakhiri proses wawancara tersebut.